

LAPORAN KINERJA KPPN PAINAN TAHUN 2021



KATA PENGANTAR

Dalam rangka lebih memantapkan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing unit di lingkungan pemerintahan sekaligus mengupayakan adanya sinkronisasi antara aspek perencanaan, penganggaran, dan akuntabilitas, telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Upaya mengaitkan aspek penganggaran dan aspek akuntabilitas ini dimaksudkan untuk mengarah kepada penerapan konsep anggaran berbasis kinerja (*performance based budgeting*) secara utuh sebagai salah satu pendekatan dalam sistem penganggaran sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Laporan Kinerja Tahun 2021 Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Painan dibuat sebagai perwujudan pertanggungjawaban atas pencapaian Kontrak Kinerja tahun 2021 yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi yang telah dicanangkan. Laporan ini disusun sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 serta mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Reviu Atas Laporan Kinerja. Laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban berbagai kinerja yang telah diraih dikaitkan dengan penyediaan anggaran yang dialokasikan serta pencapaian visi misi organisasi dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pembangunan.

Laporan Kinerja memiliki fungsi secara eksternal sebagai alat kendali, alat penilaian kinerja dan pendekatan kuantitatif, dan sebagai perwujudan transparansi pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Painan. Sedangkan secara internal diharapkan laporan ini dapat memacu peningkatan kinerja setiap seksi/subbagian yang ada di lingkungan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Painan.

Disamping itu, penyusunan Laporan Kinerja ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas dan transparan serta sekaligus sebagai pertanggungjawaban terhadap tugas yang dipercayakan kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Painan.

LAKIN KPPN Painan Tahun 2021 ini diharapkan secara eksternal dapat digunakan sebagai media pertanggungjawaban kinerja kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Selain itu, LAKIN KPPN Painan tahun 2021 diharapkan secara internal dapat digunakan oleh seluruh jajaran pegawai Direktorat Jenderal Perbendaharaan khususnya pegawai KPPN Painan untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja seiring dengan bertambahnya tantangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di masa yang akan datang.

Painan, 17 Januari 2022
Kepala KPPN Painan



Elwy Syahdely
NIP 196404251985032001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Pada tahun 2021 Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Painan telah melaksanakan berbagai kegiatan yang menghasilkan capaian kinerja sebagaimana mengacu pada target yang telah ditetapkan dalam Kontrak Kinerja Kepala KPPN Painan tahun 2021. Pencapaian kinerja KPPN Painan pada tahun 2021 dapat dilihat dari pencapaian indikator-indikator sebagai berikut:

A. Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah mencapai target antara lain:

1. Nilai LK Kuasa BUN KPPN terealisasi sebesar 99,44 dari target 94;
2. Indeks kepuasan satker terhadap layanan KPPN terealisasi sebesar 4,94 dari target 4,64;
3. Persentase penyelesaian SP2D secara tepat waktu terealisasi sebesar 99,67% dari target 99.40%;
4. Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi terealisasi sebesar 87,59 dari target 87,5;
5. Persentase tingkat implementasi standarisasi kompetensi pejabat perbendaharaan terealisasi sebesar 100% dari target 30%;
6. Persentase tingkat implementasi Aplikasi SAKTI terealisasi sebesar 100% dari target 100%;
7. Persentase akurasi perencanaan kas KPPN terealisasi sebesar 100% dari target 82%;
8. Indeks efektivitas pengelolaan pengeluaran kas terealisasi sebesar 4 dari target 3,15;
9. Nilai kinerja pelaksanaan anggaran K/L terealisasi sebesar 98,21 dari target 89;
10. Nilai kinerja peyaluran Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa terealisasi sebesar 99.05 dari target 90;
11. Tingkat Partisipasi Pelaporan Data Capaian Output satker terealisasi sebesar 100 dari target 89;
12. Persentase rekonsiliasi tingkat UAKPA secara tepat waktu dan andal terealisasi sebesar 100% dari target 98,1%;
13. Persentase LPJ Bendahara yang andal dan tepat waktu terealisasi sebesar 100% dari target 98%;
14. Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis *Strategy Focused Organization* terealisasi sebesar 88,38 dari target 84;
15. Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal terealisasi sebesar 97,08 dari target 83;
16. Nilai rata rata *hard competency* pegawai terealisasi sebesar 88 dari target 78;
17. Persentase kualitas pelaksanaan anggaran KPPN terealisasi sebesar 95,93% dari target 95,5%;

18. Nilai kualitas LK tingkat UAKPA dan UAKPB terealisasi sebesar 96 dari target 82;
19. Tingkat kualitas pengelolaan BMN terealisasi sebesar 108% dari target 100%;
20. Persentase penyelesaian implementasi Rencana Sistem Manajemen Keamanan Informasi terealisasi sebesar 100% dari target 80%;

B. Indikator Kinerja yang tidak mencapai target adalah:

(N I H I L)

Berbagai keberhasilan kinerja yang telah dicapai diatas kiranya dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan pada tahun-tahun selanjutnya. Sementara untuk kinerja yang belum tercapai sebagaimana yang diharapkan, selanjutnya dapat ditingkatkan sehingga mencapai kinerja yang diharapkan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i	
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii	
DAFTAR ISI	iii	
BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang	2
	B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	2
	C. Peran Strategis	7
	D. Sistematika Laporan	13
BAB II	PERENCANAAN KINERJA	12
	A. Rencana Strategis	13
	B. Penetapan/Perjanjian Kinerja	13
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA	22
	A. Capaian Kinerja Organisasi	23
	B. Realisasi Anggaran	72
	C. Kinerja Lain-Lain	76
BAB IV	PENUTUP	86
LAMPIRAN	<ul style="list-style-type: none">▪ Perjanjian Kinerja Kepala KPPN Painan 2021▪ Rencana Kinerja Tahunan KPPN Painan 2021▪ Formulir Pengukuran Kinerja KPPN Painan 2021▪ Form II ADIK Rencana Kerja dan Anggaran KPPN Painan Tahun 2021	

BAB I

PENDAHULUAN

- A. LATAR BELAKANG
- B. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI
- C. PERAN STRATEGIS
- D. SISTEMATIKA LAPORAN

A. LATAR BELAKANG



Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Painan merupakan kantor vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan Tipe A2 yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.01/2012

tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Painan dituntut untuk melaksanakan tugas tersebut dengan *prudent*, transparan, akuntabel, efektif, dan efisien sesuai prinsip *good governance* sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Salah satu azas penyelenggaraan *good governance* yang tercantum dalam UU No. 28 Tahun 1999 adalah azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN).

Laporan Kinerja Tahun 2021 Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Painan dibuat sebagai perwujudan pertanggungjawaban atas pencapaian Kontrak Kinerja tahun 2019 yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi yang telah dicanangkan. Laporan ini disusun sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 serta mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Reviu Atas Laporan Kinerja. Laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban berbagai kinerja yang telah diraih dikaitkan dengan penyediaan anggaran yang dialokasikan serta pencapaian visi misi organisasi dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pembangunan.

B. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan, KPPN Painan mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

1. Melaksanakan kewenangan perbendaharaan dan bendahara umum negara,
2. Penyaluran pembiayaan atas beban anggaran,

3. Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran anggaran melalui dan dari kas negara berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugasnya KPPN Painan menyelenggarakan fungsi :

1. Pengujian terhadap surat perintah pembayaran berdasarkan peraturan perundang-undangan;
2. Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari kas negara atas nama Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara;
3. Penyaluran pembiayaan atas beban APBN;
4. Penilaian dan pengesahan terhadap penggunaan uang yang telah disalurkan;
5. Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran negara melalui dan dari Kas Negara;
6. Pengiriman dan penerimaan kiriman uang;
7. Penyusunan laporan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara;
8. Penyusunan laporan realisasi pembiayaan yang berasal dari pinjaman dan hibah luar negeri;
9. Penatausahaan Penerimaan Negara Bukan Pajak;
10. Penyelenggaraan verifikasi transaksi keuangan dan akuntansi;
11. Pembuatan tanggapan dan penyelesaian temuan hasil pemeriksaan;
12. Pelaksanaan kehumasan; dan
13. Pelaksanaan administrasi KPPN

Subbagian Umum;

Yang mempunyai tugas-tugas melakukan pengelolaan organisasi, kinerja, SDM, dan keuangan, penatausahaan user SPAN, penyusunan bahan masukan dan konsep Renstra, Renja, RKT, PK, LAKIP KPPN, serta tata usaha, rumah tangga dan kehumasan.

Seksi Pencairan Dana dan Manajemen Satker;

Yang mempunyai tugas melakukan pengujian resume tagihan dan SPM, penerbitan SP2D, penerbitan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja BLU, penerbitan Surat Pengesahan atas Ralat SPM dari satuan kerja dan Nota Dinas Kesalahan dan Perbaikan SP2D Hasil Verifikasi pada KPPN, dan pengelolaan data kontrak, data supplier, belanja pegawai satker, dan monitoring dan evaluasi penyerapan anggaran satker, serta melakukan pembinaan dan bimbingan teknis pengelolaan perbendaharaan, fungsi customer service, supervisi teknis SPAN dan helpdesk SAKTI, pemantauan standar kualitas layanan KPPN, dan penyediaan layanan perbendaharaan.

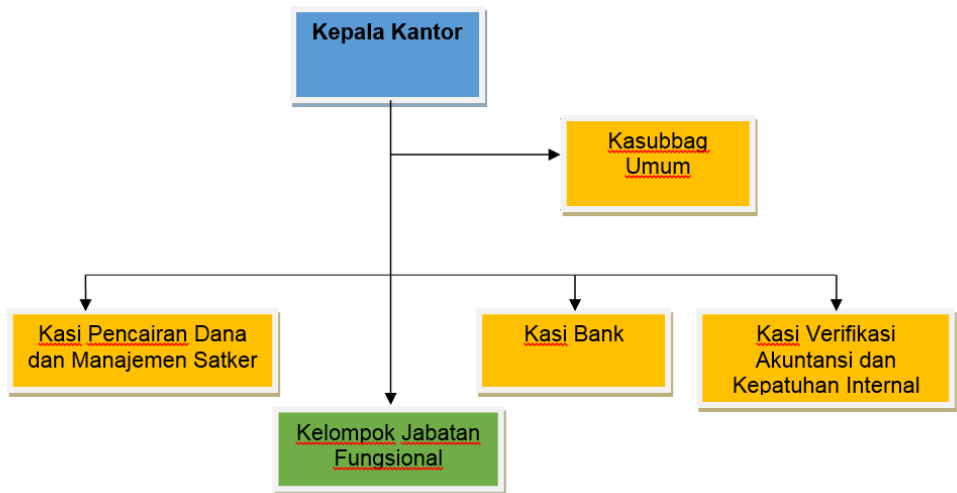
Seksi Bank;

Yang mempunyai tugas melakukan penyelesaian transaksi pencairan dana, fungsi cash management, penerbitan Daftar Tagihan, pengelolaan rekening Kuasa BUN dan Bendahara serta penatausahaan penerimaan negara. Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa, Mengelola PFK dan SIKP.

Seksi Verifikasi, Akuntansi dan Kepatuhan Internal;

Yang mempunyai tugas melakukan verifikasi pembayaran, rekonsiliasi laporan akuntansi, penyusunan Laporan Keuangan tingkat Kuasa BUN, realisasi dan analisis kinerja anggaran, analisis data statistik laporan keuangan, pemantauan pengendalian intern, pengelolaan risiko, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin pegawai, dan tindak lanjut hasil pengawasan.

Secara lebih rinci struktur organisasi KPPN Painan di gambarkan dalam bagan di bawah ini :



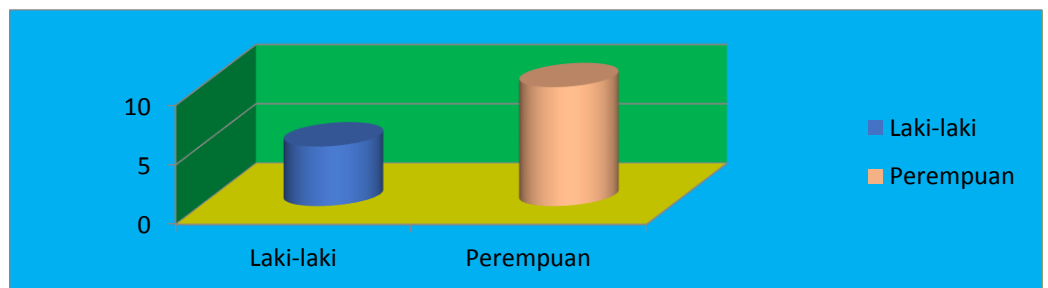
Sumber Daya Manusia Ditjen Perbendaharaan

Perubahan struktur organisasi tanpa didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai tidak akan membawa ke arah pencapaian misi yang dicita-citakan. Jumlah SDM Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Painan per 31 Desember tahun 2021 adalah sebanyak 15 orang pegawai, dengan statistik sebagai berikut :

TABEL 1.1
SDM KPPN Painan Per 31 Desember 2021

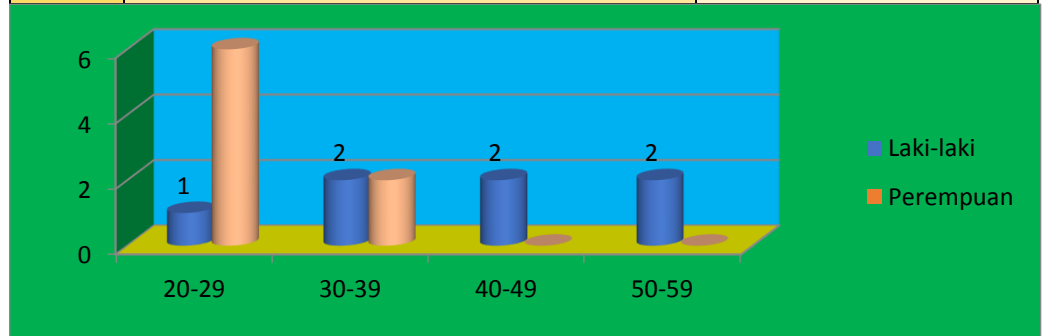
Statistik Pegawai berdasarkan jenis kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	5
2	Perempuan	10



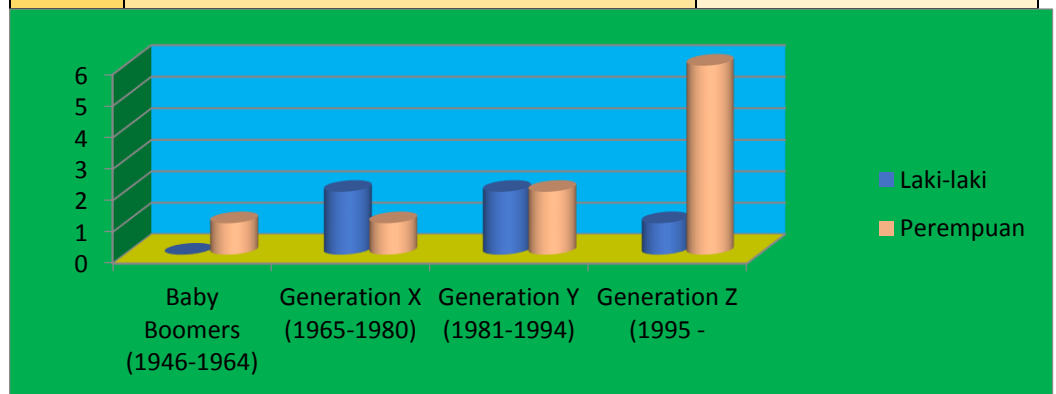
Statistik Pegawai berdasarkan kelompok Usia

No	Usia	Jumlah
1	20 – 29	7
2	30 – 39	4
3	40 – 49	2
4	50 - 59	2



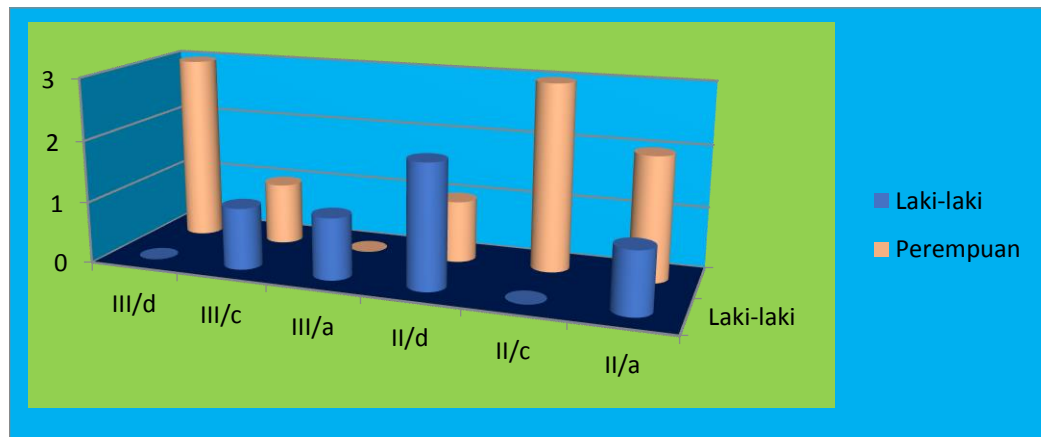
Statistik Pegawai berdasarkan kelompok generasi

No	Kelompok Generasi	Jumlah
1	Baby Boomers (1946-1964)	1
2	Generation X (1965-1980)	3
3	Generation Y (1981-1994)	4
4	Generation Z (1995-)	7



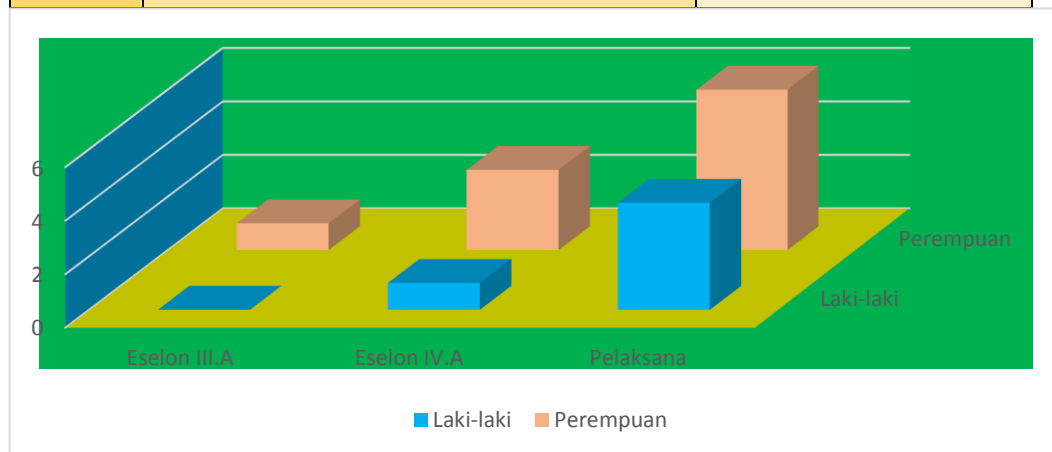
Statistik Pegawai berdasarkan kepangkatan

Pangkat	IV/a	III/d	III/c	III/a	II/d	II/c	II/a
Laki-laki	0	0	1	1	2	0	1
Perempuan	0	3	1	0	1	3	2



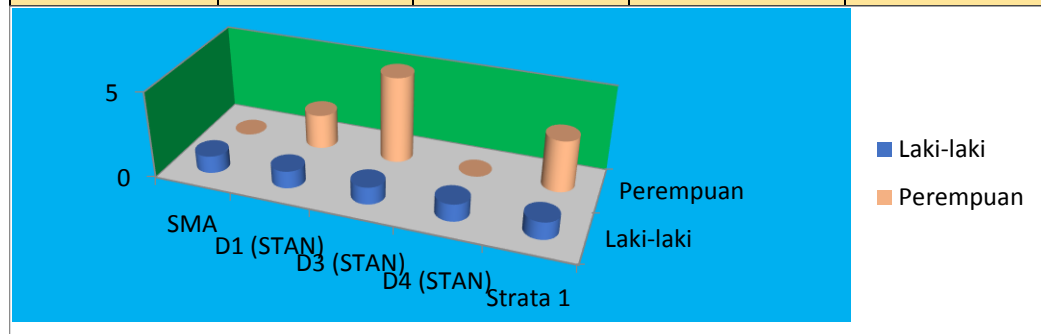
Statistik Pegawai berdasarkan Eselon jabatan

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Eselon III.A	1
2	Eselon IV.A	4
2	Pelaksana dan kelompok Fungsional	10



Statistik Pegawai berdasarkan Pendidikan

Pendidikan	SMA	D.1	D.3	S.1
Jumlah	1	3	7	4



Beberapa kegiatan internal telah dilakukan KPPN Painan dalam meningkatkan Kompetensi dan Kapasitas para pegawai sebagai berikut:

1. Gugus Kendali Mutu (GKM), dilaksanakan untuk menyamakan persepsi/pemahaman terhadap aturan-aturan terbaru yang terkait dengan pelaksanaan tugas.
2. *Briefing* pagi, Setiap hari kamis pagi (kecuali minggu pertama) sebelum jam layanan dibuka, KPPN Painan mengadakan *Briefing* pagi yang diisi dengan doa bersama, internalisasi strategi organisasi KPPN Painan, Visi dan Misi DJPb serta Visi dan Misi KPPN Painan, kemudian salah satu orang memberikan informasi positif sekaligus membahas *issue* terbaru terkait pelaksanaan tugas serta penyampaian yel-yel KPPN Painan.
3. *Sharing Knowledge*, merupakan transfer knowledge dari pegawai yang telah melaksanakan diklat atau bimtek kepada para pegawai.
4. Pelatihan *Service Excellent*, Pelatihan ini diadakan satu kali dalam setahun untuk meningkatkan kualitas SDM dalam memberikan pelayanan kepada mitra kerja KPPN Painan.
5. Pemilihan Pegawai Teladan, kegiatan ini untuk memotivasi para pegawai untuk meningkatkan kinerja.
6. *Capacity Building*, kegiatan ini dilakukan satu kali dalam setahun untuk meningkatkan kekompakan dan kerja sama diantara para pegawai. Sehingga dapat menciptakan sinergi yang baik di KPPN Painan.

C. PERAN STRATEGIS

Disamping mengemban kewenangan kebhendahaaran, Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara adalah pengelola keuangan dalam arti seutuhnya, yaitu sekaligus berfungsi sebagai kasir, pengawas keuangan, dan manajer keuangan.

Fungsi pengawasan disini terbatas pada aspek *rechmatigheid* dan *wetmatigheid* yang dilakukan pada saat terjadinya penerimaan atau pengeluaran. Pengujian secara *rechmatigheid* dapat diartikan sebagai pengujian formal terhadap pihak yang berhak mengajukan tagihan pada negara berdasarkan bukti –bukti yang sah. Sedangkan pengujian secara *wetmatigheid* dapat diartikan sebagai pengujian atas ketersediaan dana dalam APBN/DIPA.

Sejalan dengan ketentuan tersebut di atas, peran strategis Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku pelaksana kebijakan Direktorat Jenderal Perbendaharaan antara lain :

1. Pelaksanaan kebijakan di bidang perbendaharaan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
2. Pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran negara serta pengelolaan aset dan kewajiban pemerintah,

3. Pelaksanaan akuntansi pusat dan penyusunan laporan keuangan pemerintah tingkat KPPN.

Sebagai suatu organisasi terbuka, KPPN Painan berinteraksi dan menyelaraskan diri dengan lingkungan eksternal, seperti teknologi, ekonomi, undang-undang, dan faktor sosial kemasyarakatan, serta selalu berusaha menggunakan teknologi yang tepat guna dan menjadi organisasi pembelajar yang menuntut seluruh elemen di dalamnya untuk selalu mengembangkan diri sesuai kerangka budaya organisasi yaitu profesional, disiplin, akuntabel, pelayanan prima, dan inovatif. Segenap elemen senantiasa berpikir dengan langkah-langkah yang sistematis dan terencana, memiliki role model dalam hal berpikir mengenai kemajuan organisasi melalui keteladanan para pimpinan organisasi, pandangan dan harapan pimpinan terhadap organisasi ke depan.

Tuntutan masyarakat akan pengelolaan anggaran negara yang transparan, akuntabel, terintegrasi, dan berbasis kinerja merupakan faktor pendorong bagi pemerintah untuk melaksanakan reformasi, selain kebutuhan internal pemerintah sendiri. Sebagai pioner, Kementerian Keuangan telah memulai proses reformasi sejak tahun 2004. Perubahan yang dilaksanakan mencakup aspek penataan organisasi, perbaikan proses bisnis, dan peningkatan manajemen sumber daya manusia.

Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) sebagai suatu sistem berbasis teknologi informasi ditujukan untuk mendukung pencapaian prinsip-prinsip pengelolaan anggaran tersebut. Seluruh proses yang terkait dengan pengelolaan anggaran yang meliputi penyusunan anggaran, manajemen dokumen anggaran, manajemen komitmen pengadaan barang dan jasa, manajemen pembayaran, manajemen penerimaan negara, manajemen kas dan pelaporan diintegrasikan ke dalam SPAN.

Perubahan yang paling mendasar yang diusung SPAN adalah otomasi proses bisnis yang dijalankan di Direktorat Jenderal Anggaran dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Proses-proses yang sifatnya pengulangan (*repetition*) yang selama ini dilaksanakan secara manual akan diotomasi oleh sistem. Perubahan lainnya adalah:

- penggunaan database tunggal yang sebelumnya berdiri sendiri-sendiri baik di tingkat pusat, unit vertikal maupun satuan kerja
- perekaman data dilakukan cukup sekali yang sebelumnya dilaksanakan di setiap unit yang terkait, dan
- pembakuan *business rules* untuk semua proses serta analisis.

Perubahan yang signifikan tersebut menuntut perbaikan pada proses bisnis yang dijalankan dan perubahan pola pikir para pihak yang terlibat pada proses bisnis tersebut, baik pengguna langsung dari Kementerian Keuangan (internal), maupun dari kementerian/lembaga (eksternal).

Pembangunan dan implementasi SPAN melibatkan banyak pihak, baik lingkungan internal Kementerian Keuangan maupun pihak eksternal seperti Kementerian/Lembaga, Bank Indonesia dan perbankan umum. Mengingat luasnya cakupan SPAN dan banyaknya pihak-pihak yang terlibat, dibutuhkan kesepahaman dan dukungan yang kuat dari seluruh *Stakeholders*.

Selama tahun 2021, terdapat beberapa isu yang dihadapi KPPN Painan yang berkaitan dengan pengelolaan APBN antara lain :

1. **Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa**

Sesuai dengan amanah Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Dana Alokasi Khusus (DAK) atau *specific purpose grant* adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Kegiatan khusus yang didanai oleh DAK adalah penyediaan/perbaikan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat. DAK Fisik terbagi atas DAK Reguler, DAK Afirmasi, dan DAK Penugasan.

Sementara UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, alokasi Dana Desa merupakan pendanaan dari APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam rangka membantu kelancaran penyaluran dana transfer DAK Fisik dan Dana Desa kepada pemerintah daerah dan desa, KPPN Painan selaku KPA Penyaluran Transfer DAK Fisik dan Dana Desa meyalurkan dana transfer berupa DAK Fisik (DAK Fisik Reguler, DAK Fisik Afirmasi, dan DAK Fisik Penugasan) dan Dana Desa sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan DAK Fisik dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa.

a. **Realisasi Penyaluran DAK Fisik Tahun 2021 Kab. Pesisir Selatan**

Selaku Pengelola Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa KPPN Painan mengelola satu Pemerintah Daerah yaitu Kabupaten Pesisir Selatan. Berdasarkan Aplikasi OM SPAN dan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan transfer ke Daerah dan Dana Desa tahun Anggaran 2021 dalam rangka mendukung penanganan 10 Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya terdapat perubahan alokasi pagu penyaluran DAK Fisik Kabupaten Pesisir Selatan TA 2021, yang awalnya

sebesar Rp159.876.353.000,- menjadi sebesar Rp151.280.528.000,-, dengan rincian sebagai berikut:

Pagu dan Total Realisasi Penyaluran DAK Fisik pada KPPN Painan

No.	Jenis DAK	Bidang	Subbidang	Pagu	Total Realisasi
1	Reguler	Pendidikan	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	623.092.000	569.534.000
2	Reguler	Pendidikan	Sekolah Dasar (SD)	15.406.472.000	14.275.936.020
3	Reguler	Pendidikan	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	5.242.604.000	4.517.068.332
4	Reguler	Pendidikan	Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)	200.000.000	200.000.000
5	Reguler	Kesehatan dan Keluarga Berencana	Pelayanan Dasar	13.046.277.000	12.934.376.580
6	Reguler	Kesehatan dan Keluarga Berencana	Pelayanan Rujukan	5.116.517.000	4.613.319.450
7	Reguler	Kesehatan dan Keluarga Berencana	Pelayanan Kefarmasian dan Bahan Habis Pakai	4.057.968.000	3.749.511.815
8	Reguler	Kesehatan dan Keluarga Berencana	Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan	764.000.000	755.800.000
9	Reguler	Kesehatan dan Keluarga Berencana	Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (Reguler)	1.488.826.000	1.162.694.805
10	Reguler	Jalan	Jalan (Reguler)	31.892.224.000	30.500.244.000
11	Reguler	Transportasi perdesaan	Transportasi Perdesaan	3.404.561.000	1.916.229.963
TOTAL DAK FISIK REGULER				81.242.541.000	75.194.714.965
12	Penugasan	Kesehatan dan Keluarga Berencana	Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (Penurunan Stunting)	280.000.000	271.491.650
13	Penugasan	Kesehatan dan Keluarga Berencana	Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (Penurunan Stunting)	17.699.971.000	13.584.414.014
14	Penugasan	Kesehatan dan Keluarga Berencana	Penguatan Intervensi Stunting (Penurunan Stunting)	1.429.325.000	1.364.600.000
15	Penugasan	Jalan	Jalan (Ketahanan Pangan)	13.839.968.000	13.230.997.000
16	Penugasan	Pertanian	Pertanian (Ketahanan Pangan)	1.197.000.000	1.185.010.000
17	Penugasan	Irigasi	Irigasi (Ketahanan Pangan)	5.749.096.000	4.586.972.294
18	Penugasan	Kelautan dan Perikanan	Kelautan dan Perikanan (Ketahanan Pangan)	1.569.035.000	1.536.605.750
19	Penugasan	Air Minum	Air Minum (Penanggulangan Kemiskinan)	6.380.645.000	5.876.661.000
20	Penugasan	Industri Kecil dan Menengah	Industri Kecil dan Menengah (Ekonomi Berkelanjutan)	15.545.824.000	13.424.975.654
21	Penugasan	Pariwisata	Pariwisata (Ekonomi Berkelanjutan)	3.291.966.000	3.059.722.939
22	Penugasan	Sanitasi	Sanitasi (Penanggulangan Kemiskinan)	3.055.157.000	3.055.157.000
TOTAL DAK FISIK PENUGASAN				70.037.987.000	61.176.607.301
TOTAL DAK FISIK				151.280.528.000	136.371.322.266

Sumber: OM SPAN dan SAKTI, (diolah)

b. Realisasi Penyaluran DAK Fisik Tahun 2021 Kab.Pesisir Selatan

KPPN Painan selaku Kuasa Pengguna Anggaran Pengelola DAK Fisik dan Dana Desa menyalurkan Dana Desa kepada 182 Nagari pada wilayah Kabupaten Pesisir Selatan dengan pagu untuk Tahun Anggaran 2021 mengalami peningkatan sebesar 1,42% dari Pagu Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 169,802,227,000,-. Pagu tersebut terdiri dari:

Pagu Dana Desa Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021

PEMDA	Pagu Non BLT	Pagu BLT	earmarked 8%
Kab Pesisir Selatan	144.347.619.000	19.353.600.000	6.101.008.000
TOTAL	169.802.227.000		

Sumber Data : OM SPAN (diolah)

Sampai dengan akhir periode penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2021 pada 20 Desember 2021, Penyaluran Dana Desa pada wilayah kabupaten pesisir selatan telah selesai dilaksanakan dengan rincian sebagai berikut :

Penyaluran Dana Desa Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021

	JML DESA	8%	BLT	NON BLT	TOTAL
KAB.PESISIR SELATAN					
PAGU					169.802.227.000
PENYALURAN					
TAHAP I	182	6.101.008.000	6.451.200.000	54.924.771.000	67.476.979.000
TAHAP II	182		6.451.200.000	59.856.890.800	66.308.090.800
TAHAP III	182		6.451.200.000	29.565.957.200	36.017.157.200
TOTAL PENYALURAN					169.802.227.000
					100%

Sumber Data : OM SPAN (diolah)

2. Implementasi SAKTI Satker Lingkup Kementerian/Lembaga

Dalam rangka implementasi Aplikasi SAKTI pada tahun 2021 oleh satuan kerja lingkup Kementerian/Lembaga, KPPN Painan telah melakukan tahapan demi tahapan dalam implementasi SAKTI ini, yaitu:

- Peninjukan Trainers Modul SAKTI KPPN (kelompok modul pelaksanaan dan pelaporan)
- Sosialisasi SAKTI Web Full Module kepada Satker Non Piloting
- Pendampingan transaksi awal dan Migrasi Saldo Awal SAKTI Satker Piloting tahap V
- Pendaftaran pengguna SAKTI Satler non piloting

- e. FGD SAKTI KL dengan Kategori Mega (Kemenag, MA, Polri, Kemenkumham) dan DK/TP
- f. Publikasi tahap 1 SAKTI
- g. Fasilitasi Change Readiness Survey Satker Non Piloting
- h. Monev Implementasi SAKTI Satker Piloting SAKTI Tahap I s.d V
- i. Workshop/Rakor SAKTI manajerial (KPA Satker non piloting)
- j. EUT SAKTI Satker Non Piloting
- k. Publikasi tahap 2 SAKTI
- l. Pemutakhiran data pengguna SAKTI Satker rollout
- m. Pendampingan Pembuatan SPM Gaji Induk Januari TA 2022

3. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

Kinerja pelaksanaan anggaran K/L dinilai berdasarkan nilai IKPA. Penilaian IKPA menjadi salah satu penentu pemberian *reward* untuk DIPA tahun anggaran berikutnya. Pengukuran kualitas pelaksanaan anggaran tersebut meliputi empat aspek yang dijabarkan dalam 13 indikator (IKPA), yaitu:

Aspek	IKPA
Kesesuaian Perencanaan dengan Pelaksanaan	Revisi DIPA
	Deviasi Halaman III DIPA
	Pagu Minus
Kepatuhan Terhadap Regulasi	Data kontrak
	Pengelolaan UP dan TUP
	LPJ Bendahara
	Dispensasi SPM
Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan	Penyerapan Anggaran
	Penyelesaian Tagihan
	Konfirmasi Capaian Output
	Retur SP2D
Efisiensi Pelaksanaan Kegiatan	Renkas
	Kesalahan SPM

D. SISTEMATIKA LAPORAN

Sistematika penyajian LAKIN KPPN Painan tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issues*) yang sedang dihadapi organisasi.

2. Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

3. Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

C. Kinerja Lain-Lain

4. Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

5. Lampiran

Perjanjian Kinerja Kepala KPPN Painan Tahun 2021, Formulir Pengukuran Kinerja 2021, dan Rencana Kinerja Tahunan 2021, dan Form II ADIK Rencana Kinerja dan Anggaran KPPN Painan Tahun 2021.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

- A. RENCANA STRATEGIS**
- B. PENETAPAN/PERJANJIAN KINERJA**

A. RENCANA STRATEGIS

Rencana strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Dalam rencana strategis termuat visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, dan program yang diuraikan secara konseptual.

Visi berkaitan dengan pandangan ke depan yang menyangkut arah dan tujuan instansi agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi menggambarkan tentang keadaan masa depan yang diinginkan. Sedangkan misi merupakan penjabaran lebih lanjut dari visi itu sendiri.

Visidan Misi KPPN Painan

Dengan mengacu terhadap Visi Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Painan telah menetapkan visi, yaitu:

“Menjadi pengelola perbendaharaan negara di daerah yang profesional, modern, transparan, akuntabel dan inovatif”.

Untuk mewujudkan visi tersebut, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Painan menjalankan misi yang sejalan dengan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang meliputi:

1. Menjamin kelancaran pencairan dana APBN secara tepat sasaran, tepat waktu dan tepat jumlah
2. Mengelola penerimaan negara secara profesional dan akuntabel
3. Mewujudkan pelaporan Pertanggungjawaban APBN yang akurat dan tepat waktu.

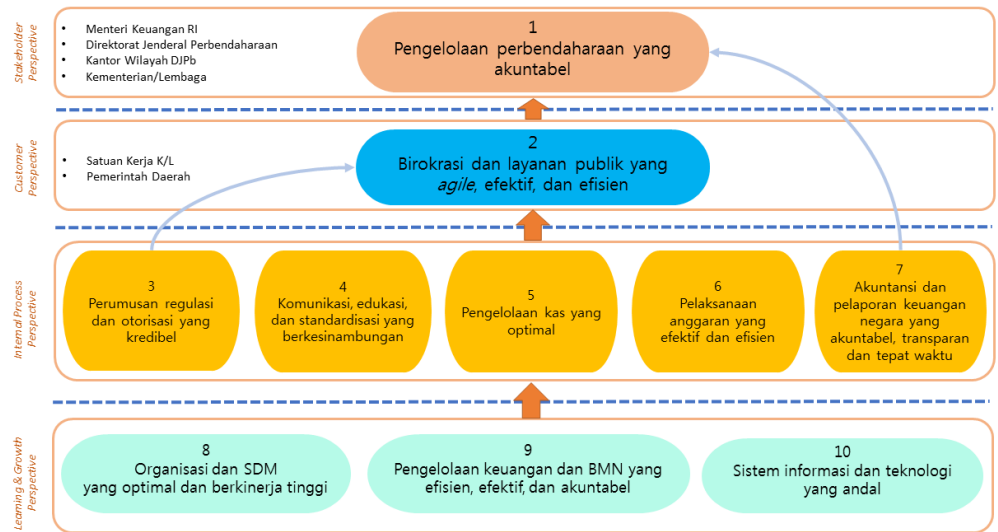
MOTTO KPPN Painan yaitu “Kami berkomitmen melayani anda dengan MOTTO **TERBAIK**” Transparan, Efektif dan Efisien, Responsif, Berkelanjutan, Andal, Inovasi, dan Kompeten.

B. PENETAPAN/ PERJANJIAN KINERJA

Penetapan Kinerja tahun 2021 yang merupakan Kontrak Kinerja Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Painan dengan Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Barat, dijabarkan dalam 10 (sepuluh) Sasaran Strategis dan 20 (dua puluh) Indikator Kinerja Utama (IKU). Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama yang terangkum dalam Peta Strategi Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Painan tersebut dapat ditunjukkan pada Gambar 2.1.

GAMBAR 2.1
Peta Strategi Kepala KPPN Tahun 2021

Peta Strategi
Kepala KPPN
Tahun 2021



Peta Strategi yang telah disusun tersebut dapat dilihat berdasarkan 4 (empat) perspektif, yaitu:

1. **Stakeholders Perspective**

Perspektif ini mencakup sasaran strategis yang ingin diwujudkan organisasi untuk memenuhi harapan sehingga dinilai berhasil dari sudut pandang *stakeholder* (pemangku kepentingan). Stakeholder adalah pihak internal dan eksternal yang secara langsung atau tidak langsung memiliki kepentingan atas *output* atau *outcome* dari suatu organisasi, tetapi tidak menggunakan layanan organisasi secara langsung.

2. **Customer Perspective**

Perspektif ini mencakup sasaran strategis yang ingin diwujudkan organisasi untuk memenuhi harapan *customer* (pengguna layanan) dan/atau harapan organisasi terhadap *customer*. *Customer* merupakan pihak luar yang terkait langsung dengan pelayanan suatu organisasi.

3. **Internal Process Perspective**

Perspektif ini mencakup sasaran strategis yang ingin diwujudkan melalui rangkaian proses yang dikelola organisasi dalam memberikan layanan dan menciptakan nilai bagi *stakeholder* dan *customer* (*value chain*).

4. **Learning and Growth Perspective**

Perspektif ini mencakup sasaran strategis berupa kondisi ideal atas sumber daya internal organisasi yang ingin diwujudkan atau yang seharusnya dimiliki oleh

organisasi untuk menjalankan proses bisnis guna menghasilkan *output* atau *outcome* organisasi yang sesuai dengan harapan *customer* dan *stakeholder*.

Sepuluh sasaran strategis yang telah ditetapkan untuk setiap perspektif untuk tahun 2021 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. *Stakeholders perspective* terdiri atas 1 (satu) sasaran strategis, yaitu:

▪ **Pengelolaan perbendaharaan yang akuntabel**

Pengelolaan perbendaharaan negara artinya KPPN mempunyai tugas untuk mengelola pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Dalam mengelola pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan negara secara akurat serta dapat dipertanggungjawabkan dengan kinerja pelaksanaan anggaran yang optimal, Laporan Keuangan yang memadai serta tingkat akurasi perencanaan kas yang tinggi.

Pada sasaran strategis ini, terdapat indikator kinerja berupa Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran K/L, Nilai kualitas LK Kuasa BUN KPPN dan Persentase akurasi perencanaan kas KPPN.

2. *Customer perspective* terdiri atas 1 (satu) sasaran strategis, yaitu:

▪ **Birokrasi dan layanan public yang agile, efektif, dan efisien**

Reformasi birokrasi Kementerian Keuangan, termasuk Direktorat Jenderal Perbendaharaan telah dimulai sejak tahun 2007. Untuk menguji keberhasilan reformasi tersebut, salah satunya diukur dengan tingkat kepuasan mitra kerja KPPN terhadap layanan yang diberikan oleh KPPN.

Kepuasan pengguna layanan yang tinggi didefinisikan sebagai persepsi stakeholder terhadap produk atau layanan yang telah memenuhi atau melebihi dari harapan. Hal ini terjadi karena semakin meningkatnya pelayanan yang didukung dengan pengembangan aplikasi yang mudah dipahami oleh petugas Satker dan komunikasi yang baik antara KPPN dan satker membuat satker merasa lebih mudah untuk mendapatkan informasi dan kemudahan dalam penyampaian LPJ, e-rekon LK, pendaftaran supplier dan lainnya yang pada akhirnya mengurangi adanya spm retur. Tingkat kepuasan pelanggan yang tinggi akan meningkatkan citra KPPN sebagai pengelola perbendaharaan negara di daerah. Pada sasaran strategis ini, terdapat indikator kinerja berupa Indeks kepuasan satker terhadap layanan KPPN dan Indeks efektivitas pengelolaan pengeluaran kas.

3. *Internal process perspective* terdiri atas 5 (lima) sasaran strategis, yaitu:

a. Perumusan regulasi dan otorisasi yang kredibel

Pelayanan prima merupakan salah satu program reformasi birokrasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada stakeholders, regulasi sangat diperlukan baik itu dalam aturan maupun aplikasi yang mendukungnya khususnya terkait dengan pelayanan perbendaharaan, sehingga dampaknya akan bisa dirasakan oleh satker secara optimal. Pada sasaran strategis ini terdapat indikator kinerja berupa Persentase penyelesaian SP2D secara tepat waktu

b. Komunikasi, edukasi, dan standardisasi yang berkesinambungan

Implementasi SPAN dan SAKTI akan berdampak secara signifikan terhadap pengelolaan perbendaharaan. Dalam rangka menjaga kesinambungan pelaksanaan tugas dan fungsi Satker, diperlukan suatu strategi manajemen satker, khususnya dalam memberikan pemahaman terhadap pelaksanaan tugas-tugas teknis bidang perbendaharaan secara komprehensif dan berkelanjutan. Sehingga mereka memiliki informasi sekaligus kompetensi yang cukup, untuk menunjang tugas Perbendaharaan. Pada sasaran strategis ini terdapat indikator kinerja berupa (1) Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi. (2) Persentase tingkat implementasi standardisasi kompetensi pejabat perbendaharaan, dan (3) persentase tingkat implementasi aplikasi SAKTI

c. Pengelolaan kas yang optimal

Akuntabilitas pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Negara diwujudkan dengan penyusunan laporan keuangan oleh Pemerintah Pusat. Penyusunan laporan keuangan Pemerintah harus disusun secara professional dan modern. Kualitas laporan keuangan Pemerintah dapat diidentifikasi dari ketepatan waktu penyelesaian LKPP, ketepatan waktu penyelesaian UU PP APBN, serta opini audit yang baik dari BPK. Pada sasaran strategis ini terdapat indikator kinerja berupa Persentase akurasi perencanaan kas dan Indeks efektivitas pengelolaan pengeluaran kas

d. Pelaksanaan anggaran yang efektif dan efisien

Implementasi SPAN dan SAKTI akan berdampak secara signifikan terhadap pengelolaan perbendaharaan. Dalam rangka menjaga kesinambungan pelaksanaan tugas dan fungsi Satker, diperlukan suatu strategi manajemen satker, khususnya dalam memberikan pemahaman terhadap pelaksanaan tugas-tugas teknis bidang perbendaharaan secara komprehensif dan berkelanjutan. Sehingga mereka memiliki informasi sekaligus kompetensi yang cukup, untuk menunjang tugas Perbendaharaan. Pada sasaran strategis ini

terdapat indikator kinerja berupa (1) Nilai kinerja pelaksanaan anggaran K/L (2) Nilai kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa dan (3) Tingkat partisipasi pelaporan data capaian output satker

e. Akuntansi dan pelaporan keuangan negara yang akuntabel, transparan dan tepat waktu

Akuntabilitas pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Negara diwujudkan dengan penyusunan laporan keuangan oleh Pemerintah Pusat. Penyusunan laporan keuangan Pemerintah harus disusun secara professional dan modern. Kualitas laporan keuangan Pemerintah dapat diidentifikasi dari ketepatan waktu penyelesaian LKPP, ketepatan waktu penyelesaian UU PP APBN, serta opini audit yang baik dari BPK. Pada sasaran strategis ini terdapat indikator kinerja berupa Persentase rekonsiliasi tingkat UAKPA secara tepat waktu dan andal dan Persentase LPJ Bendahara yang andal dan tepat waktu.

4. *Learning and growth perspective* terdiri atas 3 (tiga) sasaran strategis, yaitu:

a. Organisasi dan SDM yang optimal dan berkienrja tinggi

Organisasi yang sehat adalah organisasi yang memenuhi kriteria kondisi internal mencakup unsur arahan, akuntabilitas, koordinasi dan kendali, orientasi eksternal, kepemimpinan, inovasi dan pembelajaran, kemampuan, motivasi, budaya, dan iklim. Organisasi yang baik tercermin dengan adanya perilaku anggota organisasi yang memiliki komitmen kuat terhadap organisasi, hubungan yang harmonis di antara setiap anggota organisasi, serta motivasi dan etos kerja yang tinggi.

SDM yang optimal adalah SDM yang memiliki kepemimpinan yang tepat, mengetahui apa yang akan dilakukan untuk semua informasi yang diterima dan kompetensi yang dibutuhkan untuk keberhasilan organisasi. Pada sasaran strategis ini terdapat indikator kinerja berupa (1) Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis *Strategy Focused Organization*, (2) Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal, (3) Nilai rata rata *hard competency* pegawai

b. Pengelolaan Keuangan dan BMN yang efisien, efektif, dan akuntabel

Dana yang tersediadalam DIPA KPPN Painan harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA KPPN Painan. Tersedianya sarana dan prasarana yang cukup dengan kualitas yang baik, sangat dibutuhkan setiap organisasi dimanapun dalam menyelenggarakan kegiatannya untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Pada sasaran strategis ini terdapat indikator kinerja berupa (1)

Persentase kualitas pelaksanaan anggaran KPPN, (2) Nilai kualitas LK tingkat UAKPA dan UAKPB, (3) Persentase pengelolaan BMN yang optimal

c. Sistem informasi dan teknologi yang andal

Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan yang andal adalah sistem informasi terintegrasi yang mengelola dan mengolah berbagai jenis input data dan informasi (resources) keuangan menjadi hasil keluaran (output) real time data dan informasi keuangan yang konsisten dalam rangka membantu para pengambil kebijakan pada unit-unit organisasi lingkup Kemenkeu dan Kementerian/Lembaga lainnya untuk mengambil keputusan dalam rangka pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel. Pada sasaran strategis ini terdapat Indikator Persentase penyelesaian implementasi Rencana Sistem Manajemen Keamanan Informasi

Pada tahun 2021, 10 (sepuluh) Sasaran Strategis tersebut terdiri atas 20 (dua puluh) Indikator Kinerja Utama yang masing-masing ditargetkan sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 2.2.

Target Indikator Kinerja Utama (IKU) Kemenkeu-Three KPPN Painan

No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2021
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pengelolaan perbendaharaan yang akuntabel	1a-N Nilai kualitas LK Kuasa BUN KPPN	94
2.	Birokrasi dan layanan publik yang <i>agile</i> , efektif, dan efisien	2a-N Indeks kepuasan satker terhadap layanan KPPN	4,64 (skala 5)
3.	Perumusan regulasi dan otorisasi yang kredibel	2a-N Persentase penyelesaian SP2D secara tepat waktu	99,4%
4.	Komunikasi, edukasi, dan standarisasi yang berkesinambungan	3a-N Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	87,5
		3b-N Persentase tingkat implementasi standarisasi kompetensi pejabat perbendaharaan	30%
		3c-CP Persentase tingkat implementasi Aplikasi SAKTI	100%
5.		4a-CP Persentase akurasi perencanaan kas	82%

	Pengelolaan kas yang optimal	4b-N	Indeks efektivitas pengelolaan pengeluaran kas	3,15 (skala 4)
6.	Pelaksanaan anggaran yang efektif dan efisien	5a-CP	Nilai kinerja pelaksanaan anggaran K/L	89
		5b-CP	Nilai kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa	90
		5c-N	Tingkat partisipasi pelaporan data capaian output satker	89
7.	Akuntansi dan pelaporan keuangan negara yang akuntabel, transparan dan tepat waktu	6a-CP	Persentase rekonsiliasi tingkat UAKPA secara tepat waktu dan andal	98,1%
		6b-N	Persentase LPJ Bendahara yang andal dan tepat waktu	98%
8.	Organisasi dan SDM yang optimal dan berkinerja tinggi	8a-N	Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis <i>Strategy Focused Organization</i>	84
		8b-N	Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal	83
		8c-N	Nilai rata-rata <i>hard competency</i> pegawai	78
9.	Pengelolaan keuangan dan BMN yang efisien, efektif dan akuntabel	9a-CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran KPPN	95,5%
		9b-N	Nilai kualitas LK tingkat UAKPA dan UAKPB	82
		9c-N	Tingkat kualitas pengelolaan BMN	100%
10.	Sistem informasi dan teknologi yang andal	10a-N	Persentase penyelesaian implementasi Rencana Sistem Manajemen Keamanan Informasi	80%

Sebagaimana disepakati dalam Kontrak (Perjanjian) Kinerja Tahun 2021, dalam upaya mencapai 10 (sepuluh) sasaran strategis tersebut, KPPN Painan didukung dengan anggaran tahun 2021 yang mendukungnya dengan 2 (dua) program dengan 8 (delapan) kegiatan sebagaimana ditunjukkan pada Tabel dibawah ini.

Kode	Program Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
CD	Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko			
CD.4803	Monev Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko	300,000	0	0
CD.6212	Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi	19,280,000	19,136,000	99.25
CD.6213	Monev Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko	3,308,000	3,308,000	100
CD.6214	Pengelolaan Kas dan Pembiayaan Negara	1,400,000	1,360,000	97,14
CD.6215	Penyelenggaraan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Negara	1,000,000	990,600	99,06
WA	Program Dukungan Manajemen			
WA.4715	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	1,081,087,000	1,080,558,071	99.95
WA.4718	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik	10,000,000	9,057,100	90.57
WA.4719	Pengelolaan Organisasi dan SDM	163,159,000	161,318,000	98.87

Dalam rangka menjamin tercapainya Sasaran Strategis yang lebih optimal, pada tahun 2021 DJPb melakukan penyempurnaan pada beberapa IKU. Penyempurnaan yang dilakukan diantaranya melalui perubahan ruang lingkup IKU dan target IKU, penetapan IKU Baru, dan penghapusan IKU dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Penetapan IKU Baru, yaitu:

1. Persentase tingkat implementasi standardisasi kompetensi pejabat perbendaharaan. Komunikasi dan edukasi merupakan upaya untuk meningkatkan pemahaman stakeholders atas peraturan dan kebijakan di bidang perbendaharaan untuk memperkuat implementasi peraturan dan kebijakan dalam rangka mendorong tercapainya tujuan organisasi. Standardisasi bertujuan untuk mewujudkan profesionalisme Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola perbendaharaan melalui peningkatan kompetensi pengelola perbendaharaan berdasarkan kualifikasi kompetensi yang dipersyaratkan dalam rangka mendukung terwujudnya pengelolaan APBN yang semakin berkualitas di seluruh Kementerian/Lembaga sehingga dapat menghasilkan output dan outcome yang maksimal sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Standardisasi pengelola perbendaharaan dimaksud

dilaksanakan melalui program pengembangan kapasitas, uji kompetensi, sertifikasi kompetensi, dan pengembangan profesi jabatan fungsional di bidang perbendaharaan. Dalam rangka memenuhi tuntutan perkembangan tata kelola keuangan yang bersifat dinamis, dibutuhkan strategi komunikasi, edukasi, dan standardisasi yang kontinu, tidak tambal sulam serta berorientasi pada usaha membuat satker mampu menguasai secara menyeluruh aspek filosofi sampai dengan aspek teknis pengelolaan perbendaharaan.

2. Tingkat Partisipasi Pelaporan Data Capaian Output Satker,
DIPA merupakan dokumen pelaksanaan anggaran Satker yang di dalamnya memuat informasi kinerja yang hendak dicapai Satker dalam satu tahun anggaran. Informasi kinerja tersebut di antaranya berupa target Rincian Output (RO) yang mencantumkan target kuantitatif dari produk akhir berupa barang/jasa yang akan dihasilkan dari berbagai aktivitas belanja Satker. Untuk mendukung peran BUN dalam mengawal ketercapaian RO dan outcome belanja pemerintah, diperlukan mekanisme pelaporan dan pengumpulan data capaian output Satker. Proses pelaporan tersebut dilakukan melalui aplikasi OMSPAN yang dilaksanakan secara bulanan. satker K/L yang mengimplementasikan SAKTI Web Full Modul pada tahun 2020.
3. Tingkat kualitas pengelolaan BMN, Kualitas pengelolaan BMN dan Pengadaan di tahun 2021 berfokus Rencana Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Penghapusan, Penertiban administrasi rumah negara dan digitalisasi pengelolaan BMN. IKU ini diukur melalui beberapa komponen yakni persentase kesesuaian pelaksanaan RP4 (Rencana Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Penghapusan), Indeks ketepatan waktu penyampaian RP4 BMN, Persentase penyelesaian penertiban rumah negara, Indeks Kelengkapan Data Rumah Negara pada Profil Master Aset, Persentase Digitalisasi Pengelolaan BMN, Persentase Rekomendasi Optimalisasi Aset Terindikasi Idle Kementerian Keuangan yang Ditindaklanjuti, dan Indeks Kepatuhan Pengisian RUP.
4. Persentase penyelesaian implementasi Rencana Sistem Manajemen Keamanan Informasi, Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) adalah sistem manajemen yang meliputi kebijakan, organisasi, perencanaan, penanggung jawab, proses, dan sumber daya yang mengacu pada pendekatan risiko bisnis untuk menetapkan, mengimplementasikan, mengoperasikan, memantau, mengevaluasi, mengelola, dan meningkatkan keamanan informasi.

Selanjutnya dalam rangka tetap memonitor perencanaan strategis sebagaimana telah tertuang dalam Rencana Strategis KPPN Painan tahun 2020-2024, setiap IKU Kemenkeu *Three* dilaporkan capaiannya setiap triwulan secara berjenjang dan beberapa IKU *Cascading* diturunkan ke level Kemenkeu *Four* dan *Five* termasuk IKU yang menjadi Rencana Strategis KPPN Painan Tahun 2020-2024.

BAB III

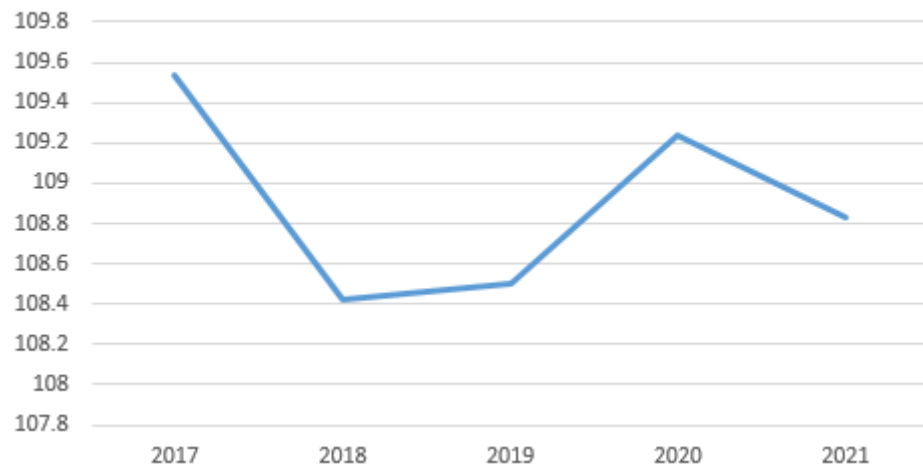
AKUNTABILITAS KINERJA

- A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI**
- B. REALISASI ANGGARAN**
- C. KINERJA LAINNYA**

**A. CAPAIAN
KINERJA
ORGANISASI**

Pengukuran capaian kinerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Painan tahun 2021 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) pada setiap perspektif. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data bahwa capaian **Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Painan adalah sebesar 108,83.**

NKO KPPN Painan 2017 s.d 2021



**1. Sasaran
Strategis 1:**

**Pengelolaan
perbendaharaan
yang
akuntabel**

Pengelolaan perbendaharaan yang akuntabel artinya KPPN mempunyai tugas untuk mengelola pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang dilaksanakan secara terbuka sehingga semua pihak memperoleh informasi secara lengkap dan akurat serta dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh stakeholder.

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, KPPN Painan mengidentifikasi 1 (satu) Indikator Kinerja Utama (IKU), yang pencapaiannya ditabulasikan dalam Tabel

TABEL

Capaian IKU pada
Sasaran Strategis
*Pengelolaan
Perbendaharaan
Negara yang
akuntabel*

SS 1: Pengelola perbendaharaan yang akuntabel

Kode	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Nilai
1a-N	Nilai kualitas LK Kuasa BUN KPPN	94	99,44	105,78

**1a-
N** Nilai kualitas
LK Kuasa
BUN KPPN

Berdasarkan PMK No 171/PMK.05/2007 sebagaimana terakhir diubah dengan PMK-262/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Pemerintah Pusat, KPPN selaku UAKBUN-Daerah melakukan penyusunan Laporan Keuangan Kuasa BUN KPPN berupa Laporan Arus Kas, Neraca KUN, Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca SAU di wilayah kerjanya. Laporan Keuangan Kuasa BUN KPPN tersebut secara periodik (bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan) disampaikan kepada Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan.

Berdasarkan Surat Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Nomor S-1359/PB.6/2016 hal Kriteria Penilaian LK UAKBUN D KPPN oleh Kanwil Ditjen PBN, Kanwil Ditjen Perbendaharaan memberikan penilaian terhadap Kualitas LK Kuasa BUN dimaksud.

Indikator Kinerja Utama (IKU) **Nilai kualitas LK Kuasa BUN KPPN** merupakan IKU yang ditujukan untuk mewujudkan peningkatan kualitas penyusunan LK Kuasa BUN KPPN. Selain itu juga untuk memastikan Pengelolaan Keuangan Negara yang Profesional, transparan dan akuntabel. KPPN harus memiliki kemampuan dan kapabilitas yang memadai untuk pelaksanaan tugas tersebut agar dilaksanakan secara terbuka sehingga semua pihak memperoleh informasi secara lengkap dan akurat serta dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh stakeholder.

Selanjutnya nilai realisasi IKU tersebut diperoleh dengan formula sebagai berikut:

Hasil penilaian kualitas LK Kuasa BUN tingkat KPPN yang dilakukan oleh masing-masing Kanwil Ditjen Perbendaharaan

Target tahun 2021

Target IKU tersebut untuk tahun 2021 adalah nilai 94. Target IKU tersebut tidak mengalami perubahan dibandingkan dengan tahun 2020.

Perhitungan polarisasi data IKU tersebut menggunakan *maximize* (semakin tinggi realisasi terhadap target, semakin baik capaian kinerjanya), periode pelaporan (*trajectory*) tahunan, dan jenis konsolidasi periode menggunakan *take last known value* (realisasi yang digunakan adalah angka periode terakhir).

Realisasi tahun 2021

Nilai LK Kuasa BUN KPPN yang berkualitas dihitung berdasarkan hasil penilaian LK Kuasa BUN KPPN tahun 2020. Adapun capaian yang diperoleh adalah dengan nilai 99,44.

Capaian IKU Nilai kualitas LK Kuasa BUN KPPN Tahun 2021

Perbandingan realisasi dan target tahun 2021

Target/Realisasi	Trw I	Trw II	Smt I	Trw III	s. d. Trw III	Trw IV	Tahunan	Pol /KP
Target KK	-	-	-	-	-	-	94	Maximize/ TLK
Realisasi	-	-	-	-	-	-	99,44	
Nilai Capaian	-	-	-	-	-	-	105,79	

Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.4, nilai realisasi tahunan IKU sebesar 99,44 tersebut melampaui target IKU sebesar 94 dengan nilai capaian 105,79 yang ditetapkan dalam Kontrak Kinerja Kemenkeu-three Kepala KPPN Painan tahun 2021.

Perbandingan Realisasi IKU tahun 2021 dan tahun 2020

Realisasi IKU pada tahun 2021 adalah 99,44 sedangkan pada tahun 2020 realisasi IKU mencapai 99,30. Hal ini menunjukkan terjadinya peningkatan realisasi IKU dari tahun 2020 ke tahun 2021 sebesar 0,14%.

Perbandingan Capaian IKU Nilai kualitas LK Kuasa BUN KPPN Tahun 2020 dan 2021

Tahun	Realisasi							Target Tahunan
	Trw I	Trw II	Smt I	Trw III	S.d. Trw III	Trw IV	Tahun	
2021	-	-	-	-	-	-	99,44	94
2020	-	-	-	-	-	-	99,30	94
Selisih	-	-	-	-	-	-	0.14%	0

Isu, permasalahan, tindakan, dan action plan

Laporan Keuangan UAKBUN Daerah tingkat KPPN Painan Tahun 2020 yang berkualitas ditentukan dari kualitas rekonsiliasi eksternal yang dilakukan setiap bulan antara satker dengan KPPN. KPPN mengupayakan hasil rekonsiliasi di setiap periode tidak terdapat Transaksi Dalam Konfirmasi (TDK) terutama TDK Belanja, selain itu juga mengupayakan tidak ada temuan validasi pada aplikasi e-Rekon&LK. Kualitas LK UAKBUN Daerah Tingkat KPPN akan mempengaruhi hasil penilaian LK UAKBUN Daeran Tingkat KPPN Painan Tahun 2020.

Untuk mengurangi risiko adanya temuan saat dilakukan rekonsiliasi yang akan mempengaruhi kualitas laporan keuangan maka KPPN telah melaksanakan mitigasi dengan cara :

1. mengintensifkan koordinasi dengan satker melalui sarana WAG
2. melakukan monitoring pada aplikasi e-rekon&LK secara periodik
3. melakukan pembinaan langsung ke beberapa satker dalam rangka edukasi penyusunan laporan keuangan terhadap satker-satker yang bermasalah.

Untuk meningkatkan kualitas LKUAKBUN 2021 maka KPPN Painan telah memiliki beberapa rencana Aksi:

1. Lebih intensif untuk melakukan monitoring pada aplikasi e-Rekon&LK.
2. Lebih intensif untuk mengajak satker agar melakukan rekonsiliasi di awal periode rekon sehingga jika terjadi perbedaan masih ada waktu untuk menyelesaikan.
3. Melakukan pembinaan ke satker yang masih memiliki permasalahan.

Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien

Reformasi birokrasi Kementerian Keuangan, termasuk Ditjen Perbendaharaan telah dimulai sejak tahun 2007. Untuk menguji keberhasilan reformasi tersebut, salah satunya diukur dengan tingkat kepuasan mitra kerja KPPN terhadap layanan yang diberikan oleh KPPN.

Kepuasan pengguna layanan yang tinggi didefinisikan sebagai persepsi satuan kerja terhadap produk atau layanan yang telah memenuhi atau melebihi dari harapan. Tingkat kepuasan pelanggan yang tinggi akan meningkatkan citra KPPN sebagai pengelola perbendaharaan negara di daerah.

2a-N Indeks kepuasan satker terhadap layanan KPPN

SS 2: Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien

Kode	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Nilai
2a-N	Indeks kepuasan satker terhadap layanan KPPN	4,64 (skala 5)	4,94 (skala 5)	106,47

Uraian mengenai IKU tersebut adalah sebagaimana berikut:

Indikator Kinerja Utama (IKU) **Indeks kepuasan satker terhadap layanan KPPN** merupakan salah satu IKU *Kemenkeu-three* Kepala KPPN Painan tahun 2020. IKU ini diukur mengacu kepada tingkat kepuasan satker terhadap seluruh produk layanan perbendaharaan dari KPPN yang mereka gunakan dan manfaatkan, meliputi proses Pencairan Dana, layanan bimbingan dan konsultasi, konfirmasi surat setoran, penyelesaian rekonsiliasi realisasi anggaran, dan penyediaan sarana prasarana.

Indeks kepuasan satker diukur melalui survei oleh masing-masing KPPN dengan metode sampling kepada responden terpilih dari seluruh mitra kerja yang dilayani oleh masing-masing unit eselon IV KPPN.

Target tahun 2021

Target IKU tersebut untuk tahun 2021 adalah sebesar 4,64 dengan periode pelaporan tahunan. Target tersebut meningkat dari tahun 2020 sebesar 4,55. Perhitungan polarisasi data menggunakan *maximize* (semakin tinggi realisasi terhadap target maka semakin baik capaian kinerjanya) dan jenis konsolidasi

periode menggunakan *take last known value* (realisasi yang digunakan adalah angka periode terakhir).

Realisasi tahun 2021

Hasil survey menunjukkan bahwa KPPN Painan memiliki capaian indeks kepuasan pada tahun 2021 yakni sebesar 4.94. Adapun rincian capaian indeks kepuasan Satker terhadap layanan KPPN adalah sebagaimana ditunjukkan pada Tabel

Rincian Capaian Indeks Kepuasan Satker terhadap layanan KPPN

No	Aspek Layanan	Capaian 2020
1	Pencairan Dana	4,96
2	layanan bimbingan dan konsultasi	4,91
3	konfirmasi surat setoran	4,95
4	penyelesaian rekonsiliasi realisasi anggaran	5
5	Sarana dan Prasarana	4,93
Rata Rata		4,94

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, melalui survei kepuasan pengguna layanan tersebut dapat diketahui bahwa target IKU Indeks kepuasan satker terhadap layanan KPPN tahun 2021 dapat dipenuhi dengan capaian ditunjukkan pada Tabel 3.12.

Capaian IKU Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Tahun 2021

Perbandingan realisasi dan target tahun 2021

Target/ Realisasi	Trw I	Trw II	Smt I	Trw III	s.d. Trw III	Trw IV	Tahunan	Pol /KP
Target	-	-	-	-	-	-	4,64	<i>Maximize/ Take last known value</i>
Realisasi	-	-	-	-	-	-	4,94	
Nilai capaian	-	-	-	-	-	-	106,47	

Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.12, nilai realisasi tahunan IKU Indeks kepuasan satker terhadap layanan KPPN tahun 2021 yakni tercapai sebesar 4,94 dari target sebesar 4,64 sehingga menghasilkan angka capaian sebesar 106,47.

Perbandingan Realisasi IKU tahun 2021 dan tahun 2020

Terjadi penurunan capaian IKU Tahun 2021 dibandingkan tahun 2020 sebesar 0,3%. Pada tahun 2021, realisasi mencapai 4,94. Sedangkan pada tahun 2020, realisasi sebesar 4,97.

TABEL 3.13

Perbandingan Capaian IKU *Indeks Kepuasan Pengguna Layanan* Tahun 2021 dan Tahun 2020

Tahun	Realisasi							Target Tahunan
	Trw I	Trw II	Smt I	Trw III	S.d. Trw III	Trw IV	Tahun	
2021	-	4,94	4,94	-	4,94	-	4,94	4,64
2020	-	4,97	4,97	-	4,97	-	4,97	4,55
Selisi h	-	0,3%	0,3%	-	-0,3%	-	-0,3%	0,09

Isu, permasalahan, tindakan, dan action plan

Upaya peningkatan layanan yang dihasilkan KPPN Painan sudah menjadi komitmen bersama seluruh pegawai KPPN untuk meningkatkan citra baik KPPN Painan sebagai ujung tombak pengelola APBN di daerah. Upaya tersebut diwujudkan melalui peningkatan kualitas layanan seperti perbaikan sarana dan prasarana layanan, peningkatan koordinasi dengan satker mitra kerja, penggunaan sarana informasi terkini untuk percepatan tersampainya informasi layanan KPPN misal melalui penggunaan grup whatsapp. Pengalihan web KPPN menjadi terintegrasi dengan web Kantor Pusat dan Kanwil DJPb juga membantu dalam upaya peningkatan kualitas layanan. Hal ini karena penggunaan *microweb* tersebut merupakan bentuk standarisasi web KPPN dengan fitur, menu, dan *updating* informasi yang lebih lengkap. Hasil survey diharapkan mampu memberikan gambaran mendetail tentang layanan apa yang seharusnya menjadi bahan perbaikan bagi KPPN.

Beberapa hal yang telah dilaksanakan dalam rangka menindaklanjuti hasil identifikasi terhadap kekurangan layanan di KPPN Painan diantaranya :

1. Memastikan sarana dan prasarana di ruang front office tetap dalam kondisi optimal
2. Melaksanakan Gugus Kendali Mutu untuk memastikan layanan KPPN sesuai dengan KEP-650/PB/2018
3. Pelatihan *service excellent* yang kontinyu dengan mengedepankan kepuasan satker.
4. Menindaklanjuti saran/masukan yang disampaikan responden dalam rangka perbaikan/peningkatan kualitas pelayanan
5. Melakukan perbaikan atas unsur layanan yang masih perlu dilakukan perbaikan serta melakukan upaya peningkatan hasil survei menjadi baik.

Rekomendasi Rencana Aksi (*action plan*) yang akan dilakukan pada tahun 2022 untuk meningkatkan pencapaian mendatang IKU tersebut, yaitu:

1. Melakukan pembinaan kepada Satker untuk memberikan supervise terkait kinerja layanan dalam rangka persiapan survei.
2. Membuat sarana komunikasi yang mudah dalam memberikan layanan (grup diskusi pada medsos, layanan melalui email).
3. Meningkatkan kualitas personal petugas layanan.
4. Memaksimalkan ruang yang ada untuk memenuhi fasilitas layanan.
5. Melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja pelayanan per semester sebagai perbaikan kualitas publik/inovasi secara berkelanjutan
6. Petugas pelayanan di KPPN diberikan tanggung jawab dalam memberikan bimbingan dan sosialisasi secara berkala agar fokus kepada satker yang belum memahami aplikasi

3a

Perumusan regulasi dan otorisasi yang kredibel

Regulasi adalah peraturan yang disusun sebagai dasar dan arah dalam pengelolaan perbendaharaan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Otorisasi adalah segala ketetapan yang dibuat oleh Kanwil DJPb dalam rangka pengelolaan perbendaharaan. Optimal adalah sesuai dengan kebutuhan, implementatif, dan tidak saling bertentangan. Perumusan regulasi dan otorisasi yang optimal mengandung makna bahwa perumusan peraturan yang menjadi dasar dan arah dalam pengelolaan perbendaharaan serta segala ketetapan yang dihasilkan untuk mencapai tujuan sudah sesuai untuk menghasilkan output/outcome yang diharapkan.

SS 3: Perumusan regulasi dan otorisasi yang optimal

Kode	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Nilai
3a-N	Persentase penyelesaian SP2D secara tepat waktu	99,40%	99,67%	100,43

Uraian mengenai IKU tersebut adalah sebagaimana berikut:

SPM Satker yang diproses menjadi SP2D merupakan mekanisme pengujian oleh KPPN yang bersifat formal dan substantif terhadap Surat Perintah Membayar (SPM) yang diajukan oleh Satuan Kerja untuk diterbitkan menjadi SP2D. Penyelesaian SP2D dinyatakan tepat waktu bila memenuhi janji layanan sebagaimana surat Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor S-7283/PB.1/2018. SPM satker yang diproses menjadi SP2D secara tepat waktu diukur berdasarkan jumlah penyelesaian SPM Satker yang diproses oleh Front Office Seksi Pencairan Dana dan diteruskan ke Middle Office Seksi Pencairan Dana untuk selanjutnya diterbitkan SP2D atau approval oleh Seksi Bank.

SPM yang diproses menjadi SP2D diselesaikan dalam waktu 1 (satu) jam, dengan prasyarat kondisi sebagai berikut:

- a. Jenis SPM yang masuk adalah UP/GUP/TUP/PTUP dan LS Non Gaji

- b. ADK SPM masuk ke SPAN pada pukul 08.00 sampai dengan pukul 12.00 waktu setempat.
- c. Tidak di saat load pekerjaan KPPN sedang tinggi, sebagai contoh pada akhir tahun anggaran, pada saat pengajuan gaji 13, dan pada saat pengajuan pembayaran THR.
- d. Tidak termasuk SPM dengan penerima >100
- e. Data supplier, KOntrak, dan/atau RPD sudah masuk dalam SPM
- f. Tidak dalam keadaan force majeure.

Target tahun 2021

Target IKU tersebut untuk tahun 2021 adalah sebesar 99,40% dengan periode pelaporan triwulanan. Target tersebut tidak mengalami perubahan dengan target 2020. Perhitungan polarisasi data menggunakan *maximize* (semakin tinggi realisasi terhadap target maka semakin baik capaian kerjanya) dan jenis konsolidasi periode menggunakan *average* (realisasi yang digunakan adalah rata-rata realisasi pada setiap periode pelaporan).

Realisasi tahun 2021

Realisasi IKU ini pada tahun 2021 adalah 99,67%. Persentase tersebut diperoleh dari rata-rata persentase penyelesaian SP2D secara tepat waktu setiap triwulannya. Capaian realisasi pada triwulan I, II, III, dan IV yaitu 100%, 100%, 100% dan 99,67% dengan perbandingan sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.17.

Capaian IKU persentase penyelesaian SP2D secara tepat waktu

Perbandingan realisasi dan target tahun 2020

Target/Realisasi	Trw I	Trw II	Smt I	Trw III	s.d. Trw III	Trw IV	Tahunan	Pol /KP
Target	99,40 %	99,40 %	99,40 %	99,40 %	99,40 %	99,40 %	99,40%	Max/Average
Realisasi	100 %	100%	100%	100%	100%	99,67 %	99,83%	
Nilai Capaian	100,60	100,60	100,60	100,60	100,60	100,27	100,43	

Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.17, nilai realisasi tahunan IKU sebesar 99,67% melampaui target IKU sebesar 99,40% dengan nilai capaian 100,43 yang ditetapkan dalam Kontrak Kinerja Kemenkeu-three Kepala KPPN Painan tahun 2021.

Perbandingan Realisasi IKU tahun 2021 dan tahun 2020 Terjadi penurunan capaian IKU Tahun 2021 dibandingkan tahun 2020 sebesar 0,24%. Pada tahun 2020, realisasi mencapai 99,91. Sedangkan pada tahun 2021, realisasi sebesar 99,67.

Perbandingan Capaian IKU persentase penyelesaian SP2D secara tepat waktu

Tahun	Realisasi							Target Tahunan
	Trw I	Trw II	Smt I	Trw III	S.d. Trw III	Trw IV	Tahun	
2021	100%	100%	100%	100%	100%	99,67%	99,83%	99,40%
2020	N/A	99,82%	99,82%	99,91%	99,87%	100%	99,91%	99,40%
Selisih	-	0,28%	0,28%	0,09%	0,23%	0,23%	0,19%	-

Isu, permasalahan, tindakan, dan action plan

Perubahan mekanisme pengajuan SPM oleh Satker yang semula secara tatap muka saat ini dilakukan melalui aplikasi e-SPM. Perubahan tersebut menimbulkan beberapa penyesuaian baik dari segi Satker maupun internal KPPN. Banyak waktu yang digunakan oleh Seksi PDMS untuk mengatasi permasalahan yang timbul maupun menjawab konsultasi Satker via telepon maupun WhatsApp, sehingga penyelesaian SP2D menjadi terhambat. Adanya pegawai yang melaksanakan WFH secara bergantian berdampak pada ritme kerja di kantor, mengingat sebagian besar pekerjaan Seksi PDMS khususnya penerbitan SP2D harus dilakukan di kantor.

Tindakan yang telah dilaksanakan selama tahun 2021 adalah :

1. Meningkatkan koordinasi internal (Seksi PDMS dan Seksi Bank) untuk mencapai target penyelesaian SP2D dibawah 1 jam.
2. Meningkatkan koordinasi dan pendampingan kepada satker dalam hal updating data supplier
3. Melakukan konfirmasi kebenaran SPM kepada PPSPM serta mendokumentasikannya

Adapun yang menjadi rekomendasi rencana aksi pada periode selanjutnya adalah :

1. Melakukan konsultasi dan pendampingan kepada satker
2. Melakukan monitoring dan evaluasi secara periodic

Komunikasi, edukasi, dan standardisasi yang berkesinambungan

Komunikasi dan edukasi merupakan upaya untuk meningkatkan pemahaman stakeholders atas peraturan dan kebijakan di bidang perbendaharaan untuk memperkuat implementasi peraturan dan kebijakan dalam rangka mendorong tercapainya tujuan organisasi. Dalam rangka memenuhi tuntutan perkembangan tata kelola keuangan yang bersifat dinamis, dibutuhkan strategi komunikasi dan edukasi yang kontinu, tidak tambal sulam serta berorientasi pada usaha membuat

satker mampu menguasai secara menyeluruh aspek filosofi sampai dengan aspek teknis pengelolaan perbendaharaan.

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, KPPN Painan mengidentifikasi 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut:

SS 4 Komunikasi dan edukasi yang berkesinambungan

Kode	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Nilai
4a-N	Indeks Efektifitas Edukasi dan Komunikasi	87,5	89,39	102,75
4b-N	Persentase tingkat implementasi standardisasi kompetensi pejabat perbendaharaan	30%	100%	120
4c-CP	Persentase tingkat implementasi Aplikasi SAKTI	100%	100%	100

4a-
N
Indeks Efektifitas Edukasi dan Komunikasi

Uraian mengenai IKU tersebut adalah sebagaimana berikut:

Tingkat pemahaman stakeholders merupakan tingkat daya tangkap peserta (stakeholders) terhadap segala materi yang diberikan pada pelatihan teknis (bimtek atau yang dipersamakan dengan itu). Tolok ukur hasil pelatihan teknis didasarkan pada peningkatan pemahaman peserta atas materi yang diberikan dalam pelatihan untuk satu periode. Ruang lingkup pelatihan teknis meliputi semua kegiatan pembinaan yang diselenggarakan oleh KPPN.

Untuk bimtek diukur dengan post test sedangkan untuk sosialisasi diukur dengan kuesioner. Jika pada satu periode pelaporan (satu triwulan) terdapat kegiatan bimtek dan kegiatan sosialisasi, maka total nilai efektifitas edukasi dan komunikasi pada triwulan tersebut dibobot sebagai berikut: hasil pos test 60% sedangkan hasil kuesioner 40%.

Target tahun 2021

Target IKU tersebut untuk 2021 adalah 87,5% Perhitungan polarisasi data IKU tersebut menggunakan *maximize* (semakin tinggi realisasi terhadap target, semakin baik capaian kinerjanya), periode pelaporan (*trajectory*) semesteran, dan jenis konsolidasi periode menggunakan *average* (realisasi yang digunakan adalah rata-rata realisasi pada setiap periode pelaporan).

Realisasi tahun 2021

Realisasi IKU Indeks Efektifitas Edukasi dan Komunikasi pada tahun 2021 adalah indeks 89,39. Capaian tersebut diperoleh dari rata-rata Indeks Efektifitas Edukasi

dan Komunikasi setiap semesternya. Realisasi semester I dan semester II secara berturut-turut adalah 91,18 dan 87,59 dengan perbandingan sebagaimana ditunjukkan pada tabel 3.20.

Capaian IKU Indeks Efektifitas Edukasi dan Komunikas Tahun 2021

Perbandingan realisasi dan target tahun 2021

Target/Realisasi	Trw I	Trw II	Smt I	Trw III	S. d. Trw III	Trw IV	Tahunan	Pol /KP
Target KK	-	87	87	-	87	87	87	Maximize/ Average
Realisasi	-	91,18	91,18	-	91,18	87,59	89,39	
Nilai Capaian	-	104,20	104,20	-	104,20	100,10	102,75	

Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.8, dapat disimpulkan bahwa realisasi IKU di atas mencapai 89,39 dengan nilai capaian 102,75 yang ditetapkan dalam Kontrak Kinerja Kemenkeu-three Kepala KPPN Painan tahun 2021.

Perbandingan Realisasi IKU tahun 2021 dan tahun 2020

Realisasi IKU pada tahun 2021 adalah 89,39 sedangkan pada tahun 2020 realisasi IKU mencapai 92,69 Hal ini menunjukkan terjadinya penurunan realisasi IKU dari tahun 2020 ke tahun 2021 sebesar 3,3%. Perbandingan antar semester capaian IKU tersebut untuk tahun 2020 dan 2021 dapat ditunjukkan pada tabel

Perbandingan Capaian IKU Indeks Efektifitas Edukasi dan Komunikasi

Tahun	Realisasi							Target Tahunan
	Trw I	Trw II	Smt I	Trw III	S.d. Trw III	Trw IV	Tahun	
2021	-	91,18	91,18	-	91,18	87,59	89,39	87
2020	-	92,29	92,29	-	92,29	93,08	92,69	87
Selisih	-	-1,11	-1,11	-	-1,11	-5,49	-3,3	-

Isu, permasalahan, tindakan, dan action plan

Permasalahan utama dalam ketercapaian IKU Indeks Efektifitas Edukasi dan Komunikasi pada tahun 2021 adalah 2. Adanya pembatasan layanan KPPN akibat bencana non alam covid-19 sehingga kegiatan sosialisasi dan bimtek secara langsung (tatap muka) masih dibatasi.

Tindakan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung pencapaian IKU tersebut, yaitu:

1. Memberitahukan kepada satker tentang pelaksanaan layanan KPPN secara daring termasuk kegiatan komunikasi dan edukasi

2. Melaksanakan kegiatan edukasi melalui sarana daring seperti Aplikasi Whatsapp dan ZOOM
3. Melaksanakan kegiatan edukasi secara hybrid (sebagian hadir secara fisik dan sebagian mengikuti secara daring)
4. Memberikan respon yang cepat dan tanggap kepada satker apabila mengalami kendala dan hambatan baik aplikasi maupun proses bisnis
5. Menyelenggarakan pelatihan one and one meeting melalui aplikasi zoom atau media lain yang menunjang pelaksanaan dan kelancaran tugas.

Rekomendasi Rencana Aksi (*action plan*) yang akan dilakukan pada tahun 2022 untuk meningkatkan pencapaian mendatang IKU tersebut, yaitu:

1. Kegiatan konsultasi, pendampingan, dan edukasi secara daring dan hybrid
2. Klinik Marketplace
3. Menunjuk PIC di setiap seksi sehingga setiap permasalahan atau pertanyaan dari satker dapat dijawab dengan tepat, cepat dan benar
4. Memberikan edukasi kepada pegawai KPPN etika dalam berkirim pesan via aplikasi chat dan menerima telepon dari satker sehingga pelayanan yang santun tetap terjaga.

**4b-
N** **Persentase
tingkat
implementasi
standarisasi
kompetensi
pejabat
perbendaharaan**

Komunikasi dan edukasi merupakan upaya untuk meningkatkan pemahaman stakeholders atas peraturan dan kebijakan di bidang perbendaharaan untuk memperkuat implementasi peraturan dan kebijakan dalam rangka mendorong tercapainya tujuan organisasi. Standardisasi bertujuan untuk mewujudkan profesionalisme Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola perbendaharaan melalui peningkatan kompetensi pengelola perbendaharaan berdasarkan kualifikasi kompetensi yang dipersyaratkan dalam rangka mendukung terwujudnya pengelolaan APBN yang semakin berkualitas di seluruh Kementerian/Lembaga sehingga dapat menghasilkan output dan outcome yang maksimal sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Standardisasi pengelola perbendaharaan dimaksud dilaksanakan melalui program pengembangan kapasitas, uji kompetensi, sertifikasi kompetensi, dan pengembangan profesi jabatan fungsional di bidang perbendaharaan.

Dalam rangka memenuhi tuntutan perkembangan tata kelola keuangan yang bersifat dinamis, dibutuhkan strategi komunikasi, edukasi, dan standardisasi yang kontinu, tidak tambal sulam serta berorientasi pada usaha membuat satker mampu menguasai secara menyeluruh aspek filosofi sampai dengan aspek teknis pengelolaan perbendaharaan

Target tahun 2021 IKU ini merupakan IKU baru yang ada di tahun 2020 dengan target indeks 100%. Perhitungan polarisasi data IKU tersebut menggunakan *maximize* (semakin tinggi realisasi terhadap target, semakin baik capaian kinerjanya), periode pelaporan (*trajectory*) semesteran, dan jenis konsolidasi periode menggunakan *take last known value* (realisasi yang digunakan adalah angka periode terakhir).

Realisasi tahun 2021 Realisasi IKU ini pada tahun 2021 adalah 100%. Persentase tersebut diperoleh dari jumlah PPK/PPSPM yang telah mengikuti penilaian kompetensi. Capaian IKU pada semester I dan II adalah 74% dan 100%.

Perbandingan realisasi dan target tahun 2021 Capaian IKU Persentase tingkat implementasi standardisasi kompetensi pejabat perbendaharaan Tahun 2021

Target/Realisasi	Trw I	Trw II	Smt I	Trw III	s. d. Trw III	Trw IV	Tahunan	Pol /KP
Target KK	-	15%	15%	-	15%	30%	30%	Maximize/ Average
Realisasi	-	74%	74%	-	74%	100%	100%	
Nilai Capaian	-	120	120	-	120	120	120	

Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.13, nilai realisasi tahunan IKU sebesar 100% melampaui target IKU sebesar 30% dengan nilai capaian 120 yang ditetapkan dalam Kontrak Kinerja Kemenkeu-*three* Kepala KPPN Painan tahun 2021.

Perbandingan Realisasi IKU tahun 2021 dan tahun 2020 Tidak terjadi perubahan capaian pada Tahun 2021 karena IKU ini merupakan IKU baru.

Capaian IKU persentase tingkat implementasi standardisasi kompetensi pejabat perbendaharaan tahun 2021

Tahun	Realisasi							Target Tahunan
	Trw I	Trw II	Smt I	Trw III	S.d. Trw III	Trw IV	Tahun	
2021	-	74%	74%	-	74%	100%	100%	30%
2020	-	-	-	-	-	-	-	-
Selisi h	-	-	-	-	-	-	-	-

Isu, permasalahan Isu Utama terkait persentase tingkat implementasi standardisasi kompetensi pejabat perbendaharaan adalah KPPN tidak dapat menyelenggarakan kegiatan

, *tindakan, dan action plan*

kompetensi sehingga pelaksanaan kompetensi menunggu jadwal dari Direktorat Sistem Perbendaharaan DJPb dan Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan.

Tindakan yang telah dilaksanakan adalah :

1. Mendorong PPK dan PPSPM yang belum mengikuti sertifikasi dan kompetensi untuk mengikuti sertifikasi dan kompetensi yang diadakan oleh Direktorat Sistem Perbendaharaan DJPb dan Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan.
2. Membimbing PPK dan PPSPM dalam memenuhi syarat dan dokumen pendaftaran sertifikasi
3. Melakukan verifikasi, meneruskan kepada unit penyelenggara kompetensi pejabat perbendaharaan dan menginformasikan kepada admin satker apabila terjadi kesalahan penginputan melalui aplikasi SIMASPATEN
4. Koordinasi dengan Kantor Pusat c.q Direktorat Sistem Perbendaharaan apabila terjadi permasalahan aplikasi SIMASPATEN dan SIMSERBA serta juknis dilapangan.

Rencana aksi yang akan dilaksanakan adalah :

1. Melaksanakan bimbingan teknis pendaftaran sertifikasi
2. Memberikan pelatihan maupun *tour of duty* standar kompetensi bagi pejabat perbendaharaan satker agar dapat berfungsi optimal
3. Menyelenggarakan workshop standar kompetensi pejabat perbendaharaan untuk menampung masukan dari para pejabat perbendaharaan satker tentang kompetensi pejabat

4c-CP

Persentase tingkat implementasi Aplikasi SAKTI

IKU ini mengukur tingkat pemenuhan implementasi Aplikasi SAKTI pada tahun 2021 oleh satuan kerja-satuan kerja lingkup Kementerian/Lembaga, yang ruang lingkupnya ditetapkan melalui peraturan/keputusan Menteri Keuangan, dengan menggunakan sumber daya manusia, bisnis proses, infrastruktur, dan teknologi SAKTI. Pengukuran tingkat pemenuhan implementasi SAKTI tahun 2021, dilakukan melalui kriteria sebagai berikut :

- a. Pencapaian atas pelaksanaan porsi tahapan kegiatan yang telah ditetapkan untuk periode semester I dan II tahun 2021 secara tepat waktu.
- b. Pencapaian atas jumlah satker yang mengimplementasikan SAKTI tahun 2021.

Target tahun 2021

Target IKU tersebut untuk tahun 2021 adalah sebesar 100%. Target IKU tersebut tidak mengalami perubahan dibandingkan dengan tahun 2020. Periode pelaporan (*trajectory*) IKU tersebut adalah triwulanan, perhitungan polarisasi data menggunakan *maximize* (semakin tinggi realisasi terhadap target maka semakin baik capaian kerjanya), dan jenis konsolidasi periode menggunakan *take last known value* (realisasi yang digunakan adalah angka periode terakhir).

Realisasi tahun 2021

Realisasi IKU Persentase tingkat implementasi Aplikasi SAKTI adalah 100%. Realisasi pada triwulan I,II,III dan IV berturut-turut adalah 13%, 40%, 70% dan 100% dengan perbandingan sebagaimana ditunjukkan pada tabel 3.20.

Perbandingan realisasi dan target tahun 2021

Realisasi capaian IKU Persentase tingkat implementasi Aplikasi SAKTI pada tahun 2021

Target/Realisasi	Trw I	Trw II	Smt I	Trw III	s.d. Trw III	Trw IV	Tahunan	Pol /KP
Target	13 %	40%	40%	70%	70%	100%	100%	Max/TLK
Realisasi	13,5%	43%	43%	72%	72%	100%	100%	
Nilai Capaian	103,84	107,5	107,5	102,85	102,85	100	100	

Sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 3.20, dapat disimpulkan bahwa realisasi IKU di atas mencapai 100% dengan nilai capaian 100 yang ditetapkan dalam Kontrak Kinerja Kemenkeu-*three* Kepala KPPN Painan tahun 2021.

Perbandingan Realisasi IKU tahun 2021 dan 2020

Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2021 dengan tahun 2020 ditunjukkan pada Tabel 3.28. Realisasi IKU pada tahun 2021 dan tahun 2020 adalah 100%. Perbandingan antar triwulan capaian IKU tersebut untuk tahun 2021 dan 2020 dapat ditunjukkan pada Tabel 3.28.

Perbandingan Capaian IKU Persentase tingkat implementasi Aplikasi SAKTI

Tahun	Realisasi							Target Tahunan
	Trw I	Trw II	Smt I	Trw III	S.d. Trw III	Trw IV	Tahun	
2021	13,5 %	43%	43%	72%	72%	100%	100%	100%
2020	N/A	34%	34%	63%	63%	100%	100%	100%
Selisih	13,5	9	9	9	9	0	0	-

Isu, permasalahan, tindakan, dan action plan

Permasalahan utama dalam ketercapaian IKU Persentase tingkat implementasi Aplikasi SAKTI pada tahun 2021 adalah masih adanya pandemi covid-19 dan penerapan WFH bagi sebagian pegawai KPPN dan satker, sehingga kegiatan implementasi SAKTI sebagian besar dilaksanakan secara daring melalui Zoom, WhatsApp, atau sarana lainnya.

Beberapa tindakan yang telah dilaksanakan adalah:

1. Memfasilitasi Change Readiness Survey Satker Non Piloting
2. Melaksanakan EUT SAKTI Satker Non Piloting
3. Melakukan Publikasi tahap 2 SAKTI
4. Melakukan Pemutakhiran Data Pengguna SAKTI Satker rollout
5. Melaksanakan Kegiatan Pendampingan Pembuatan SPM Gaji Induk Januari TA 2022

Rencana yang akan dilakukan kedepannya adalah:

1. Mengawal pelaksanaan implementasi SAKTI
2. Asistensi satker atas kendala teknis yang terjadi di lapangan
3. Koordinasi dengan kantor pusat SITP apabila terjadi permasalahan yang tidak bisa diselesaikan di KPPN

5. Sasaran Strategis 5: Pengelolaan kas yang optimal

Pengelolaan kas yang optimal artinya Direktorat Jenderal Perbendaharaan dapat memanfaatkan kas yang ada sesuai dengan kebutuhan, memanfaatkan idle cash dengan hasil yang maksimal, meminimalisir cost dengan mempertimbangkan biaya dan manfaat, dimana manfaat yang diperoleh lebih besar dibandingkan dengan biaya yang harus dikeluarkan.

Capaian IKU pada Sasaran Strategis Pengelolaan kas yang optimal

SS 5: Pengelolaan kas yang pruden dan optimal

Kode	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Nilai
5a-CP	Persentase akurasi perencanaan kas	82%	100%	120
5b-N	Indeks efektivitas pengelolaan pengeluaran kas	3,15	4	120

Uraian mengenai IKU tersebut adalah sebagaimana berikut:

5a-CP Persentase akurasi perencanaan kas

Perencanaan Kas (Renkas) KPPN dan Rencana Penarikan Dana (RPD) dan/atau perkiraan pendapatan bulanan, RPD harian, dan perkiraan pendapatan mingguan tingkat Satker serta pemutakhirannya disampaikan kepada Kepala

KPPN oleh KPA .

Perencanaan Kas KPPN dinyatakan akurat apabila realisasi deviasi Rencana Penarikan Dana satker dan Perkiraan Pencairan Dana Harian (PPDH) berada dalam batas kewajaran sebagaimana ditentukan dalam target IKU. Pemberian dispensasi RPD, baik nilai maupun waktu, tetap diperhitungkan dalam formulasi akurasi RPD satker.

PPDH (PPDH) adalah Perkiraan Pencairan Dana Harian, yang menjadi pagu pencairan tertinggi KPPN dalam satu hari.

Persentase perencanaan penarikan dana satker yang akurat adalah selisih antara akurasi maksimal (100%) dengan rata - rata tingkat deviasi seluruh satker pada periode tertentu.

Target tahun 2021

Target IKU tersebut untuk tahun 2021 adalah nilai 100%. Target IKU tersebut mengalami peningkatan sebesar 20% dibandingkan dengan tahun 2020 yang memiliki target 80%.

Perhitungan polarisasi data IKU tersebut menggunakan *maximize* (semakin tinggi realisasi terhadap target, semakin baik capaian kinerjanya), periode pelaporan (*trajectory*) triwulanan, dan jenis konsolidasi periode menggunakan *average* (realisasi yang digunakan adalah rata-rata realisasi pada setiap periode pelaporan).

Realisasi tahun 2021

Realisasi IKU ini pada tahun 2021 adalah 100%. Persentase tersebut diperoleh dari rata-rata persentase akurasi perencanaan kas KPPN setiap triwulannya . Setiap triwulannya IKU ini memiliki realisasi 100% dengan perbandingan sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.23.

Capaian IKU Persentase Akurasi Perencanaan Kas

Perbandingan realisasi dan target tahun 2021

Target/Realisasi	Trw I	Trw II	Smt I	Trw III	s. d. Trw III	Trw IV	Tahun	Pol /KP
Target	82 %	82 %	82 %	82 %	82 %	82 %	82 %	Maximize/ Average
Realisasi	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
Nilai Capaian	120	120	120	120	120	120	120	

Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.23, nilai realisasi tahunan IKU sebesar 100% tersebut melampaui target IKU sebesar 82% dengan nilai capaian 120 yang ditetapkan dalam Kontrak Kinerja Kemenkeu-*three* Kepala KPPN Painan tahun

2021. Selain itu, setiap realisasi triwulanan juga melampaui target *trajectory* triwulanan yang telah ditetapkan.

Perbandingan Realisasi IKU tahun 2021 dan tahun sebelumnya

Realisasi IKU pada tahun 2021 adalah 100%. sedangkan pada tahun 2020 realisasi IKU sebesar 99,42%. Hal ini menunjukkan terjadinya peningkatan realisasi IKU dari tahun 2020 ke tahun 2021 sebesar 0,58%. Perbandingan antar semester capaian IKU tersebut untuk tahun 2020 dan 2021 dapat ditunjukkan pada Tabel 3.24.

Perbandingan Capaian IKU Persentase LPJ Bendahara yang andal dan tepat waktu Tahun 2020 dan 2021

Tahun	Realisasi							Target Tahunan
	Trw I	Trw II	Smt I	Trw III	S.d. Trw III	Trw IV	Tahun	
2021	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	98%
2020	N/A	99,42 %	99,42 %	N/A	99,42 %	N/A	99,42 %	80%
Selisih	N/A	0,58	0,58	-	0,58	-	0,58	0,5%

Realisasi pada tahun 2020 dan 2021 telah melewati batas target dan terjadi peningkatan capaian IKU Tahun 2021 pada setiap triwulannya dibandingkan capaian IKU tahun 2020.

Isu, permasalahan, tindakan, dan action plan

Yang menjadi ISU utama adalah adanya perubahan terhadap kebijakan Rencana Penarikan Dana pada pelaksanaan anggaran tahun 2021 yaitu Satker menyusun rencana pencairan dana berdasarkan nilai pembayaran serta menyampaikannya ke KPPN:

- Rp5 miliar s.d. 500 miliar, 3 hari kerja sebelum pencairan;
- Di atas Rp500 miliar s.d. 1 triliun, 5 hari kerja sebelum pencairan;
- Di atas Rp1 triliun, 7 hari kerja sebelum pencairan.

Sehingga perlu untuk terus mensosialisasikan PMK No.197/PMK.05/2017 tentang Rencana Penarikan Dana, Rencana Penerimaan Dana, Dan Perencanaan Kas

Tindakan yang telah dilaksanakan selama tahun 2021 adalah:

- Secara berkala menyampaikan laporan ke Kanwil DJPb Sumbar terkait laporan akurasi rencana penarikan dana KPPN per periode
- Menerbitkan surat dispensasi realisasi anggaran tanpa RPD sesuai dengan surat Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor S-23/PB/2021 sebagai dasar hukum tertulis.

3. Dispensasi RPD diberikan dengan selektif serta hanya untuk kepentingan penting dan sangat mendesak seperti kegiatan penanggulangan penyebaran covid-19.
4. Meningkatkan akurasi perencanaan kas dengan cara mengajukan SPM dengan renkas ke KPPN 1 hari sebelum jatuh tempo RPD harian (mulai pukul 12.00 pada hari sebelumnya) untuk mengantisipasi jika ditemukan kesalahan pada SPM

Adapun rekomendasi rencana aksi untuk periode selanjutnya adalah :

1. Membuat surat teguran kepada Satker yang tidak menyampaikan RPD atau terdapat perbedaan antara RPD dengan realisasinya
2. Membuat surat penegasan terkait penyampaian RPD ke KPPN
3. Mensosialisasikan kepada satker untuk sebisa mungkin mengajukan RPD untuk SPM diatas Rp 500 Miliar kecuali untuk kepentingan penting dan sangat mendesak
4. KPPN dan Kanwil berperan aktif dengan melakukan sosialisasi dan pembinaan pada satker dengan memberikan pemahaman akan pentingnya perencanaan kas yang akurat sehingga penyerapan anggaran menjadi lebih baik
5. Memberikan sanksi penundaan penerbitan SP2D bagi pengajuan SPM Satker yang melebihi perencanaan kas yang dibuat oleh satker

Indeks
efektivitas
pengelolaan
pengeluaran
kas

Efektivitas pengeluaran kas KPPN diukur berdasarkan penyaluran dana yang akurat dan kecepatan penyelesaian retur SP2D yang diterbitkan KPPN.

Penyaluran dana SP2D yang akurat adalah penyaluran dana SP2D kepada para penerima yang tidak di-retur oleh Bank Operasional.

Retur SP2D adalah penolakan/pengembalian pemindahbukuan dan/transfer pencairan dana APBN dari Bank penerima kepada Bank Operasional karena nama, alamat, nomor rekening, dan/atau nama bank yang dituju tidak sesuai dengan data rekening Bank penerima atau rekening penerima tidak aktif.

Kecepatan Penyelesaian Retur yang dilakukan oleh seluruh KPPN di Indonesia untuk meningkatkan pengelolaan pengeluaran APBN dalam rangka meningkatkan pelayanan dengan tepat waktu, tepat jumlah, serta tepat sasaran kepada satuan kerja/stakeholder .

*Target tahun
2021*

Target IKU tersebut untuk tahun 2021 adalah nilai 3,15. Target IKU tersebut mengalami peningkatan sebesar 0,15% dibandingkan dengan tahun 2020 yang memiliki target 3.

Perhitungan polarisasi data IKU tersebut menggunakan *maximize* (semakin tinggi realisasi terhadap target, semakin baik capaian kinerjanya), periode pelaporan (*trajectory*) triwulanan, dan jenis konsolidasi periode menggunakan *average* (realisasi yang digunakan adalah rata-rata realisasi pada setiap periode pelaporan).

Realisasi tahun 2021

Realisasi IKU ini pada tahun 2021 adalah 4. Realisasi tersebut diperoleh dari indeks efektivitas pengelolaan pengeluaran kas setiap triwulannya. Setiap triwulannya IKU ini memiliki realisasi 100% dengan perbandingan sebagaimana ditunjukkan pada

Perbandingan realisasi dan target tahun 2021

Perbandingan Capaian IKU indeks pengelolaan pengeluaran kas tahun 2021

Target/Realisasi	Trw I	Trw II	Smt I	Trw III	S. d. Trw III	Trw IV	Tahunan	Pol /KP
Target	3,15	3,15	3,15	3,15	3,15	3,15	3,15	Maximize/ Average
Realisasi	4	4	4	4	4	4	4	
Nilai Capaian	120	120	120	120	120	120	120	

Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel nilai realisasi tahunan IKU sebesar 4 melampaui target IKU sebesar 3,15 dengan nilai capaian 120 yang ditetapkan dalam Kontrak Kinerja Kemenkeu-three Kepala KPPN Painan tahun 2021.

Perbandingan Realisasi IKU tahun 2021 dan tahun 2020

Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2021 dengan tahun 2020 ditunjukkan pada Tabel Realisasi IKU pada tahun 2021 dan tahun 2020 adalah 4.

Perbandingan antar triwulan capaian IKU tersebut untuk tahun 2021 dan 2020 dapat ditunjukkan pada Tabel

Perbandingan Capaian IKU Persentase tingkat implementasi Aplikasi SAKTI

Tahun	Realisasi							Target Tahunan
	Trw I	Trw II	Smt I	Trw III	S. d. Trw III	Trw IV	Tahun	
2021	4	4	4	4	4	4	4	3,15
2020	N/A	4	4	4	4	4	4	3
Selisih	N/A	-	-	-	-	-	-	0,15

Isu, permasalahan, tindakan, dan

Mekanisme pendaftaran supplier belum sepenuhnya dipahami oleh petugas Satker sehingga terjadi retur yang disebabkan oleh kesalahan nomor rekening, nama penerima atau rekening penerima pasif. Hal ini terjadi karena Data dukung

action plan yang memuat nomor dan nama pemilik rekening yang tidak terstandarisasi dari Bank (Surat Keterangan Referensi, Mutasi Rekening, Buku Tabungan, Rekening Koran, dll), ketidaktepatan Satker dalam menginput data supplier.

Tindakan yang telah dilaksanakan adalah :

1. Melakukan pengecekan data supplier di Aplikasi OMSPAN dan di aplikasi mobile banking perbankan untuk memastikan kebenaran data dan keaktifan rekening penerima pada SPM.
2. Untuk meminimalisir retur, satker diminta dapat memperoleh rekening koran terahir
3. Satker berkoordinasi dengan KPPN apabila terdapat masalah teknis

Rencana aksi yang akan dilaksanakan adalah :

1. Mengedukasi dan membina kepada satker untuk memastikan rekening penerima selalu benar dan aktif
2. Satker dan bank harus membuat surat pernyataan bahwa rekening penerima dana memang benar-benar masih aktif dan berdasarkan hasil pengecekan ulang nomor, nama rekening dan data lainnya telah sesuai dengan data supplier/rekanan yang telah direkam dalam SPAN.
3. Jika terdapat satker yang SP2Dnya masih retur, maka proses SPM selanjutnya akan ditolak

6. Sasaran Strategis 5:

Pelaksanaan anggaran yang efektif dan efisien

Dalam rangka memastikan proses pengelolaan perbendaharaan dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan dan dapat mencapai output yang telah ditetapkan, perlu dilakukan langkah-langkah strategis secara komprehensif atas pelaksanaan anggaran kepada Internal DJPb maupun para stakeholder.

Langkah-langkah strategis tersebut disusun dan dievaluasi secara periodik dan terukur, sehingga secara langsung dapat berdampak terhadap peningkatan kualitas pelaksanaan anggaran internal DJPb maupun Kementerian/Lembaga.

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, KPPN Painan mengidentifikasi 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU), yang masing-masing pencapaiannya ditabulasikan dalam Tabel.

SS 6: Pelaksanaan anggaran yang efektif dan efisien

Capaian IKU pada Sasaran Strategis Pelaksanaan anggaran yang efektif dan efisien

Kode	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Nilai
6a-CP	Nilai kinerja pelaksanaan anggaran K/L	89	96,59	108,52
6b-CP	Nilai kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa	90	99,44	110,48
6c-N	Tingkat partisipasi pelaporan data capaian output satker	89	99,63	111,94

6a-CP Nilai kinerja pelaksanaan anggaran K/L

Uraian mengenai IKU tersebut adalah sebagaimana berikut:

Nilai kinerja pelaksanaan anggaran K/L mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran secara kuantitatif, yang dapat terwakili oleh variabel-variabel antara lain:

1. Aspek Kesesuaian Perencanaan dengan Pelaksanaan, meliputi frekuensi revisi DIPA, deviasi halaman III DIPA, dan pagu minus.
2. Aspek Kepatuhan Terhadap Regulasi, meliputi penyampaian data kontrak, pengelolaan UP dan TUP, penyampaian LPJ Bendahara, dan dispensasi SPM.
3. Aspek Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan, meliputi penyerapan anggaran, penyelesaian tagihan, konfirmasi capaian output, dan retur SP2D.
4. Aspek Efisiensi Pelaksanaan Kegiatan, meliputi perencanaan kas dan kesalahan SPM.

Tujuan dari penerapan IKU Nilai kinerja pelaksanaan anggaran K/L adalah Mendorong KPPN untuk melakukan langkah-langkah nyata dalam usaha meningkatkan kinerja pelaksanaan anggaran K/L.

Target tahun 2021

Target IKU tersebut untuk tahun 2021 adalah sebesar 89. Target IKU tersebut mengalami peningkatan sebesar 1 dibandingkan dengan target tahun 2020 sebesar 88.

Perhitungan polarisasi data IKU tersebut menggunakan *maximize* (semakin tinggi realisasi terhadap target, semakin baik capaian kinerjanya), periode pelaporan (*trajectory*) triwulanan, dan jenis konsolidasi periode menggunakan *average* (realisasi yang digunakan adalah rata-rata realisasi pada setiap periode pelaporan).

Realisasi tahun 2021

Realisasi IKU ini pada tahun 2021 adalah 96,59. Persentase tersebut diperoleh dari rata-rata persentase kinerja pelaksanaan anggaran K/L tahun 2021 triwulanan. Realisasi pada triwulan I, II, III dan IV yaitu 99,39, 92,93, 95,84, 98,21 dengan perbandingan sebagaimana ditunjukkan pada Tabel

Capaian IKU Nilai kinerja pelaksanaan anggaran K/L pada tahun 2021

Perbandingan realisasi dan target tahun 2021

Target/Realisasi	Trw I	Trw II	Smt I	Trw III	s. d. Trw III	Trw IV	Tahunan	Pol /KP
Target KK	89	89	89	89	89	89	89	Max/Average
Realisasi	99,39	92,93	96,16	95,84	96,05	98,21	96,59	
Nilai Capaian	111,67	104,41	108	107,68	107,92	110,34	108,52	

Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel , nilai realisasi tahunan IKU sebesar 96,59 tersebut melampaui target IKU sebesar 89 dengan nilai capaian 108,52 yang ditetapkan dalam Kontrak Kinerja Kemenkeu-three Kepala KPPN Painan tahun 2021. Selain itu, setiap realisasi triwulanan juga melampaui target trajectory triwulanan yang telah ditetapkan.

Perbandingan Realisasi IKU tahun 2021 dan tahun sebelumnya

Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2021 dengan tahun 2020 ditunjukkan pada Tabel 3.26. Realisasi IKU pada tahun 2021 adalah 96,59 sedangkan pada tahun 2020 realisasi IKU mencapai 98,93. Hal ini menunjukkan terjadinya penurunan realisasi IKU dari tahun 2020 ke tahun 2021 sebesar 2,34%. Perbandingan antar triwulan capaian IKU tersebut untuk tahun 2020 dan 2021 dapat ditunjukkan pada Tabel

Perbandingan Capaian IKU Nilai kinerja pelaksanaan anggaran K/L tahun 2021 dan 2020

Tahun	Realisasi							Target Tahunan
	Trw I	Trw II	Smt I	Trw III	S.d. Trw III	Trw IV	Tahun	
2021	99,39	92,93	96,16	95,84	96,05	98,21	96,59	89
2020	N/A	N/A	N/A	99,43	99,43	98,42	98,93	88
Selisih	N/A	N/A	N/A	-3,59	-3,38	-0,21	-2,34	1

Isu, permasalahan, tindakan, dan action plan

Isu utama terkait nilai kinerja pelaksanaan anggaran K/L adalah Diterbitkannya Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-4/PB/2021 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga yang mengakibatkan adanya pengaturan ulang tentang penilaian IKPA khususnya bobot dalam setiap nilai aspek dan indikator

Tindakan yang telah dilaksanakan selama tahun 2020 adalah :

1. Mensosialisasikan kepada satker tentang Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-4/PB/2021 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga
2. Melakukan monitoring dan evaluasi IKPA secara triwulanan
3. Melakukan cross check hasil monitoring dan evaluasi indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) satker selama tahun 2021.
4. Merumuskan rekomendasi bersama yang bersifat teknis aplikatif berdasarkan permasalahan yang telah teridentifikasi dalam rangka peningkatan nilai IKPA periode selanjutnya.

Rekomendasi rencana aksi untuk periode selanjutnya adalah :

1. Melakukan monev pelaksanaan anggaran pada Satker yang mempunyai proyek-proyek strategis
2. Mengapresiasi satker-satker yang memiliki nilai IKPA terbaik dengan memberikan piagam penghargaan.
3. Membahas permasalahan-permasalahan spesifik yang dihadapi satker terkait kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) satker selama tahun 2021.

6b Nilai Kinerja
- penyaluran
CP Dana
Transfer ke
Daerah dan
Dana Desa

Sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran, Kanwil Ditjen Perbendaharaan sebagai Pengelola Perbendaharaan di daerah menyusun Laporan Keuangan secara akuntabel, transparan, dan tepat waktu.

Prinsip transparan dan akuntabilitas mewajibkan adanya suatu informasi yang terbuka, tepat waktu dan jelas sebagai perwujudan pertanggungjawaban suatu unit organisasi dalam mengelola sumber daya yang telah dikelola. Transparansi, akuntabilitas dan tepat waktu akan mendorong diungkapkannya kondisi yang sebenarnya sehingga setiap pihak yang berkepentingan (stakeholder) dapat memperoleh informasi yang akurat, andal dan terkini.

Dalam rangka memastikan pelaksanaan anggaran penyaluran DAK fisik dan Dana Desa berjalan dengan efisien dan efektif, diperlukan suatu alat penilaian kualitas/kinerja seluruh stakeholder dalam pelaksanaan anggaran penyaluran DAK fisik dan Dana Desa.

Nilai Kinerja penyaluran DAK fisik dan Dana Desa mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran secara kuantitatif dengan menggunakan beberapa variabel sebagai berikut :

1. Ketepatan waktu penyampaian dokumen persyaratan oleh pemda. (SYARAT)
2. Ketepatan waktu penyelesaian SPP dan SPM penyaluran dana transfer DAK Fisik dan Dana Desa oleh KPPN. (SPPSPM)
3. Ketepatan waktu penyampaian laporan pemantauan dan evaluasi penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa. (MONEV)
4. Ketepatan waktu penyampaian LK tingkat UAKPA BUN DAK Fisik dan Dana Desa. (LK-UAKPA).

*Target tahun
2021*

Target IKU tersebut untuk tahun 2021 adalah sebesar 90. Target IKU tersebut mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2020 yang memiliki target sebesar 80 .

Perhitungan polarisasi data IKU tersebut menggunakan *maximize* (semakin tinggi realisasi terhadap target, semakin baik capaian kinerjanya), periode pelaporan (*trajectory*) triwulanan, dan jenis konsolidasi periode menggunakan *average*

(realisasi yang digunakan adalah rata-rata realisasi pada setiap periode pelaporan)

Realisasi tahun 2021

Realisasi IKU Nilai Kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa pada tahun 2021 adalah 99,44. Persentase tersebut diperoleh dari rata-rata persentase Nilai Kinerja penyaluran DAK fisik dan Dana Desa setiap triwulan. Realisasi pada triwulan I, II, III dan IV yaitu 100, 100, 98,74, dan 99,05 dengan perbandingan sebagaimana ditunjukkan pada Tabel

Perbandingan realisasi dan target tahun 2021

Realisasi capaian IKU nilai kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa

Target/Realisasi	Trw I	Trw II	Smt I	Trw III	s. d. Trw III	Trw IV	Tahunan	Pol /KP
Target KK	90	90	90	90	90	90	90	Max/Average
Realisasi	100	100	100	98,74	99,58	99,05	99,44	
Nilai Capaian	111,11	111,11	111,11	109,71	110,64	110,05	110,48	

Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel nilai realisasi tahunan IKU sebesar 99,44 mencapai target dengan nilai capaian 110,48 yang ditetapkan dalam Kontrak Kinerja Kemenkeu-three Kepala KPPN Painan tahun 2021. Selain itu, setiap realisasi triwulanan juga melampaui target *trajectory* triwulanan yang telah ditetapkan.

Perbandingan Realisasi IKU tahun 2021 dan tahun 2020

Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2021 dengan tahun 2020 ditunjukkan pada Tabel 3.28. Realisasi IKU pada tahun 2021 adalah 99,44. Sedangkan realisasi pada IKU di tahun 2020 adalah sebesar 99,64. Hal tersebut menunjukkan adanya penurunan nilai IKU sebesar 0,2. Perbandingan antar triwulan capaian IKU tersebut untuk tahun 2020 dan 2021 dapat ditunjukkan pada Tabel

Perbandingan Capaian IKU persentase tingkat implementasi Aplikasi SAKTI Tahun 2019 dan 2020

Tahun	Realisasi							Target Tahunan
	Trw I	Trw II	Smt I	Trw III	S.d. Trw III	Trw IV	Tahun	
2021	100	100	100	98,74	99,58	99,05	99,44	90
2020	100	98,55	99,28	100	99,51	100	99,54	80
Selisih	-	1,45	0,72	-1,26	7	-0,95	-0,1	10

Isu, permasalahan, tindakan, dan action plan

Isu utama dalam penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa yang mengalami penyesuaian dalam penyalurannya.

Tindakan yang telah dilaksanakan adalah:

1. Berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah terkait penyaluran Dana Desa
2. Melakukan verifikasi dokumen penyaluran yang diupload oleh Pemda pada aplikasi OM SPAN.
3. Mempersiapkan konsep laporan keuangan di akhir bulan berkenaan, untuk mempercepat proses penyelesaian LK dan pengiriman LK ke kantor Pusat
4. Membuat monitoring manual untuk memastikan penyaluran Dana Desa tepat jumlah dan tepat sasaran
5. Melakukan FGD penyaluran DAK Fisik

Rekomendasi Rencana Aksi yang akan dilakukan KPPN Painan pada tahun 2022 adalah meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah via *whatsapp* maupun telepon dan menyampaikan laporan monitoring dan evaluasi penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa secara tepat waktu.

Tingkat partisipasi pelaporan data capaian output satker

Pelaksanaan anggaran yang efektif dan efisien adalah Kemampuan BUN untuk mengawal pelaksanaan kebijakan pelaksanaan anggaran berjalan secara efektif dan efisien dengan memastikan kegiatan pelaksanaan anggaran pada BA Kementerian Negara/Lembaga maupun BA BUN berjalan sesuai dengan ketentuan/kebijakan Pelaksanaan Anggaran.

Target tahun 2021

IKU ini merupakan IKU baru yang ada di tahun 2021 dengan target 89.

Perhitungan polarisasi data IKU tersebut menggunakan maximize (semakin tinggi realisasi terhadap target, semakin baik capaian kinerjanya), periode pelaporan (trajectory) triwulanan, dan jenis konsolidasi periode menggunakan *average* (realisasi yang digunakan adalah rata-rata realisasi pada setiap periode pelaporan).

Realisasi tahun 2021

Realisasi IKU Tingkat partisipasi pelaporan data capaian output satker pada tahun 2021 adalah 99,63. Realisasi pada triwulan I, II, III dan IV yaitu 100, 100, 98,52, dan 100 dengan perbandingan sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.25.

Perbandingan realisasi dan target tahun 2021 Capaian IKU tingkat partisipasi pelaporan data capaian output satker pada tahun 2021

Target/Realisasi	Trw I	Trw II	Smt I	Trw III	s. d. Trw III	Trw IV	Tahunan	Pol /KP
Target KK	89	89	89	89	89	89	89	Max/ Average
Realisasi	100	100	100	98,52	99,50	100	99,63	
Nilai Capaian	112,35	112,35	112,35	110,69	111,79	112,35	111,94	

Perbandingan realisasi IKU tahun 2021 dan 2020 Tidak terjadi perubahan capaian pada Tahun 2020 karena IKU ini merupakan IKU baru.

Perbandingan tingkat partisipasi pelaporan data capaian output satker Tahun 2020 dan 2021

Tahun	Realisasi							Target Tahunan
	Trw I	Trw II	Smt I	Trw III	S.d. Trw III	Trw IV	Tahun	
2021	100	100	100	98,52	99,50	100	99,63	89
2020	-	-	-	-	-	-	-	-
Selisih	-	-	-	-	-	-	-	-

Isu, permasalahan, tindakan, dan action plan

Isu utama terkait IKU perbandingan tingkat partisipasi pelaporan data capaian output satker adalah Tidak ada sanksi yang tegas bagi Satker yang tidak menyampaikan laporan capaian output secara tepat waktu paling lambat 10HK sebelum jatuh tempo pelaporan.

Tindakan yang telah dilaksanakan adalah:

1. Melaksanakan bimtek pengisian dan penyampaian laporan capaian output
2. Melakukan pendampingan ke satker melalui telepon, whatsapp call, tatap muka dan media lainnya terkait pengisian data capaian output melalui aplikasi SAS
3. Menghimbau satker agar melakukan pengisian data caput secara wajar, tepat dan akurat dan mengunggah data ke OMSPAN sebelum batas akhir pelaporan (10hr kerja bulan berikutnya)
4. Memperkuat koordinasi antar PPK dengan PPSPM dalam hal perekaman data transaksi (Revisi DIPA, SP2D dll)
5. Menginventarisir daftar RO yang dikelola dan menyiapkan kertas kerja untuk menghitung dan memonitor progres dan capaiannya dalam 1 tahun
6. Aktif koordinasi antara KPPN dengan Satker apabila ada output yang tidak terkonfirmasi, dan segera melakukan perbaikan data apabila diperlukan.

Rekomendasi Rencana Aksi yang akan dilaksanakan pada periode selanjutnya adalah:

1. Melakukan evaluasi pencapaian output secara berkala
2. Menyiapkan metode penghitungan capaian output (Rincian Output/RO) untuk setiap RO yang dikelola oleh satker dengan melakukan : Identifikasi berbagai aktivitas yang relevan dalam pencapaian output utk diperhitungkan dalam pencapaian progres PCRO dan Menentukan entry point kapan RVRO dapat diakui.

7. Sasaran Strategis 7:

Akuntansi dan pelaporan keuangan negara yang akuntabel, transparan, dan tepat waktu

Akuntabilitas dan transparansi pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara diwujudkan dengan penyusunan laporan keuangan oleh Pemerintah Pusat.

Penyusunan laporan keuangan Pemerintah harus disusun secara profesional dan modern. Kualitas laporan keuangan Pemerintah dapat diidentifikasi dari ketepatan waktu penyelesaian LKPP, penyelesaian rekomendasi BPK, serta opini audit yang baik dari BPK.

Manajemen satker adalah suatu strategi pengelolaan Satker lingkup KPPN, yang meliputi: Penyusunan profil satuan kerja, membangun database satuan kerja yang kuat, serta interaksi dengan satuan kerja melalui fungsi Customer service maupun kegiatan bimbingan dan sosialisasi terhadap pelaksanaan tugas-tugas teknis bidang perbendaharaan.

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, KPPN Painan mengidentifikasi 1 (satu) Indikator Kinerja Utama (IKU), yang masing-masing pencapaiannya ditabulasikan dalam Tabel

TABEL
Capaian IKU
pada Sasaran
Strategis
Akuntansi dan
pelaporan
keuangan
negara yang
akuntabel,
transparan,
dan tepat
waktu

SS 7: Akuntansi dan pelaporan keuangan negara yang akuntabel, transparan, dan tepat waktu

Kode	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Nilai
7a-CP	Persentase rekonsiliasi tingkat UAKPA secara tepat waktu dan andal	98,1%	100%	101,93
7b-N	Persentase LPJ Bendahara yang andal dan tepat waktu	98%	100%	102,04

Uraian mengenai IKU tersebut adalah sebagaimana berikut:

7a-N
Persentase rekonsiliasi tingkat UAKPA secara tepat waktu dan andal

Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase rekonsiliasi tingkat UAKPA secara tepat waktu dan andal didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2013 tentang Pedoman Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan LKBUN dan LKKL, Satuan Kerja selaku UAKPA melakukan rekonsiliasi dengan UAKKBUN-Daerah di wilayah kerjanya setiap bulan menggunakan aplikasi E-Rekon.

Realisasi IKU dihitung berdasarkan perbandingan jumlah satuan kerja yang melakukan rekonsiliasi laporan keuangan secara tepat waktu dengan jumlah satker yang wajib melakukan rekonsiliasi laporan keuangan (bobot 50%) dan perbandingan jumlah satuan kerja yang melakukan rekonsiliasi laporan keuangan secara andal dengan jumlah satker yang wajib melakukan rekonsiliasi laporan keuangan (bobot 50%).

Target tahun 2021

Target IKU tersebut untuk tahun 2020 adalah sebesar 98,1%. Target IKU tersebut tidak mengalami perubahan dibandingkan dengan tahun 2020.

Perhitungan polarisasi data IKU tersebut menggunakan *maximize* (semakin tinggi realisasi terhadap target, semakin baik capaian kinerjanya), periode pelaporan (*trajectory*) triwulanan, dan jenis konsolidasi periode menggunakan *average* (realisasi yang digunakan adalah rata-rata realisasi pada setiap periode pelaporan).

Realisasi tahun 2021

Realisasi IKU Persentase rekonsiliasi tingkat UAKPA secara tepat waktu dan andal Tahun 2021 adalah 100%. Persentase tersebut diperoleh dari rata-rata persentase rekonsiliasi tingkat UAKPA secara tepat waktu setiap triwulannya. Berdasarkan Nota Dinas Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor ND-466/PB/2020 tanggal 24 Juni 2020 hal Pelaksanaan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Keuangan s.d. Bulan Mei 2020, capaian IKU ini pada triwulan II adalah N/A. Realisasi pada triwulan I, III dan IV yaitu 100% dengan perbandingan sebagaimana ditunjukkan pada Tabel

*Perbandingan an realisasi dan target tahun 2021***TABEL**

Capaian IKU Persentase rekonsiliasi tingkat UAKPA secara tepat waktu dan andal Tahun 2021

Target/Realisasi	Trw I	Trw II	Smt I	Trw III	s. d. Trw III	Trw IV	Tahunan	Pol /KP
Target KK	98,1%	98,1%	98,1%	98,1%	98,1%	98,1%	98,1%	Max/Average
Realisasi	100%	N/A	100%	100%	100%	100%	100%	
Nilai Capaian	101,93	N/A	101,93	101,93	101,93	101,93	101,93	

Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.30, nilai realisasi tahunan IKU sebesar 100% melampaui target IKU sebesar 98,1% dengan nilai capaian 101,93 yang ditetapkan dalam Kontrak Kinerja Kemenkeu-*three* Kepala KPPN Painan tahun 2021. Selain itu, setiap realisasi triwulanan juga melampaui target *trajectory* triwulanan yang telah ditetapkan.

Perbandingan Realisasi IKU tahun 2021 dan tahun 2020

Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2021 dengan tahun 2020 ditunjukkan pada Tabel. Realisasi IKU pada tahun 2020 dan 2021 adalah 100%. Perbandingan antar triwulan capaian IKU tersebut untuk tahun 2020 dan 2021 dapat ditunjukkan pada Tabel 3.31.

TABEL

Perbandingan Capaian IKU Persentase rekonsiliasi tingkat UAKPA secara tepat waktu dan andal Tahun 2019 dan 2020

Tahun	Realisasi							Target Tahunan
	Trw I	Trw II	Smt I	Trw III	S.d. Trw III	Trw IV	Tahun	
2021	100%	N/A	100%	100%	100%	100%	100%	98,1%
2020	100%	N/A	100%	100%	100%	100%	100%	98,1%
Selisih	-	N/A	-	-	-	-	-	-

Isu, permasalahan, tindakan, dan action plan

Masih ditemukan satker yang kurang memahami makna rekonsiliasi internal dan eksternal, karena terkadang satker sudah upload adk rekon walaupun rekonsiliasi internal belum dilakukan, sementara itu ada juga satker yang upload ADK rekonsiliasi di periode akhir masa rekon (H-1). Kondisi ini terus diupayakan untuk diperbaiki dengan memberikan edukasi dan pemahaman ke satker.

Beberapa tindakan yang telah dilaksanakan selama tahun 2018 adalah sebagai berikut:

1. Tetap memberikan layanan rekonsiliasi dan konsultasi diluar hari kerja dan jam kerja, yaitu di hari libur ataupun di malam hari,
2. Aktif untuk mengingatkan satker terkait periode rekonsiliasi melalui sarana WAG
3. Selalu menghimbau satker untuk melakukan rekonsiliasi di awal periode

Rekomendasi rencana aksi untuk periode selanjutnya adalah:

1. Semakin meningkatkan koordinasi dengan satker dalam rangka menghimbau satker untuk upload ADK rekon sebelum H-5 sehingga masih ada waktu untuk perbaikan
2. Memberikan edukasi atas permasalahan yang dialami satker.

Persentase LPJ Bendahara yang andal dan tepat waktu

LPJ Bendahara adalah Laporan yang disusun oleh Bendahara melalui Modul SILABI atas uang yang dikelolanya sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan uang negara. Berdasarkan Perdirjen Perbendaharaan Nomor 03/PB/2014 tentang Juknis Penatausahaan, pembukuan dan Pertanggungjawaban Bendahara K/L/Kantor/ Satker, LPJ Bendahara disampaikan kepada KPPN selambat-lambatnya tanggal 10 (sepuluh) setelah bulan yang bersangkutan berakhir.

LPJ Bendahara dinyatakan andal jika LPJ tersebut telah diverifikasi dan dinyatakan benar oleh Kuasa BUN KPPN sesuai indikator verifikasi LPJ yang telah ditetapkan.

Pengisian realisasi IKU disesuaikan dengan siklus dan karakteristik penyusunan LPJ Bendahara yang bersifat historical report. Artinya, untuk data realisasi IKU triwulan I tahun 2021 merupakan rata-rata data penyampaian LPJ bulan Desember 2020, bulan Januari dan Februari tahun 2021. Sedangkan realisasi IKU triwulan II 2021 merupakan rata-rata data penyampaian LPJ bulan Maret, April dan Mei tahun 2021 dan seterusnya.

Target IKU tersebut untuk tahun 2021 adalah nilai 98%. Tidak terdapat perubahan target IKU pada 2021 dan 2020.

Perhitungan polarisasi data IKU tersebut menggunakan maximize (semakin tinggi realisasi terhadap target, semakin baik capaian kinerjanya), periode pelaporan

Target tahun 2021

(trajectory) triwulanan, dan jenis konsolidasi periode menggunakan average (realisasi yang digunakan adalah rata-rata realisasi pada setiap periode pelaporan).

Realisasi tahun 2021

Realisasi IKU ini pada tahun 2021 adalah 100%. Persentase tersebut diperoleh dari rata-rata LPJ Bendahara yang disampaikan tepat waktu setiap triwulannya. Setiap triwulannya IKU ini memiliki realisasi 100% dengan perbandingan sebagaimana ditunjukkan pada Tabel

Capaian IKU Persentase LPJ Bendahara yang andal dan tepat waktu Tahun 2021

Perbandingan realisasi dan target tahun 2020

Target/Realisasi	Trw I	Trw II	Smt I	Trw III	s. d. Trw III	Trw IV	Tahunan	Pol /KP
Target KK	98%	98%	98%	98%	98%	98%	98%	Max/Average
Realisasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Nilai Capaian	102,04	102,04	102,04	102,04	102,04	102,04	102,04	

Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.30, nilai realisasi tahunan IKU sebesar 100% melampaui target IKU sebesar 98% dengan nilai capaian 102,04 yang ditetapkan dalam Kontrak Kinerja Kemenkeu-three Kepala KPPN Painan tahun 2021. Selain itu, setiap realisasi triwulanan juga melampaui target *trajectory* triwulanan yang telah ditetapkan.

Perbandingan realisasi IKU tahun 2021 dan tahun sebelumnya

Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2021 dengan tahun 2020 ditunjukkan pada Tabel Realisasi IKU pada tahun 2020 dan 2021 sebesar 100%.

TABEL

Perbandingan Capaian IKU Persentase LPJ Bendahara yang andal dan tepat waktu secara tepat waktu dan andal Tahun 2020 dan 2021

Tahun	Realisasi							Target Tahunan
	Trw I	Trw II	Smt I	Trw III	S.d. Trw III	Trw IV	Tahun	
2021	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	98%
2020	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	98%
Selisih	-	-	-	-	-	-	-	-

8 Sasaran Strategis 8:

Pengelolaan organisasi dan SDM yang optimal

Organisasi yang optimal adalah organisasi yang mampu memfasilitasi kegiatan-kegiatan dalam rangka mencapai tujuan.

Dengan demikian organisasi beserta proses bisnis di dalamnya akan bersifat dinamis dan fleksibel sesuai dengan tuntutan kebutuhan dan dinamika transformasi kelembagaan Kementerian Keuangan. SDM yang optimal adalah SDM yang memiliki kepemimpinan yang tepat, mengetahui apa yang akan dilakukan untuk semua informasi yang diterima dan kompetensi yang dibutuhkan

untuk keberhasilan organisasi serta melakukan pekerjaan dengan penuh semangat, efektif, efisien dan produktif, sesuai dengan proses kerja yang benar agar mencapai hasil kerja yang optimal.

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, KPPN Painan mengidentifikasi 4 (empat) Indikator Kinerja Utama (IKU), yang masing-masing pencapaiannya ditabulasikan dalam Tabel 3.32.

TABEL
Capaian IKU pada
Sasaran Strategis
*Akuntansi dan
pelaporan
keuangan negara
yang akuntabel,
transparan, dan
tepat waktu*

SS 8: Pengelolaan organisasi dan SDM yang optimal

Kode	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Nilai
8a-N	Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis Strategy Focused Organization	84	88,38	105,21
8b-N	Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal	83	97,08	116,96
8c-N	Nilai rata – rata hard competency pegawai	78	88	112,82

Uraian mengenai IKU tersebut adalah sebagaimana berikut:

8a-N Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis Strategy Focused Organization

Dalam rangka mendorong komitmen pimpinan dan seluruh pegawai terhadap pelaksanaan pengelolaan kinerja di masing-masing unit lingkup Ditjen Perbendaharaan, telah disampaikan matriks langkah-langkah peningkatan kualitas pengelolaan kinerja.

Langkah-langkah peningkatan kualitas pengelolaan kinerja dimaksud merupakan panduan bagi unit kerja lingkup Ditjen Perbendaharaan untuk melaksanakan action plan yang implementatif berdasarkan prinsip-prinsip Strategy Focused Organization (SFO).

Dalam rangka mendorong komitmen pimpinan dan seluruh pegawai terhadap pelaksanaan pengelolaan kinerja di masing-masing unit lingkup DJPb, telah disampaikan matriks langkah-langkah peningkatan kualitas pengelolaan kinerja. Langkah-langkah peningkatan kualitas pengelolaan kinerja dimaksud merupakan panduan bagi unit kerja lingkup DJPb untuk melaksanakan *action plan* yang implementatif berdasarkan prinsip-prinsip *Strategy Focused Organization* (SFO). Sebagai bentuk apresiasi terhadap upaya-upaya peningkatan kualitas pengelolaan kinerja di lingkungan DJPb, Kantor Pusat DJPb melaksanakan penilaian terhadap pelaksanaan pengelolaan kinerja di unit masing-masing. Penilaian dimaksud dilaksanakan berdasarkan nilai kuantitatif pemenuhan unsur-unsur peningkatan kualitas pengelolaan kinerja periode sampai dengan triwulan III dan nilai NKO Unit periode tahunan 2020. Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis Strategy Focused Organization diformulasikan sebagai berikut:

“Nilai hasil penilaian kualitas pengelolaan kinerja oleh Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan”.

Target IKU Tahun 2021

Target IKU tersebut sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak Kinerja Kemenkeu Three Kepala KPPN Painan Tahun 2021 adalah 84. Perhitungan polarisasi data menggunakan maximize (semakin tinggi realisasi terhadap target maka semakin baik capaian kerjanya) dan jenis konsolidasi periode menggunakan *take last known value (realisasi yang digunakan adalah angka terakhir periode terakhir)*.

Realisasi IKU Tahun 2021

Realisasi IKU Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis Strategy Focused Organization pada tahun 2021 adalah 88,38.

Perbandingan realisasi dan target tahun 2021

Perhitungan IKU Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis Strategy Focused Organization Tahun 2021

Unsur Pemenuhan Penilaian Pelaksanaan Pengelolaan Kinerja	Nilai	Realisasi IKU s.d. Trw IV
Pemenuhan Langkah Langkah Peningkatan Kualitas Pengelolaan Kinerja (bobot 70%)	87,24	88,38
NKO (bobot 30%)	91,03	

Perbandingan realisasi dan target IKU Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel.

Perbandingan target dan realisasi IKU Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis Strategy Focused Organization tahun 2021

T/R	Q1	Q2	Smt. 1	Q3	Sd. Q3	Q4	Y-19	Pol /KP
Target	-	-	-	-	-	84	84	Take Last Known Value
Realisasi	-	-	-	-	-	88,38	88,38	
Capaian	-	-	-	-	-	105,21	105,21	

Perbandingan Realisasi IKU tahun 2021 dan tahun 2020

Capaian IKU tersebut tahun sebelumnya (2019) adalah 86,98 sedangkan pada tahun 2020 adalah 92,01. Terjadi peningkatan realisasi pada tahun 2020 sebesar 5,03 poin. Perbandingan target dan realisasi IKU tersebut untuk tahun 2019 dan 2020 ditunjukkan pada Tabel

Perbandingan Capaian IKU Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis Strategy Focused Organization tahun 2021 dan tahun 2020

T/R	Q1	Q2	Smt. 1	Q3	Sd. Q3	Q4	Y
Target 2020	-	-	-	-	-	-	83
Realisasi 2020	-	-	-	-	-	-	92,01
Target 2021	-	-	-	-	-	-	84
Realisasi 2021	-	-	-	-	-	-	88,38

Isu, permasalahan, tindakan, dan action plan

Parameter Nilai IKU **Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis Strategy Focused Organization** ini adalah nilai kuantitatif pemenuhan unsur-unsur peningkatan kualitas pengelolaan kinerja periode sampai dengan triwulan III 2020 dan nilai NKO Unit periode tahunan 2019. Sampai dengan saat ini KPPN Painan sedang menyusun Laporan SFO Triwulan III Tahun 2020 dengan mengacu pada Matriks Tahun 2020.

Tindakan yang telah dilaksanakan :

1. Melaksanakan setiap unsur pengelolaan kinerja yang terdapat didalam matrik Laporan SFO sesuai jadwal.
2. Membuat terobosan berupa penyediaan kalender pengelolaan kinerja KPPN Painan tahun 2020 yang memuat rencana kegiatan pengelolaan kinerja selama tahun 2020.

Rekomendasi Rencana Aksi yang dilakukan KPPN Painan adalah secara fokus perlu meningkatkan pemenuhan unsur-unsur peningkatan kualitas pengelolaan kinerja pada periode berikutnya serta memperbaiki kualitas laporan Pengelolaan Kinerja berbasis SFO periode selanjutnya.

8b- N Nilai Hasil Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepatuhan Internal

Nilai hasil evaluasi merupakan hasil penilaian terhadap pelaksanaan tugas kepatuhan internal yang diimplementasikan pada unit kerja di lingkungan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara. Penilaian tersebut dilakukan oleh Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan c.q. Bidang SKKI.

Unsur-unsur penilaian pelaksanaan tugas kepatuhan internal, terdiri atas:

1. Laporan penerapan manajemen risiko (bobot: 35%)
2. Laporan pemantauan pengendalian intern (bobot: 35%)
3. Laporan pemantauan kode etik dan disiplin pegawai (bobot: 20%)
4. Tindak lanjut rekomendasi hasil audit Aparat Pengawasan Fungsional dan laporan pengelolaan pengaduan (bobot: 10%)

Target IKU Tahun 2021

Target IKU tersebut sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak Kinerja Kemenkeu *Three* Kepala KPPN Painan Tahun 2021 adalah 83. Perhitungan polarisasi data menggunakan maximize (semakin tinggi realisasi terhadap target maka semakin baik capaian kerjanya) dan jenis konsolidasi periode menggunakan *Take Last Known Value* (realisasi yang digunakan adalah angka terakhir dalam periode bersangkutan).

Realisasi IKU Tahun 2021

Realisasi IKU Nilai hasil evaluasi penerapan pemantauan pengendalian intern pada tahun 2021 adalah 97,08.

Perhitungan IKU Nilai Hasil Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepatuhan Internal 2021

Nilai & Realisasi	Trw I	Trw II	Smt I	Trw III	s.d. Trw III	Trw IV	Tahunan
Realisasi	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	97,08	97,08

Perbandingan realisasi dan target tahun 2021

Perbandingan realisasi dan target IKU Tahun 2021 dapat dilihat pada Tabel

Perbandingan target dan realisasi IKU Nilai Hasil Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepatuhan Internal 2021

T/R	Q1	Q2	Smt.1	Q3	Sd. Q3	Q4	Y-21	PoI /KP
Target	-	-	-	-	-	83	83	Max/TLNV
Realisasi	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	97,08	97,08	
Capaian	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	116,96	116,96	

Isu, permasalahan, tindakan, dan action plan

Terbitnya beberapa aturan baru seperti KMK 577/KMK.01/2019 tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Keuangan, ND-193/PB.1/2020 hal Pemantauan Kode Etik tahun 2020, mengharuskan Seksi VeraKi untuk langsung menyesuaikan. Sharing knowledge juga disampaikan ke internal KPPN Painan, selain itu diskusi dan koordinasi dengan wilayah juga selalu dilakukan.

Target IKU ini ada di triwulan IV, nilai hasil evaluasi merupakan nilai atas evaluasi tugas KI periode Januari sampai dengan Desember.

Tindakan yang telah dilaksanakan :

1. Berupaya untuk menyelesaikan semua laporan KI di awal bulan berikutnya
2. Selalu berkoordinasi dengan kantor wilayah jika menemukan permasalahan
3. Mengaktifkan forum diskusi seksi

Rekomendasi rencana aksi periode selanjutnya :

1. Menjalankan strategi yang telah dilaksanakan selama ini
2. Meningkatkan koordinasi dengan kantor wilayah ataupun dengan KPPN lain jika menemukan permasalahan
3. Lebih mengintensifkan forum diskusi seksi

8c-N Nilai rata – rata hard competency pegawai

IKU ini digunakan untuk mengukur tingkat pemahaman para pegawai KPPN terhadap tugas dan fungsi yang mereka jalankan, sehingga outputnya dapat dijadikan sebagai pemetaan hard competency pegawai. Teknisnya, para pegawai akan mendapat tes secara online yang terdiri dari beberapa soal untuk diselesaikan. Untuk Kemenkeu-Three KPPN, realisasi IKU tersebut diukur berdasarkan rata-rata hasil tes yang dicapai oleh seluruh pegawai KPPN. Dengan demikian, pimpinan unit dan atasan langsung agar memberikan bimbingan dan tutorial kepada para pegawai di lingkungan masing-masing.

Target IKU Tahun 2021 Target IKU tersebut untuk tahun 2021 adalah sebesar 78. Target IKU tersebut mengalami perubahan dibandingkan dengan tahun 2020. Perhitungan polarisasi data IKU tersebut menggunakan maximize (semakin tinggi realisasi terhadap target, semakin baik capaian kerjanya), periode pelaporan (trajectory) tahunan, dan jenis konsolidasi periode menggunakan take last known value (realisasi yang digunakan adalah angka periode terakhir).

Realisasi IKU Tahun 2021 Nilai rata – rata *hard competency* pegawai dihitung berdasarkan nilai rata-rata pelaksana yang mengikuti *hard competency*. Adapun capaian yang diperoleh adalah dengan nilai 88.

Perbandingan realisasi dan target tahun 2021 Dengan demikian realisasi IKU tersebut telah memenuhi target yang ditentukan dalam kontrak kinerja tahun 2021 sebagaimana ditunjukkan capaiannya pada Tabel.

Capaian IKU Nilai rata – rata *hard competency* pegawai

Target/Realisasi	Trw I	Trw II	Smt I	Trw III	s. d. Trw III	Trw IV	Tahunan	Pol /KP
Target	-	-	-	-	-	78	78	Maximize/ TLK
Realisasi	-	-	-	-	-	88	88	
Nilai Capaian	-	-	-	-	-	112,82	112,82	

Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.33, nilai realisasi tahunan melampaui target IKU. Dari target sebesar 78, realisasi mencapai nilai 88 dengan nilai capaian 112,82 yang ditetapkan dalam Kontrak Kinerja Kepala KPPN Painan pada tahun 2021.

Perbandingan Realisasi IKU tahun 2021 dan tahun 2020 Terjadi kenaikan capaian IKU Tahun 2021 dibandingkan tahun 2020 sebesar 3.3%. Pada tahun 2020, realisasi mencapai 84,7. Sedangkan pada tahun 2021, realisasi sebesar 88.

Perbandingan Capaian IKU Nilai rata – rata *hard competency* pegawai

Tahun	Realisasi							Target Tahunan
	Trw I	Trw II	Smt I	Trw III	S.d. Trw III	Trw IV	Tahun	
2021	-	-	-	-	-	-	88	78
2020	-	-	-	-	-	-	84,7	77
Selisih	-	-	-	-	-	-	3.3%	-

*Isu,
permasalahan,
tindakan,
dan
action plan*

Upaya peningkatan nilai rata rata hard competency pegawai KPPN Painan telah dilaksanakan dalam bentuk Dialog Kinerja Organisasi, Morning Call, Sharing Session internal, Gugus Kendali Mutu dan Mutasi Internal Pegawai. Kegiatan tersebut diharapkan mampu meningkatkan kapasitas hard competency pegawai. Perkembangan saat ini sudah ada kemajuan dari beberapa pegawai khususnya dalam kegiatan penyampaian satu informasi positif setiap hari Senin dan Kamis dalam kegiatan morning call rutin yang diselenggarakan KPPN Painan mulai pukul 07.30 s.d. 07.45 WIB. Perkembangannya adalah, beberapa pegawai yang selama ini cenderung untuk tidak mau menyampaikan informasi positif, saat ini secara perlahan sudah lebih maksimal. Hal tersebut membuktikan adanya usaha dari masing masing pegawai untuk menambah wawasannya sehingga mampu menyampaikan satu informasi positif sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Tindakan yang telah dilaksanakan dalam pencapaian IKU Hard Competency tersebut, yaitu telah dilakukan berbagai kegiatan diantaranya adalah Dialog Kinerja Organisasi dan Individu, Penerapan Coaching dan Counseling yang selaras dengan penerapan salah satu IKU Kemenkeu Three Kepala KPPN Painan, Morning call secara rutin hari Senin dan Kamis, GKM pengembangan kompetensi pegawai. Adapun yang menjadi rekomendasi rencana aksi adalah : Transfer Knowledge secara berkesinambungan khususnya terhadap pegawai yang dimutasi internal, penjadwalan informasi positif dengan tema yang berkaitan dengan peningkatan hard competency seperti wawasan terkait Visi Misi, Indikator Kinerja Utama maupun SOP ataupun perkembangan terbaru terkait Ditjen Perbendaharaan. Selain itu masing-masing seksi dapat dijadwalkan pertemuan rutin bulanan untuk membahas tema terkini terkait tugas dan fungsinya.

9. Sasaran Strategis 9:

Pengelolaan keuangan dan BMN yang efisien, efektif dan akuntabel

Pengelolaan keuangan meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring anggaran selama satu tahun anggaran yang selanjutnya dipertanggungjawabkan kepada stakeholder. Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA. Kualitas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran selama satu tahun, tercermin dari opini yang diberikan oleh BPK. Pengelolaan BMN dimanfaatkan secara efektif dan efisien dalam pemenuhan kebutuhan

satker. Upaya untuk mewujudkannya adalah melalui tertib hukum, tertib fisik, dan tertib administrasi.

Capaian IKU pada Sasaran Strategis
Pengelolaan keuangan dan BMN yang efisien, efektif dan akuntabel

SS 9: Pengelolaan keuangan dan BMN yang efisien, efektif dan akuntabel

Kode	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Nilai
9a-CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran KPPN	95,5%	95,93%	100,45
9b-N	Nilai Kualitas LK tingkat UAKPA dan UAKPB	82	96	117,07
9c-N	Persentase pengelolaan BMN yang optimal	100%	108%	108

Uraian mengenai IKU tersebut adalah sebagaimana berikut:

9a-N Persentase kualitas pelaksanaan anggaran KPPN

Unsur yang diukur terdiri dari 2 komponen penilaian yaitu komponen hasil dan komponen proses. Komponen hasil dinilai dari 4 indikator yaitu capaian keluaran, efisiensi, konsistensi, dan penyerapan anggaran atas pagu netto, sedangkan komponen proses dinilai dari 10 indikator yaitu penyelesaian tagihan, data kontrak, pengelolaan UP, perencanaan kas, rekon LPJ Bendahara, pengembalian SPM, retur SP2D, retur DIPA, pagu minus, dan dispensasi SPM.

Penilaian IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Kementerian Keuangan secara keseluruhan meliputi 60% komponen hasil dan 40% komponen proses.

Target IKU Tahun 2021

Target IKU tersebut sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak Kinerja Kemenkeu Three Kepala KPPN Painan Tahun 2021 adalah 95,5%. Perhitungan polarisasi data menggunakan maximize (semakin tinggi realisasi terhadap target maka semakin baik capaian kerjanya) dan jenis konsolidasi periode menggunakan take last known value (realisasi yang digunakan adalah angka periode terakhir).

Realisasi dan target tahun 2021

Realisasi IKU Persentase kualitas pelaksanaan anggaran KPPN Tahun 2021 adalah 95.93%. Persentase tersebut diperoleh dari nilai IKPA dengan bobot 40% dan nilai SMART dengan bobot 60%..

Perbandingan realisasi dan target IKU Persentase kualitas pelaksanaan anggaran KPPN dapat ditunjukkan pada Tabel

Perbandingan realisasi dan target tahun 2021

T/R	Q1	Q2	Smt.1	Q3	Sd. Q3	Q4	Y-21	Pol /KP
Target	95,5 %	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	

Realisasi	99,40 %	99,79 %	99,79 %	99,80 %	99,80 %	95,93%	95,93%	Max / Average
Capaian	104,08	104,5	104,5	104,5	104,5	100,45	100,45	

Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.47, nilai realisasi tahunan IKU sebesar 95,93% tersebut melampaui target IKU sebesar 95,5% dengan nilai capaian 100,45 yang ditetapkan dalam Kontrak Kinerja Kemenkeu-*three* Kepala KPPN Painan tahun 2021. Selain itu, setiap realisasi triwulanan juga melampaui target *trajectory* triwulanan yang telah ditetapkan.

Perbandingan Realisasi IKU tahun 2021 dan tahun sebelumnya

Realisasi IKU pada tahun 2020 adalah 95,09% sedangkan pada tahun 2021 realisasi IKU mencapai 95,93%. Hal ini menunjukkan terjadinya peningkatan realisasi IKU dari tahun 2020 ke tahun 2021 sebesar 0,84%. Perbandingan antar triwulan capaian IKU tersebut untuk tahun 2021 dan 2020 dapat ditunjukkan pada tabel

Perbandingan Capaian IKU *Persentase Kinerja Pelaksanaan Anggaran K/L*
Tahun 2020 dan 2021

Tahun	Realisasi							Target Tahunan
	Trw I	Trw II	Smt I	Trw III	S.d. Trw III	Trw IV	Tahun	
2020	N/A	N/A	N/A	100%	100%	95,09 %	95,09 %	95%
2021	99,40 %	99,79 %	99,79 %	99,80 %	99,80 %	95,93 %	95,93 %	95,5%
Selisih	N/A	N/A	N/A	-0,2%	-0,2%	0,84%	0,84%	0,5%

Isu, permasalahan, tindakan, dan action plan

Unsur yang diukur terdiri dari 2 komponen penilaian yaitu komponen hasil dan komponen proses. Komponen hasil dinilai dari 4 indikator yaitu capaian keluaran, efisiensi, konsistensi, dan penyerapan anggaran atas pagu netto, sedangkan komponen proses dinilai dari 10 indikator yaitu penyelesaian tagihan, data kontrak, pengelolaan UP, perencanaan kas, rekon LPJ Bendahara, pengembalian SPM, retur SP2D, retur DIPA, pagu minus, dan dispensasi SPM. Penilaian IKU *Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Kementerian Keuangan* secara keseluruhan meliputi 60% komponen hasil dan 40% komponen proses.

Tindakan yang telah dilaksanakan selama tahun 2021 :

1. Percepatan realisasi belanja modal
2. Melakukan optimalisasi pelaksanaan kegiatan dengan berfokus pada pemenuhan capaian output, efisiensi dan penyerapan anggaran.

Rekomendasi rencana aksi :

1. Meminta kepada masing-masing kepala Seksi untuk menyusun kembali rencana kegiatan untuk mempercepat capaian keluaran riil.
2. Menjaga konsistensi penyerapan anggaran sesuai dengan halaman III DIPA. Menjaga nilai IKPA agar dapat mencapai nilai maksimal pada masing-masing indikator.

**9b-
N** Nilai
kualitas LK
tingkat
UAKPA dan
UAKPB

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 222/PMK.05/2016 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.

Satuan kerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) dan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan wajib menyampaikan Laporan Keuangan tingkat UAKPA dan UAKPB kepada Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W) dan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah (UAPPB-W) Ditjen Perbendaharaan. IKU ini digunakan untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan tingkat UAKPA dan UAKPB lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan dengan dilakukan penilaian laporan Keuangan tingkat UAKPA dan UAKPB yang meliputi: kriteria:

1. Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan
2. Keakuratan data laporan keuangan
3. Kepatuhan pelaksanaan anggaran
4. Penyajian Laporan Keuangan
5. Partisipasi dan
6. Laporan BMN.

Sebagai bentuk apresiasi terhadap upaya-upaya peningkatan kualitas pengelolaan kinerja di lingkungan Ditjen Perbendaharaan, Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan melaksanakan penilaian terhadap pelaksanaan pengelolaan kinerja di unit masing-masing.

*Target IKU
Tahun 2021*

Target IKU tersebut sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak Kinerja Kemenkeu Three Kepala KPPN Painan Tahun 2021 adalah 82. Perhitungan polarisasi data menggunakan maximize (semakin tinggi realisasi terhadap target maka semakin baik capaian kinerjanya) dan jenis konsolidasi periode menggunakan take last known value (realisasi yang digunakan adalah angka periode terakhir).

Realisasi dan target tahun 2021

Realisasi IKU Persentase kualitas pelaksanaan anggaran KPPN Tahun 2021 adalah 96.

Perbandingan realisasi dan target IKU Nilai kualitas LK tingkat UAKPA dan UAKPB dapat ditunjukkan pada Tabel

Perbandingan realisasi dan target tahun 2021

T/R	Q1	Q2	Smt.1	Q3	Sd. Q3	Q4	Y-21	Pol /KP
Target	-	-	-	-	-	82	82	Max / TLK
Realisasi	-	-	-	-	-	96	96	
Capaian	-	-	-	-	-	117,07	117,07	

Perbandingan Realisasi IKU tahun 2021 dan tahun sebelumnya

Perbandingan realisasi dan target tahun 2020 dan tahun 2021

Rincian IKU	Target	Capaian
Nilai kualitas LK tingkat UAKPA dan UAKPB (2021)	82	96
Nilai kualitas LK tingkat UAKPA dan UAKPB (2020)	81	91

Isu, permasalahan, tindakan, dan action plan

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 222/PMK.05/2016 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Satuan kerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Painan selaku unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) dan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) wajib menyampaikan Laporan Keuangan tingkat UAKPA dan UAKPB kepada Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W) dengan Laporan Keuangan yang berkualitas.

Tindakan yang telah dilaksanakan selama tahun 2020 adalah fokus dalam menyusun Laporan Keuangan Semester I dan Triwulan III dan menyampaikan Laporan Keuangan tingkat UAKPA dan UAKPB kepada Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W) dengan Laporan Keuangan yang berkualitas.

Rekomendasi rencana aksi :

Menyiapkan data pendukung untuk kelengkapan Laporan Keuangan Tahun 2020.

9c-CP **Tingkat kualitas pengelolaan BMN**

Kualitas pengelolaan BMN dan Pengadaan di tahun 2021 berfokus Rencana Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Penghapusan, Penertiban administrasi rumah negara dan digitalisasi pengelolaan BMN. IKU ini diukur melalui beberapa komponen yakni persentase kesesuaian pelaksanaan RP4

(Rencana Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Penghapusan), Indeks ketepatan waktu penyampaian RP4 BMN, Persentase penyelesaian penertiban rumah negara, Indeks Kelengkapan Data Rumah Negara pada Profil Master Aset, Persentase Digitalisasi Pengelolaan BMN, Persentase Rekomendasi Optimalisasi Aset Terindikasi Idle Kementerian Keuangan yang Ditindaklanjuti, dan Indeks Kepatuhan Pengisian RUP.

Target IKU Tahun 2021

Target IKU tersebut sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak Kinerja Kemenkeu Three Kepala KPPN Painan Tahun 2021 adalah 100%. Perhitungan polarisasi data menggunakan maximize (semakin tinggi realisasi terhadap target maka semakin baik capaian kerjanya) dan jenis konsolidasi periode menggunakan take last known value (realisasi yang digunakan adalah angka periode terakhir).

Realisasi dan target tahun 2021

Realisasi IKU Tingkat kualitas pengelolaan BMN Tahun 2021 adalah 100%. Perbandingan realisasi dan target IKU Tingkat kualitas pengelolaan BMN dapat ditunjukkan pada Tabel 3.47.

TABEL 3.47
Perbandingan realisasi dan target tahun 2021

T/R	Q1	Q2	Smt.1	Q3	Sd. Q3	Q4	Y-21	Pol /KP
Target	-	30%	30%	-	30%	100%	100%	Max / TLK
Realisasi	-	42,81 %	42,81 %	-	42,81 %	108%	108%	
Capaian	-	120	120	-	120	108	108	

Perbandingan Realisasi IKU tahun 2021 dan tahun 2020

IKU ini merupakan IKU baru sehingga tidak dapat dibandingkan dengan realisasi tahun 2020.

Isu, permasalahan, tindakan, dan action plan

Penghitungan untuk IKU ini adalah Pelaksanaan RP4, Ketepatan Waktu Penyampaian RP4, Persentase penyelesaian penerbitan rumah Negara, Penginputan data di aplikasi SIMAN, persentase jumlah tindak lanjut terhadap BMN dihentikan penggunaannya, dan persentase rekomendasi optimalisasi aset terindikasi idle.

Pada Semester I, KPPN Painan melakukan reklasifikasi rumah negara sehingga data rumah negara pada SIMAN perlu dilakukan perekaman ulang.

1. Tindakan RP4 telah dilaksanakan dan disampaikan tepat waktu

2. Menginput data BMN di SIMAN
3. Telah mengusulkan PSG dan HDNo

10. Sasaran Strategis 10:	Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan yang andal adalah sistem informasi terintegrasi yang mengelola dan mengolah berbagai jenis input data dan informasi (resources) keuangan menjadi hasil keluaran (output) real time data dan informasi keuangan yang konsisten dalam rangka membantu para pengambil kebijakan pada unit-unit organisasi lingkup Kemenkeu dan Kementerian/Lembaga lainnya untuk mengambil keputusan dalam rangka pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel.
Sistem informasi dan teknologi yang andal	Sistem 9: Pengelolaan keuangan dan BMN yang efisien, efektif dan akuntabel

SS 10: Sistem informasi dan teknologi yang andal

Capaian IKU pada Sasaran Strategis Sistem informasi dan teknologi yang andal

Kode	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Nilai
10a-N	Persentase penyelesaian implementasi Rencana Sistem Manajemen Keamanan Informasi	80%	100%	120

Target IKU Tahun 2021

Target IKU tersebut sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak Kinerja Kemenkeu Three Kepala KPPN Painan Tahun 2021 adalah 80%. Perhitungan polarisasi data menggunakan maximize (semakin tinggi realisasi terhadap target maka semakin baik capaian kinerjanya) dan jenis konsolidasi periode menggunakan take last known value (realisasi yang digunakan adalah angka periode terakhir).

Realisasi dan target tahun 2021

Realisasi IKU Persentase penyelesaian implementasi Rencana Sistem Manajemen Keamanan Informasi Tahun 2021 adalah 100%. Perbandingan realisasi dan target IKU Tingkat kualitas pengelolaan BMN dapat ditunjukkan pada Tabel

Perbandingan realisasi dan target tahun 2021

T/R	Q1	Q2	Smt.1	Q3	Sd. Q3	Q4	Y-21	Pol /KP
Target	-	30%	30%	-	30%	80%	80%	Max / TLK
Realisasi	-	66,67 %	66,67 %	-	66,67 %	100%	100%	
Capaian	-	120	120	-	120	100%	100%	

Perbandingan Realisasi IKU tahun 2021 dan tahun 2020

IKU ini merupakan IKU baru sehingga tidak dapat dibandingkan dengan realisasi tahun 2020.

Isu, permasalahan, tindakan, dan action plan

Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) adalah sistem manajemen yang meliputi kebijakan, organisasi, perencanaan, penanggung jawab, proses, dan sumber daya yang mengacu pada pendekatan risiko bisnis untuk menetapkan, mengimplementasikan, mengoperasikan, memantau, mengevaluasi, mengelola, dan meningkatkan keamanan informasi.

Untuk menjamin penerapan Rencana SMKI melalui pengendalian keamanan informasi sesuai Per-1/PB/2021 di lingkup Kanwil DJPb dan KPPN telah dijalankan dengan baik.

Tindakan Yang Telah Dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Telah memonitoring hal yang perlu dilakukan berdasarkan checklist kegiatan rencana MSKI.
2. Telah melaksanakan 9 kegiatan dari total 9 kegiatan.

Inisiatif Strategis KPPN Painan tahun 2021

Inisiatif Strategis KPPN Painan tahun 2021 diperlukan untuk membantu pencapaian sasaran strategis SDM yang kompetitif dan organisasi yang kondusif. Terdapat lima Inisiatif Strategis Kepala KPPN Painan tahun 2021 sebagaimana berikut

Inisiatif Strategis Kepala KPPN Painan Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Inisiatif Strategis	Output / Outcome	Target Waktu Penyelesaian	Status	Keterangan
1.	Organisasi dan SDM yang optimal dan berkinerja tinggi	Tingkat Implementasi <i>Learning Organization</i> pada Unit Kerja	Pemenuhan indikator-indikator pengukuran tingkat implementasi <i>Learning Organization</i> dengan metode <i>self assessment</i>	Januari s.d Desember 2021	Selesai	Melaksanakan 8 indikator sesuai dengan prinsip <i>Learning Organization</i> , yaitu: 1. Pembuatan dan pemanfaatan dokumen pengetahuan 2. Pelaksanaan <i>self learning</i> 3. Pelaksanaan <i>structured learning</i> 4. Pelaksanaan <i>social learning</i> 5. Pelaksanaan <i>learning while working</i> 6. Pejabat sebagai <i>coach, mentor, dan counselor</i> 7. Pejabat sebagai narasumber 8. Pejabat sebagai <i>learning participant</i> Sampai dengan triwulan IV, nilai <i>learning organization</i> KPPN Painan telah mencapai 94,58.
2.	Pelaksanaan anggaran yang efektif dan efisien	Penyusunan Laporan RPA Tingkat KPPN	Tersusunnya Laporan RPA Tingkat KPPN	Januari s.d Desember 2021	Selesai	Penyusunan laporan RPA semester I telah dilaksanakan dan disampaikan pada 29 Juli 2021.
3.	Pelaksanaan anggaran yang efektif dan efisien	Pelaksanaan FGD DAK Fisik dan Dana Desa dengan Pemerintah Daerah	Meningkatkan koordinasi dalam rangka kelancaran penyaluran dana desa	Semester I 2021	Selesai	Rapat Koordinasi/FGD telah dilaksanakan pada: 1. Senin, 25 Januari 2021 sesuai Undangang nomor UND-2/WPB.03/KP.06/2021 dengan peserta: KPPN, Kepala BPKD, dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan PPKB dengan materi persiapan penyaluran dana desa tahun 2021 di aula KPPN. 2. Selasa, 26 Januari 2021 sesuai dengan Undangang nomor UND-3/WPB.03/KP.06/2021 dengan peserta: KPPN, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan PPKB, serta wali nagari dengan materi sosialisasi PMK nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa melalui <i>zoom meeting</i> . 3. Rabu, 17 Maret 2021 sesuai dengan Undangang Nomor UND-9/WPB.03/KP.06/2021 dengan Peserta: KPPN, Badan Pengelola Keuangan Daerah dan Inspektur Daerah, dan Kepala Diknas Teknis Pengelola DAK Fisik dengan materi persiapan penyaluran Dana Desa tahun 2021 sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.07/2019 melalui <i>zoom meeting</i> .

LAIN-LAIN

Pada Capaian Kinerja Organisasi KPPN Painan tahun 2021, tidak seluruh IKU dapat menggambarkan pencapaian dari Renstra Ditjen Perbendaharaan tahun

2020-2024 dikarenakan keterbatasan jumlah IKU yang tercantum dalam Kontrak Kinerja Kemenkeu Three Kepala KPPN, sebagaimana ketentuan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 467/KMK.01/2014 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan. Namun demikian, dalam setiap *refinement* Peta Strategi dan IKU Kepala KPPN tiap tahunnya tetap mengacu pada dokumen Renstra Ditjen Perbendaharaan tahun 2021, Renja Ditjen Perbendaharaan, dan dokumen perencanaan lainnya.

B. REALISASI 1. Realisasi DIPA KPPN Painan tahun 2021

SI

ANGGAR

AN

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2021, realisasi penyerapan DIPA KPPN Painan sebesar Rp1.275.727.771 atau mencapai 99,70% dari total pagu sebesar Rp1.279.534.000

Seluruh kegiatan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Painan terdiri atas 3 (tiga) jenis belanja. Untuk realisasi per jenis belanja pada tahun 2021, realisasi belanja pegawai mencapai sebesar Rp156.595.000 (99,96%) dari pagu sebesar Rp156.650.000, belanja barang mencapai sebesar Rp885.232.771 (99,57%) dari pagu sebesar Rp888.984.000 dan belanja modal sebesar Rp233.900.000 (100%) dari pagu sebesar Rp233.900.000. Adapun rincian realisasi per jenis belanja selama periode 2021 dan 2020 dapat ditunjukkan pada Tabel 3.50.

TABEL 3.50

Realisasi KPPN Painan Tahun Anggaran 2021 dan 2020 per Jenis Belanja

Jenis belanja	Tahun 2021		
	Pagu (Rp)	Realisasi	Persentase
Belanja Pegawai	156.650.000	156.595.000	99,96
Belanja Barang	888.984.000	885.232.771	99,57
Belanja Modal	233.900.000	233.900.000	100
Jumlah	1.279.534.000	1.275.727.771	99,70

Jenis belanja	Tahun 2020		
	Pagu (Rp)	Realisasi	Persentase
Belanja Pegawai	182.265.000	170.406.000	93,49
Belanja Barang	971.399.000	920.263.693	94,74
Belanja Modal	352.408.000	352.176.400	99,93
Jumlah	1.506.072.000	1.442.846.093	95,81

2. Perbandingan Pagu DIPA dan Realisasi DIPA KPPN Painan TA 2021 per Kegiatan

Berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Painan, pada tahun anggaran (TA) 2021 KPPN Painan telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut ini ditunjukkan pada Tabel 3.51 :

TABEL 3.51
Realisasi DIPA KPPN Painan Tahun Anggaran 2021 per Kegiatan

Kode	Program / Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
CD	Program: Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko			
CD.4803	Monev Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko	300.000	0	0
CD.6212	Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi	19.280.000	19.136.000	99,25
CD.6213	Monev Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko	3,308,000	3,308,000	100
CD.6214	Pengelolaan Kas dan Pembiayaan Negara	1,400,000	1,360,000	97,14
CD.6215	Penyelenggaraan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Negara	1,000,000	990,600	99,06
WA	Program: Dukungan Manajemen			
WA.4715	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	1,081,087,000	1,080,558,071	99,95
WA.4718	Pengelolaan komunikasi dan informasi publik	10,000,000	9,057,100	90,57
WA.4719	Pengelolaan Organisasi dan SDM	163,159,000	161,318,000	98,87

3. Analisis Efisiensi Penggunaan atas Sumber Daya

Analisis Efisiensi

Pada Masa Pandemi *Covid-19*, efisiensi belanja barang persediaan konsumsi dan belanja bahan sulit dilakukan. Hal ini terkait dengan layanan *online e-spm* dimana

Penggunaan atas Sumber Daya KPPN harus mencetak SPM beserta lampiran bukti dukung, sehingga belanja supplies computer dan kertas tetap tinggi. Sementara pada belanja perjalanan dinas tidak banyak realisasi karena digantikan melalui *video conference* maupun media online lainnya. Pada tahun 2021, efisiensi pelaksanaan kegiatan memperoleh nilai 5,48 dari aplikasi SMART.

CAPAIAN NILAI IKPA SATKER KPPN PAINAN TAHUN 2021

Nilai IKPA			99.84%
1	Pengelolaan UP	8%	8.00%
2	Data Kontrak	10%	1.00%
3	Kesalahan SPM	5%	5.00%
4	Retur SP2D	5%	5.00%
5	Hal III DIPA	5%	4.94%
6	Revisi DIPA	5%	5.00%
7	Penyelesaian Tagihan	10%	10.00%
8	Konfirmasi Capaian Output	17%	17.00%
9	Rekon LPJ	5%	5.00%
10	Renkas	0%	0.00%
11	Realisasi	15%	14.91%
12	Pagu Minus	5%	5.00%
13	Dispensasi SPM	5%	5.00%
Nilai IKPA		95%	94.85%

CAPAIAN NILAI SMART SATKER KPPN PAINAN TAHUN 2021

No	Indikator	Nilai
1	Penyerapan Anggaran	99.70
2	Konsistensi	97.44
3	Capaian Keluaran	100.00
4	Efisiensi	5.48
	Nilai EKA	93.33

PERHITUNGAN IKU PERSENTASE KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN SATKER KPPN PAINAN TAHUN 2021

A. Capaian IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Tahun 2021

Indikator IKU Kualitas Pelaksanaan Anggaran	Bobot	Capaian Triwulan IV
---	-------	---------------------

A. NILAI IKPA			100.00%
1	Pengelolaan UP	8%	8.00%
2	Data Kontrak	10%	1.00%
3	Kesalahan SPM	5%	5.00%
4	Retur SP2D	5%	5.00%
5	Hal III DIPA	5%	4.94%
6	Revisi DIPA	5%	5.00%
7	Penyelesaian Tagihan	10%	10.00%
8	Konfirmasi Capaian Output	17%	17.00%
9	Rekon LPJ	5%	5.00%
10	Renkas	0%	0.00%
11	Realisasi	15%	14.91%
12	Pagu Minus	5%	5.00%
13	Dispensasi SPM	5%	5.00%
TOTAL Nilai IKPA		95	94.85
B. NILAI SMART			93.33
NILAI CAPAIAN IKU PKPA Q4 (TOTAL CAPAIAN/TOTAL BOBOT)			95,93

B. Identifikasi Isu Utama, Akar Masalah, Rencana Tindakan dan Aksi

4. Isu Utama

Konsistensi, halaman III DIPA dan penyerapan anggaran belum mencapai nilai yang maksimal

5. Akar masalah

Realisasi belanja yang tidak sesuai dengan rencana setiap bulan

6. Rencana Tindakan

Menyusun kebutuhan belanja pada awal bulan, berkoordinasi dengan seksi lain terkait pelaksanaan RKT serta memonitoring progress RKT setiap bulannya agar sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

7. Aksi

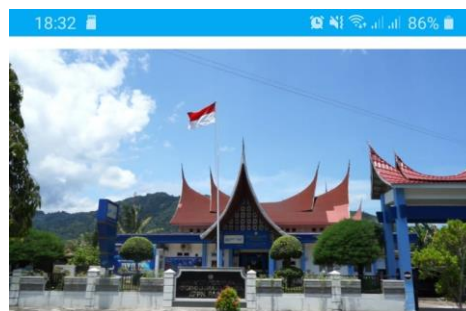
Menyusun rencana kinerja tahunan (RKT)

C. Kinerja Lainnya

Selain Kinerja Lainnya dan Realisasi Anggaran sebagaimana diuraikan pada huruf A dan B diatas, Capaian Kinerja Lainnya yang dicapai oleh KPPN Painan pada tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Inovasi Manajemen/Pelayanan

a. Santiang



PENGAJUAN SPM UP	PENGAJUAN SPM TUP	PENGAJUAN SPM LS
PENGAJUAN GUP, PTUP, & NIHIL	PENGESAHAN SKPP & PENONAKTIFAN SUPPLIER	PENGESAHAN HIBAH UANG
KOREKSI/ RALAT SPM	PENGAJUAN KIPS	PENGAJUAN PIN PENANDA TANGANAN SPM
DISPENSASI	UPDATE/ PERUBAHAN SUPPLIER	UPDATE/ PERUBAHAN KONTRAK
IZIN REKENING	PENYETORAN KE KAS NEGARA	KONFIRMASI SETORAN

Santiang merupakan sebuah pengembangan dari inovasi “*touchscreen* sistem” yang berfungsi untuk menampilkan peraturan dan layanan KPPN. Sebelumnya, inovasi ini menggunakan layar *touchscreen* yang ditempatkan di *front office* sehingga Satuan Kerja dapat dengan mudah mengakses informasi ketika berada di KPPN. Namun semenjak pelayanan dilaksanakan tanpa tatap muka, Satuan Kerja tidak dapat mengakses layanan ini. Oleh karena itu, KPPN mengembangkan inovasi

tersebut menjadi aplikasi berbasis android sehingga Satuan Kerja dapat mengaksesnya dari mana pun. Selain itu pada aplikasi ini juga

tersedia *link* ke beberapa aplikasi yang digunakan oleh Satuan Kerja seperti aplikasi omspan, e-rekon LK, sprint, dll.

2. Inisiatif Pemberantasan Korupsi

a. Pelaksanaan Pelatihan Kerangka Penguatan Integritas

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor KEP-253/PB/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kerangka Penguatan Integritas Direktorat Jenderal Perbendaharaan, seluruh pejabat dan pegawai di Lingkungan DJPb harus mempunyai komitmen tinggi untuk mewujudkan penguatan integritas melalui pelaksanaan pelatihan kerangka penguatan integritas.

Pelatihan tersebut dilaksanakan di aula KPPN Painan mulai tanggal 4-18 Agustus 2021 dengan narasumber Kepala Seksi Veraki yang telah mengikuti *Training of Trainer Integrity Framework* Ditjen Perbendaharaan. Setiap harinya, para peserta mengerjakan evaluasi untuk materi berkenaan melalui aplikasi training dan mengirimkan nilai hasil evaluasi ke narasumber. Para peserta mengikuti proses pembelajaran dengan 10 instrumen, yaitu:

- 1) Kode Etik dan Kode Perilaku;
- 2) Pengendalian Internal;
- 3) Budaya Egaliter;
- 4) Pengelolaan Atas Konflik Kepentingan
- 5) Pengadaan Barang dan Jasa;
- 6) Modernisasi dan Inovasi Proses Bisnis Layanan Perbendaharaan;
- 7) Program Deteksi Kecurangan (*Red Flags*);
- 8) Pencatatan (*Record Keeping*);
- 9) Manajemen Pengaduan dan Perlindungan *Whistleblower*; dan
- 10) Reviu Independen UKI-E1,



b. Penandatanganan Pakta Integritas dan Komitmen Pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi

Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, setiap PNS memiliki kewajiban dan larangan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar akan mendapatkan hukuman disiplin. Salah satu upaya penegakan disiplin yaitu internalisasi melalui penandatanganan pakta integritas dan komitmen pelaksanaan pengendalian gratifikasi.

Penandatanganan pakta integritas diikuti oleh seluruh pegawai yang diperbarui pada setiap awal tahun dan dalam hal terjadi perubahan jabatan/ unit kerja pegawai yang bersangkutan.



c. Gugus Kendali Mutu (GKM) Penegakan Disiplin PNS

Disiplin PNS telah diatur melalui Peraturan Pemerintah nomor 94 tahun 2021. Dalam peraturan tersebut telah ditetapkan hal yang menjadi kewajiban, larangan, dan hukuman disiplin bagi PNS.

Dalam upaya meningkatkan disiplin pegawai, KPPN Painan telah melaksanakan GKM Penegakan Disiplin PNS pada 23 September 2021 di aula. Melalui GKM ini, Kepala Kantor beserta Kepala Seksi VeraKI mengingatkan kembali 17 kewajiban, 15 larangan, dan jenis hukuman disiplin. Penegakan Disiplin merupakan upaya dalam mendorong/membina pegawai untuk memenuhi ketentuan disiplin yang telah ditetapkan guna menjamin terpeliharanya tata tertib dalam kelancaran pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan organisasi, mendorong profesionalitas serta meningkatkan kinerja organisasi.



3. Penghargaan-penghargaan

a. Re-sertifikasi Sistem Manajemen Mutu (SMM) ISO 9001:2015

Proses penjaminan mutu pada KPPN melalui penerapan SMM ISO 9001:2015 merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh KPPN yang dirancang, dijalankan, dan diperbaiki secara berkesinambungan untuk menghasilkan layanan yang sesuai dengan harapan mitra kerja dan standar internasional serta tetap meningkatkan kualitas layanan sejalan dengan meningkatnya kebutuhan terhadap pengelolaan administrasi publik yang baik.

Pada tahun 2018, KPPN Painan telah memperoleh sertifikat SMM ISO 9001:2015 yang berlaku selama 3 tahun sehingga pada tahun 2021 perlu dilakukan re-sertifikasi untuk perpanjangan masa berlaku sertifikat. Re-sertifikasi pada tahun 2021 dilakukan dengan audit sampling terhadap 12 KPPN yang telah ditentukan oleh badan sertifikasi, salah satunya adalah KPPN Painan.



Apabila KPPN sampling lulus audit, maka seluruh KPPN akan mendapat sertifikat. Namun, apabila terdapat KPPN sampel yang tidak lulus, maka sertifikat ISO seluruh KPPN gagal diperpanjang.

Re-sertifikasi pada KPPN Painan dilaksanakan pada tanggal 30 Juli 2021 dengan hasil *zero finding* atau tidak terdapat temuan mayor/minor sehingga sertifikat SMM ISO dapat tetap dipertahankan.

b. Ketuntasan Terbaik EUT SAKTI Lingkup Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Barat

Prestasi lainnya yang berhasil diraih oleh KPPN Painan yaitu Ketuntasan Terbaik EUT SAKTI di Lingkup Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 6-17 September 2021.

Pengembangan dan implementasi SAKTI merupakan salah satu program prioritas nasional dalam upaya meningkatkan kualitas pengelolaan APBN melalui integrasi seluruh sistem aplikasi pengelolaan keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga (K/L), mulai dari tahap penganggaran sampai dengan tahap pelaporan. Program ini mulai diimplementasikan pada tahun 2022 oleh seluruh satuan kerja. Oleh karena itu, pendampingan KPPN dalam mengawal implementasi SAKTI *full* modul kepada seluruh satuan kerja sangatlah dibutuhkan.



c. Peringkat Pertama Laporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Bendahara Umum Negara (UAKBUN) Daerah Tahun 2020

UAKBUN adalah unit akuntansi Kuasa BUN yang melakukan kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan tingkat KPPN. KPPN selaku UAKBUN-Daerah menyusun Laporan Keuangan yang disampaikan kepada UAKKBUN-Kanwil. Penilaian LK *unaudited* berkontribusi sebesar 70% dan *audited* sebesar 30%. Untuk mewujudkan kualitas penyusunan LK pada KPPN, Kanwil DJPb memberikan penilaian terhadap Kualitas LK berdasarkan empat kriteria, yaitu:

- 1) akurasi data (70%);
- 2) ketepatan waktu (2%);

- 3) kelengkapan (3%); dan
- 4) Tingkat Partisipasi (25%).



BAB IV

PENUTUP

**BAB IV
PENUTUP**

Laporan Kinerja (LAKIN) Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Painan Tahun 2021 merupakan bentuk pertanggungjawaban pencapaian visi misi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Painan dalam tahun anggaran 2021 dan disusun berdasarkan Rencana Kinerja Tahunan yang ditetapkan pada awal tahun anggaran sekaligus sebagai perwujudan pelaksanaan Peraturan Presiden nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

KPPN Painan merupakan salah satu instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang bertanggung jawab kepada Kanwil DJPb Provinsi Sumatera yang memiliki tugas dan fungsi yang beragam. Hal ini mengingat bahwa sebagai hasil reorganisasi di lingkungan Kementerian Keuangan yang merupakan bagian dari pelaksanaan reformasi manajemen keuangan negara. Keberagaman tugas dan fungsi tersebut menjadikan KPPN Painan memiliki peran yang strategis terhadap keberhasilan pencapaian tugas Direktorat Jenderal Perbendaharaan secara keseluruhan.

Pencapaian kinerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Painan pada tahun 2021 telah sesuai dengan target yang ditetapkan di mana seluruh IKU telah mencapai target yang ditentukan. Kinerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Painan pada tahun 2021 yang dapat dinilai sebagai sebuah prestasi adalah Nilai Kinerja Organisasi KPPN Painan yang diukur berdasarkan pengelolaan kinerja berbasis balance scorecard (BSC) mencapai 108.83 dari total 20 IKU, seluruhnya telah mencapai target yang telah ditetapkan.

Meskipun realisasi seluruh IKU telah mencapai targetnya, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Painan secara berkelanjutan berusaha mengatasi segala permasalahan yang terdapat pada pencapaian setiap IKU untuk terus meningkatkan kinerja secara optimal.

Dengan disusunnya LAKIN ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan baik kepada pimpinan Kementerian Keuangan maupun seluruh pihak yang terkait dengan tugas dan fungsi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara sehingga dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dalam rangka peningkatan kinerja pada periode mendatang.

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1

PERJANJIAN KINERJA (KONTRAK KINERJA) TAHUN 2021



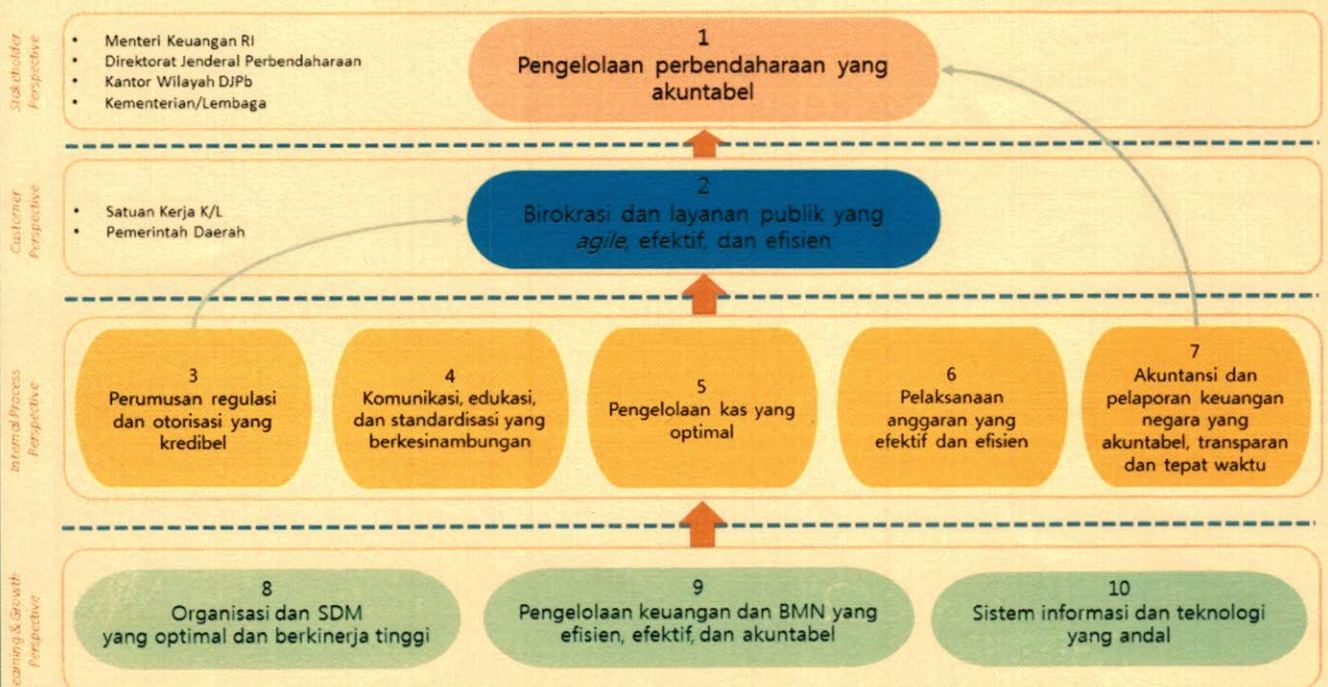
KONTRAK KINERJA
NOMOR : 142/PB.12/2021
KEPALA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA
PAINAN
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL
PERBENDAHARAAN PROVINSI SUMATERA BARAT
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2021

Pernyataan Kesanggupan

Dalam melaksanakan tugas sebagai Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Painan, saya akan:

1. Melaksanakan tugas dan fungsi dengan penuh kesungguhan untuk mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam Kontrak Kinerja ini.
2. Bersedia untuk dilakukan evaluasi atas capaian kinerja kapanpun diperlukan.
3. Menerima segala konsekuensi atas capaian kinerja sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Peta Strategi




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PAINAN

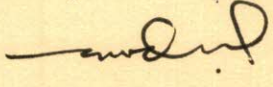
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pengelolaan perbendaharaan yang akuntabel	1a-N Nilai kualitas LK Kuasa BUN KPPN	94
2.	Perumusan regulasi dan otorisasi yang kredibel	2a-N Persentase penyelesaian SP2D secara tepat waktu	99,4%
3.	Komunikasi, edukasi, dan standarisasi yang berkesinambungan	3a-N Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	87,5
		3b-N Persentase tingkat implementasi standarisasi kompetensi pejabat perbendaharaan	30%
		3c-CP Persentase tingkat implementasi Aplikasi SAKTI	100%
4.	Pengelolaan kas yang optimal	4a-CP Persentase akurasi perencanaan kas	82%
		4b-N Indeks efektivitas pengelolaan pengeluaran kas	3,15 (skala 4)
5.	Pelaksanaan anggaran yang efektif dan efisien	5a-CP Nilai kinerja pelaksanaan anggaran K/L	89
		5b-CP Nilai kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa	90
		5c-N Tingkat partisipasi pelaporan data capaian output satker	89
6.	Akuntansi dan pelaporan keuangan negara yang akuntabel, transparan, dan tepat waktu	6a-CP Persentase rekonsiliasi tingkat UAKPA secara tepat waktu dan andal	98,1%
		6b-N Persentase LPJ Bendahara yang andal dan tepat waktu	98%
7.	Organisasi dan SDM yang optimal dan berkinerja tinggi	7a-N Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis <i>Strategy Focused Organization</i>	84
		7b-N Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal	83
		7c-N Nilai rata-rata <i>hard competency</i> pegawai	78
8.	Pengelolaan keuangan dan BMN yang efisien, efektif dan akuntabel	8a-CP Persentase kualitas pelaksanaan anggaran KPPN	95,5%
		8b-N Nilai kualitas LK tingkat UAKPA dan UAKPB	82
		8c-N Tingkat kualitas pengelolaan BMN	100%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
9.	Sistem informasi dan teknologi yang andal	9a-N Persentase penyelesaian implementasi Rencana Sistem Manajemen Keamanan Informasi	80%

Program/Kegiatan
 Penyelenggaraan Kuasa Bendahara Umum Negara

Atasan Pimpinan Unit Kerja,


 Heru Pudyono Nugroho
 NIP 197211121998031002

Anggaran
Rp.1.541.693.000
 Painan, 25 Mei 2021
 Pimpinan Unit Kerja,

 Elwy Syahdely
 NIP 196404251985032001

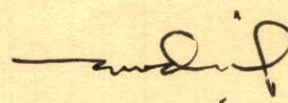
RINCIAN TARGET KINERJA
KEPALA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PAINAN
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI
SUMATERA BARAT
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2021

Kode SS/IKU	Indikator Kinerja Utama	Target						
		Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d.Q ₃	Q4	Y
I	Pengelolaan perbendaharaan yang akuntabel							
1a-N	Nilai kualitas LK Kuasa BUN KPPN	-	-	-	-	-	94	94
II	Perumusan regulasi dan otorisasi yang kredibel							
2a-N	Persentase penyelesaian SP2D secara tepat waktu	-	-	-	99,4%	99,4%	99,4%	99,4%
III	Komunikasi, edukasi, dan standardisasi yang berkesinambungan							
3a-N	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	-	-	-	-	-	87,5	87,5
3b-N	Persentase tingkat implementasi standardisasi kompetensi pejabat perbendaharaan	-	-	-	-	-	30%	30%
3c-CP	Persentase tingkat implementasi Aplikasi SAKTI	-	-	-	70%	70%	100%	100%
IV	Pengelolaan kas yang optimal							
4a-CP	Persentase akurasi perencanaan kas KPPN	-	-	-	82%	82%	82%	82%
4b-N	Indeks efektivitas pengelolaan pengeluaran kas	-	-	-	3,15 (skala 4)	3,15 (skala 4)	3,15 (skala 4)	3,15 (skala 4)
V	Pelaksanaan anggaran yang efektif dan efisien							
5a-CP	Nilai kinerja pelaksanaan anggaran K/L	-	-	-	89	89	89	89
5b-CP	Nilai kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa	-	-	-	90	90	90	90
5c-N	Tingkat partisipasi pelaporan data capaian output satker	-	-	-	89	89	89	89

Kode SS/IKU	Indikator Kinerja Utama	Target						
		Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d.Q ₃	Q4	Y
VI	Akuntansi dan pelaporan keuangan negara yang akuntabel, transparan dan tepat waktu							
6a-CP	Persentase rekonsiliasi tingkat UAKPA secara tepat waktu dan andal	-	-	-	98,1%	98,1%	98,1%	98,1%
6b-N	Persentase LPJ Bendahara yang andal dan tepat waktu	-	-	-	98%	98%	98%	98%
VII	Organisasi dan SDM yang optimal dan berkinerja tinggi							
7a-N	Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis <i>Strategy Focused Organization</i>	-	-	-	-	-	84	84
7b-N	Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal	-	-	-	-	-	83	83
7c-N	Nilai rata-rata <i>hard competency</i> pegawai	-	-	-	-	-	78	78
VIII	Pengelolaan keuangan dan BMN yang efisien, efektif dan akuntabel							
8a-CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran KPPN	-	-	-	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%
8b-N	Nilai kualitas LK tingkat UAKPA dan UAKPB	-	-	-	-	-	82	82
8c-N	Tingkat kualitas pengelolaan BMN	-	-	-	-	-	100%	100%
IX	Sistem informasi dan teknologi yang andal							
9a-N	Persentase penyelesaian implementasi Rencana Sistem Manajemen Keamanan Informasi	-	-	-	-	-	80%	80%

Painan, 25 Mei 2021

PNS yang dinilai,



Elwy Syahdely

NIP 196404251985032001

Sasaran Kerja Pegawai

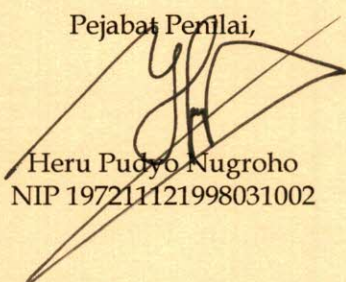
No	I. PEJABAT PENILAI		No	II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI	
1	Nama	Heru Pudy Nugroho	1	Nama	Elwy Syahdely
2	NIP	197211121998031002	2	NIP	196404251985032001
3	Pangkat/ Gol. Ruang	Pembina Utama Muda (IV/c)	3	Pangkat/ Gol. Ruang	Penata TK.I Gol. III/d
4	Jabatan	Kepala Kantor	4	Jabatan	Kepala Kantor
5	Unit Kerja	Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Barat	5	Unit Kerja	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Painan

No	III. KEGIATAN TUGAS POKOK JABATAN	AK	TARGET			
			KUANTITAS/ OUTPUT	KUALITAS/ MUTU	WAKTU	BIAYA
1	Mewujudkan nilai LK Kuasa BUN KPPN yang berkualitas	-	94	100	7 bln	-
2	Menyelesaikan SP2D secara tepat waktu	-	99,4%	100	7 bln	-
3	Mewujudkan efektivitas edukasi dan komunikasi	-	87,5	100	7 bln	-
4	Melaksanakan implementasi standarisasi kompetensi pejabat perbendaharaan	-	30%	100	7 bln	-
5	Melaksanakan implementasi Aplikasi SAKTI	-	100%	100	7 bln	-
6	Mewujudkan akurasi perencanaan kas	-	82%	100	7 bln	-
7	Mewujudkan pengelolaan pengeluaran kas yang efektif	-	3,15 (skala 4)	100	7 bln	-
8	Meningkatkan nilai kinerja pelaksanaan anggaran K/L	-	89	100	7 bln	-
9	Memenuhi nilai kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa	-	90	100	7 bln	-
10	Meningkatkan partisipasi pelaporan data capaian output satker	-	89	100	7 bln	-
11	Mewujudkan rekonsiliasi tingkat UAKPA secara tepat waktu dan andal	-	98,1%	100	7 bln	-

No	III. KEGIATAN TUGAS POKOK JABATAN	AK	TARGET			
			KUANTITAS/ OUTPUT	KUALITAS/ MUTU	WAKTU	BIAYA
12	Mewujudkan LPJ Bendahara yang andal dan tepat waktu	-	98%	100	7 bln	-
13	Memenuhi nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis <i>Strategy Focused Organization</i>	-	84	100	7 bln	-
14	Mewujudkan nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal yang baik	-	83	100	7 bln	-
15	Mewujudkan nilai rata - rata <i>hard competency</i> pegawai KPPN yang baik	-	78	100	7 bln	-
16	Mewujudkan pelaksanaan anggaran di KPPN yang berkualitas	-	95,5%	100	7 bln	-
17	Memenuhi nilai kualitas LK tingkat UAKPA dan UAKPB	-	82	100	7 bln	-
18	Meningkatkan kualitas pengelolaan BMN	-	100%	100	7 bln	-
19	Melaksanakan implementasi Rencana Sistem Manajemen Keamanan Informasi	-	80%	100	7 bln	-

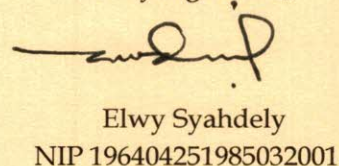
Painan, 25 Mei 2021

Pejabat Penilai,



Heru Pudyo Nugroho
NIP 197211121998031002

PNS yang dinilai,

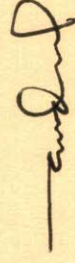


Elwy Syahdely
NIP 196404251985032001

INISIATIF STRATEGIS
KEPALA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PAINAN
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2021

No.	SS/IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
1.	SS: Organisasi dan SDM yang optimal dan berkinerja tinggi	Tingkat Implementasi <i>Learning Organization</i> pada Unit Kerja	Pemenuhan indikator-indikator pengukuran tingkat implementasi <i>Learning Organization</i> dengan metode <i>self assessment</i> Target: Pemenuhan minimal masing-masing indikator <i>self assessment</i> 80%	Q2: Pendokumentasian kegiatan <i>Learning Organization</i>	Q2: 40%	Januari s.d. Desember 2021	Kepala KPPN	-
				Q3: Pendokumentasian kegiatan <i>Learning Organization</i>	Q3: 60%			
				Q4: Pendokumentasian kegiatan <i>Learning Organization</i>	Q4: 80%			
2.	SS: Pelaksanaan anggaran yang efektif dan efisien	Penyusunan Laporan RPA Tingkat KPPN	Tersusunnya Laporan RPA Tingkat KPPN Target: Tersusunnya 1 Laporan RPA Tingkat KPPN tiap semester	Semester II : Penyusunan Laporan RPA Tingkat KPPN Periode Semester I tahun 2021	Laporan	Juli 2021	Kepala KPPN	-

Painan, 25 Mei 2021
PNS yang dimilai,



Elwy Syahdely
NIP 196404251985032001

LAMPIRAN 2

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2021

EVENT CALENDER (KALENDER KEGIATAN) KPPN PAINAN PERIODE TAHUN 2021								REALISASI PELAKSANAAN KEGIATAN KPPN PAINAN TAHUN 2021	
NO.	BULAN	TANGGAL KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	DESKRIPSI EVENT DAN PESERTA	PERKIRAAN DANA	PIC	Tanggal Kegiatan	Nama Kegiatan
1	Januari 2021	Minggu 1	DKO dan Performance Dialogue Pencapaian IKU Triwulan IV Tahun 2020 serta Rapat UPR	Aula KPPN Painan	Diikuti oleh Seluruh Pegawai untuk mengevaluasi Pelaksanaan Kinerja Tahun 2020. Membahas isu-isu strategis organisasi, mengevaluasi capaian IKU, proyeksi capaian dan merumuskan langkah tindak lanjutnya serta Membahas Unit Pengendali Risiko KPPN Painan		Subbag Umum dan Seksi VeraKI		
2		Minggu 1	Penandatanganan Pakta Integritas Tahun 2021 dan Komitmen Anti Gratifikasi	Aula KPPN Painan	Penandatanganan Pakta Integritas dan Komitmen Anti Gratifikasi Tahun 2021 oleh Seluruh Pegawai		Seksi Vera KI		
3		Minggu 2	Rapat Monev Progress WBK/WBBM	Aula KPPN Painan	Rapat Monev Progress WBK/WBBM dihadiri oleh seluruh pegawai		Seksi Vera KI		
4		Minggu 5	Rapat Persiapan Penyaluran Dana Desa Tahun 2021 dengan Pemda	Aula KPPN Painan	Rapat Persiapan Penyaluran Dana Desa Tahun 2021 dengan Pemda	600,000	Seksi Vera KI dan Seksi Bank		
5		Minggu 5	Sosialisasi PMK 222/PB.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa kepada Camat dan Wali Nagari	Melalui Zoom Meeting	Sosialisasi PMK 222/PB.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa kepada Camat dan Wali Nagari		Seksi Vera KI dan Seksi Bank		
6		Minggu 5	GKM Subbagian Umum	Aula KPPN Painan	GKM Pengisian My Task		Subbag Umum		
7		Minggu 5	Penandatanganan Kontrak Kinerja	Aula KPPN Painan	Penandatanganan Kontrak Kinerja Tahun 2021 oleh Seluruh Pegawai		Subbag Umum		
8	Februari 2021	Minggu 1	DKO dan Performance Dialogue Pencapaian IKU Triwulan I (Bulan Januari) Tahun 2021	Aula KPPN Painan	Diikuti oleh Seluruh Pegawai untuk mengevaluasi Pelaksanaan Kinerja Bulan Januari Tahun 2021 Membahas isu-isu strategis organisasi, mengevaluasi capaian IKU, proyeksi capaian dan merumuskan langkah tindak lanjutnya		Subbag Umum		
9		Minggu 1	Rapat Monev Progress WBK/WBBM	Aula KPPN Painan	Rapat Monev Progress WBK/WBBM dihadiri oleh seluruh pegawai		Seksi Vera KI		
10		Minggu 1	GKM Seksi Vera KI	Aula KPPN Painan	GKM tentang Persiapan Pelaksanaan RPT dihadiri oleh seluruh pegawai		Seksi Vera KI		
11		Minggu 2	Bimtek Penyusunan LK UAKPA Audited Satker Mitra KPPN	Aula KPPN Painan	Bimtek Penyusunan LK UAKPA Audited Satker Mitra KPPN	3,000,000	Seksi Vera KI		
12		Minggu 2	Pemilihan Petugas Front Office KPPN Terbaik	Aula KPPN Painan	Pemilihan Petugas Front Office KPPN Terbaik	500,000			
13		Minggu 2	GKM Subbag Umum	Aula KPPN Painan	GKM Subbag Umum		Subbag Umum		
14		Minggu 4	FGD Pejabat Administrator	Aula KPPN Painan	FGD Triwulan I		Kepala Kantor		
15		Minggu 4	Service Excellent dan motivation training	Aula KPPN Painan	Service Excellent dan motivation training	1,240,000	Seksi PDMS		

16	Maret 2021	Minggu 1	DKO dan Performance Dialogue Pencapaian IKU Triwulan I (Bulan Februari Tahun 2021	Aula KPPN Painan	Diikuti oleh Seluruh Pegawai untuk mengevaluasi Pelaksanaan Kinerja Bulan Februari Tahun 2021 Membahas isu-isu strategis organisasi, mengevaluasi capaian IKU, proyeksi capaian dan merumuskan langkah tindak lanjutnya		Subbag Umum		
17		Minggu 1	Rapat Monev Progress WBK/WBBM	Aula KPPN Painan	Rapat Monev Progress WBK/WBBM dihadiri oleh seluruh pegawai		Seksi Vera KI		
18		Minggu 2	GKM Seksi Bank	Aula KPPN Painan	GKM PMK 183/PMK.05/2019 tentang Pengelolaan Rekening Pengeluaran Milik Kementerian/Lembaga		Seksi Bank		
19		Minggu 3	Monev Bank	Bank Mitra Kerja KPPN Painan	Melakukan monev bank/pos persepsi atas layanan penerimaan Negara dan penerapan TNIA	300,000	Seksi Bank		
20		Minggu 3	Pembinaan ke satker	Satuan Kerja	Pembinaan ke Satuan Kerja terkait Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran	600,000	Seksi PDMS		
21		Minggu 4	Bimtek Implementasi Aplikasi SAKTI	Aula KPPN Painan	Bimtek Implementasi Aplikasi SAKTI	2,318,000	Seksi PDMS		
22		Minggu 4	Survey IKM Semester 1	Satuan Kerja	Survey Indeks Kepuasan Masyarakat Semester 1 Tahun 2021. Survey ini dilakukan terhadap seluruh pengguna layanan KPPN untuk mengetahui tingkat kepuasan pelanggan dengan indeks tertentu yang ditetapkan	1,000,000	Seksi PDMS		
23		Minggu 4	GKM Seksi PDMS	Aula KPPN Painan	GKM Seksi PDMS		Seksi PDMS		
24	April 2021	Minggu 1	DKO dan Performance Dialogue Pencapaian IKU Triwulan I (Bulan Maret) Tahun 2021 dan Rapat UPR	Aula KPPN Painan	Diikuti oleh Seluruh Pegawai untuk mengevaluasi Pelaksanaan Kinerja Bulan Maret Tahun 2021 Membahas isu-isu strategis organisasi, mengevaluasi capaian IKU, proyeksi capaian dan merumuskan langkah tindak lanjutnya Serta Pembahasan Unit Pengendali Risiko		Subbag Umum dan Seksi VeraKI		
25		Minggu 1	Rapat Progress WBK/WBBM	Aula KPPN Painan	Rapat Monev Progress WBK/WBBM dihadiri oleh seluruh pegawai		Seksi Vera KI		
26		Minggu 3	Kegiatan KPPN Painan Pedui "Santunan ke Pantu Asuhan"	Panti Asuhan di Painan	Kegiatan KPPN Painan Pedui "Santunan ke Pantu Asuhan"		Kepala Kantor		
27		Minggu 3	GKM Subbag Umum	Aula KPPN Painan	GKM Subbag Umum		Subbag Umum		
28		Minggu 4	GKM Seksi Veraki	Aula KPPN Painan	GKM Seksi Veraki		Seksi Vera KI		

29	Mei 2021	Minggu 1	DKO dan Performance Dialogue Pencapaian IKU Triwulan 2 (Bulan April) Tahun 2021	Aula KPPN Painan	Diikuti oleh Seluruh Pegawai untuk mengevaluasi Pelaksanaan Kinerja Bulan April Tahun 2021 Membahas isu-isu strategis organisasi, mengevaluasi capaian IKU, proyeksi capaian dan merumuskan langkah tindak lanjutnya		Subbag Umum		
30		Minggu 1	Rapat Progress WBK/WBBM	Aula KPPN Painan	Rapat Monev Progress WBK/WBBM dihadiri oleh seluruh pegawai		Seksi Vera KI		
31		Minggu 3	GKM Seksi PDMS	Aula KPPN Painan	GKM Seksi PDMS		Seksi PDMS		
32		Minggu 3	GKM Seksi Bank	Aula KPPN Painan	GKM Seksi Bank		Seksi Bank		
33		Minggu 4	FGD Pejabat Administrstor	Aula KPPN Painan	FGD Triwulan II		Kepala Kantor		
34		Minggu 4	Talkshow di Radio Langkisau FM	di Radio Langkisau	Talkshow tentang Dana Desa		Kepala Kantor		
35		Minggu 4	FGD Penyaluran DAK Fisik	Aula KPPN Painan	FGD Penyaluran DAK Fisik	1,700,000	Seksi Bank		
36	Juni 2021	Minggu 1	DKO dan Performance Dialogue Pencapaian IKU Triwulan 2 (Bulan Juni) Tahun 2021	Aula KPPN Painan	Diikuti oleh Seluruh Pegawai untuk mengevaluasi Pelaksanaan Kinerja Bulan Juni Tahun 2021 Membahas isu-isu strategis organisasi, mengevaluasi capaian IKU, proyeksi capaian dan merumuskan langkah tindak lanjutnya		Subbag Umum		
37		Minggu 1	Rapat Progress WBK/WBBM	Aula KPPN Painan	Rapat Monev Progress WBK/WBBM dihadiri oleh seluruh pegawai		Seksi Vera KI		
38		Minggu 4	Bimtek Implementasi Aplikasi SAKTI	Aula KPPN Painan	Bimtek Implementasi Aplikasi SAKTI	2,318,000	Seksi PDMS		
39		Minggu 2	GKM Subbag Umum	Aula KPPN Painan	GKM Subbag Umum		Subbag Umum		
40		Minggu 3	Monev Kredit Program UMI	Debitur dan LKBP	Melakukan monev terhadap Kredit Program UMI ke Debitur dan LKBP	900,000	Seksi Bank		
41		Minggu 3	Survey kepuasan pengguna layanan internal	KPPN Painan	Survey dilakukan terhadap seluruh pegawai KPPN Painan untuk mengetahui tingkat kepuasan para pegawai terhadap layanan internal KPPN dengan indeks tertentu yang ditetapkan		- Subbag Umum		
42		Minggu 3	GKM Seksi Veraki	Aula KPPN Painan	GKM Seksi Veraki		Seksi Vera KI		
43		Minggu 3	Monev Pelaksanaan Anggaran	Satuan Kerja	Monitoring dan evaluasi ke Satuan Kerja terkait Pelaksanaan Anggaran	600,000	Seksi PDMS		
44		Minggu 4	Monev Bank	Bank Mitra Kerja KPPN Painan	Melakukan monev bank/pos persepsi atas layanan penerimaan Negara dan penerapan TNA	600,000	Seksi Bank		
45		Minggu 4	Talkshow di Radio Langkisau FM	di Radio Langkisau	Talkshow tentang Dana Desa		Kepala Kantor		

46	Juli 2021	Minggu 1	DKO dan Performance Dialogue Pencapaian IKU Triwulan 2 (Bulan Juni) Tahun 2021 dan Rapat UPR	Aula KPPN Painan	Diikuti oleh Seluruh Pegawai untuk mengevaluasi Pelaksanaan Kinerja Bulan Juni Tahun 2021 Membahas isu-isu strategis organisasi, mengevaluasi capaian IKU, proyeksi capaian dan merumuskan langkah tindak lanjutnya Serta Pembahasan Unit Pengendali Risiko		Subbag Umum dan Seksi VeraKI		
47		Minggu 1	Rapat Progress WBK/WBBM	Aula KPPN Painan	Rapat Monev Progress WBK/WBBM dihadiri oleh seluruh pegawai		Seksi Vera KI		
48		Minggu 3	Bimtek Penyusunan LK UAKPA <i>Audited</i> Satker Mitra KPPN	Aula KPPN Painan	Bimtek Penyusunan LK UAKPA <i>Audited</i> Satker Mitra KPPN	3,000,000	Seksi Vera KI		
49		Minggu 3	GKM Seksi Bank	Aula KPPN Painan	GKM Seksi Bank		Seksi Bank		
50		Minggu 3	GKM Seksi PDMS	Aula KPPN Painan	GKM Seksi PDMS		Seksi PDMS		
51		Minggu 4	Pelaksanaan Perbendaharaan Menyapa "DJPb goes to school"	Virtual	Pelaksanaan Perbendaharaan Menyapa "DJPb goes to school"		Kepala Kantor		
52	Agustus 2021	Minggu 1	DKO dan Performance Dialogue Pencapaian IKU Triwulan 3 (Bulan Juli) Tahun 2021	Aula KPPN Painan	Diikuti oleh Seluruh Pegawai untuk mengevaluasi Pelaksanaan Kinerja Bulan Juli Tahun 2021 Membahas isu-isu strategis organisasi, mengevaluasi capaian IKU, proyeksi capaian dan merumuskan langkah tindak lanjutnya Serta Pembahasan Unit Pengendali Risiko		Subbag Umum		
53		Minggu 1	Rapat Progress WBK/WBBM	Aula KPPN Painan	Rapat Monev Progress WBK/WBBM dihadiri oleh seluruh pegawai		Seksi Vera KI		
54		Minggu 2	GKM Subbag Umum	Aula KPPN Painan	GKM Subbag Umum		Subbag Umum		
55		Minggu 3	GKM Seksi Veraki	Aula KPPN Painan	GKM Seksi Veraki		Seksi Vera KI		
56		Minggu 4	FGD Pejabat Administrstor	Aula KPPN Painan	FGD Triwulan III		Kepala Kantor		
57		Minggu 4	Talkshow di Radio Langkisau FM	di Radio Langkisau	Talkshow tentang Tusi KPPN		Kepala Kantor		

58	September 2021	Minggu 1	DKO dan Performance Dialogue Pencapaian IKU Triwulan 3 (Bulan Agustus) Tahun 2021	Aula KPPN Painan	Diikuti oleh Seluruh Pegawai untuk mengevaluasi Pelaksanaan Kinerja Bulan Agustus Tahun 2021 Membahas isu-isu strategis organisasi, mengevaluasi capaian IKU, proyeksi capaian dan merumuskan langkah tindak lanjutnya Serta Pembahasan Unit Pengendali Risiko		Subbag Umum		
59		Minggu 1	Rapat Progress WBK/WBBM	Aula KPPN Painan	Rapat Monev Progress WBK/WBBM dihadiri oleh seluruh pegawai		Seksi Vera KI		
60		Minggu 2	Monev Layanan Bank/Pos Persepsi Triwulan III 2021	Bank Mitra Kerja KPPN Painan	Melakukan monev bank/pos persepsi atas layanan penerimaan Negara dan penerapan TNA	600,000	Seksi Bank		
61		Minggu 4	Bimtek Implementasi Aplikasi SAKTI	Aula KPPN Painan	Bimtek Implementasi Aplikasi SAKTI	2,318,000	Seksi PDMS		
62		Minggu 2	GKM Seksi PDMS	Aula KPPN Painan	GKM Seksi PDMS		Seksi PDMS		
63		Minggu 3	Monev Bank	Bank Mitra Kerja KPPN Painan	Monev Bank	300,000	Seksi Bank		
64		Minggu 3	Pembinaan ke satker	Satuan Kerja	Pembinaan ke Satuan Kerja terkait Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran	600,000	Seksi PDMS		
65		Minggu 3	GKM Seksi Bank	Aula KPPN Painan	GKM Mekanisme Retur Dihadiri oleh seluruh pegawai		Seksi Bank		
66		Minggu 4	Capacity Building	Pesisir Selatan	Kegiatan Capacity building diikuti oleh seluruh pegawai, PPNPN dan Keluarga	18,000,000	subbag Umum		
67	Oktober 2021	Minggu 1	DKO dan Performance Dialogue Pencapaian IKU Triwulan 3 (Bulan September) Tahun 2021 dan Rapat UPR	Aula KPPN Painan	Diikuti oleh Seluruh Pegawai untuk mengevaluasi Pelaksanaan Kinerja Bulan September Tahun 2021 Membahas isu-isu strategis organisasi, mengevaluasi capaian IKU, proyeksi capaian dan merumuskan langkah tindak lanjutnya Serta Pembahasan Unit Pengendali Risiko		Subbag Umum dan Seksi VeraKI		
68		Minggu 1	Rapat Progress WBK/WBBM	Aula KPPN Painan	Rapat Monev Progress WBK/WBBM dihadiri oleh seluruh pegawai		Seksi Vera KI		
69		Minggu 4	Talkshow di Radio Langkisau FM	di Radio Langkisau	Talkshow tentang Dana Desa		Kepala Kantor		
70		Minggu 1	Survey IKM Semester 2	Satuan Kerja	Survey Indeks Kepuasan Masyarakat Semester 2 Tahun 2021. Survey ini dilakukan terhadap seluruh pengguna layanan KPPN untuk mengetahui tingkat kepuasan pelanggan dengan indeks tertentu yang ditetapkan	1,000,000	Seksi PDMS		
71		Minggu 1	Sosialisasi LLAT 2021	Aula KPPN Painan	Diikuti oleh satuan kerja dan bank/ pos persepsi mitra kerja KPPN Painan sebagai pedoman pelaksanaan penerimaan, pengeluaran, dan Pertanggungjawaban akhir tahun anggaran 2021	6,063,000	Seksi PDMS, Seksi Bank, dan Seksi VeraKI		
72		Minggu 4	GKM Subbag Umum	Aula KPPN Painan	GKM Subbag Umum		Subbag Umum		
73		Minggu 3	GKM Seksi Veraki	Aula KPPN Painan	GKM Seksi Veraki		Seksi Vera KI		
74		Minggu 4	Pemilihan Petugas Front Office KPPN Terbaik	Aula KPPN Painan	Pemilihan Petugas Front Office KPPN Terbaik	500,000			
75		Minggu 4	Peringatan Hari ORI	KPPN Painan	Merayakan Hari Oeang Republik Indonesia dengan mengundang Instansi Kantor Vertikal Kementerian Keuangan yang ada di Painan		Subbag Umum		

76	Nov-21	Minggu 1	DKO dan Performance Dialogue Pencapaian IKU Triwulan 4 (Bulan Oktober) Tahun 2021	Aula KPPN Painan	Diikuti oleh Seluruh Pegawai untuk mengevaluasi Pelaksanaan Kinerja Bulan Oktober Tahun 2021 Membahas isu-isu strategis organisasi, mengevaluasi capaian IKU, proyeksi capaian dan merumuskan langkah tindak lanjutnya Serta Pembahasan Unit Pengendali Risiko		Subbag Umum		
77		Minggu 1	Rapat Progress WBK/WBBM	Aula KPPN Painan	Rapat Monev Progress WBK/WBBM dihadiri oleh seluruh pegawai		Seksi Vera KI		
78		Minggu 2	GKM Seksi PDMS	Aula KPPN Painan	GKM Seksi PDMS		Seksi PDMS		
79		Minggu 3	Monev Pelaksanaan Anggaran	Satuan Kerja	Pembinaan ke Satuan Kerja terkait Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran	600,000	Seksi PDMS		
80		Minggu 3	Survey kepuasan pengguna layanan internal	KPPN Painan	Survey dilakukan terhadap seluruh pegawai KPPN Painan untuk mengetahui tingkat kepuasan para pegawai terhadap layanan internal KPPN dengan indeks tertentu yang ditetapkan		- Subbag Umum		
81		Minggu 3	Monev UMI	Bank Mitra Kerja KPPN Painan	Melakukan Monev Kredit Program ke Bank Mitra Kerja KPPN Painan,	600,000	Seksi Bank		
82		Minggu 4	FGD Pejabat Administrstor	Aula KPPN Painan	FGD Triwulan IV		Kepala Kantor		
83		Minggu 4	GKM Seksi Bank	Aula KPPN Painan	GKM Seksi Bank		Seksi Bank		
84	Desember 2021	Minggu 1	DKO dan Performance Dialogue Pencapaian IKU Triwulan 4 (Bulan November) Tahun 2021	Aula KPPN Painan	Diikuti oleh Seluruh Pegawai untuk mengevaluasi Pelaksanaan Kinerja Bulan November Tahun 2021 Membahas isu-isu strategis organisasi, mengevaluasi capaian IKU, proyeksi capaian dan merumuskan langkah tindak lanjutnya Serta Pembahasan Unit Pengendali Risiko		Subbag Umum		
85		Minggu 1	Pelaksanaan Peringatan HAKORDIA tahun 2021	KPPN Painan	Pelaksanaan Peringatan HAKORDIA tahun 2021		Kepala Kantor		
86		Minggu 1	Rapat Progress WBK/WBBM	Aula KPPN Painan	Rapat Monev Progress WBK/WBBM dihadiri oleh seluruh pegawai		Seksi Vera KI		
87		Minggu 4	Monev Bank	Bank Mitra Kerja KPPN Painan	Melakukan monev bank/pos persepsi atas layanan penerimaan Negara dan penerapan TNA	300,000	Seksi Bank		
88		Minggu 4	Bimtek Implementasi Aplikasi SAKTI	Aula KPPN Painan	Bimtek Implementasi Aplikasi SAKTI	2,318,000	Seksi PDMS		
89		Minggu 4	Monitoring Layanan Penerimaan Negara Akhir Tahun 2021	Aula KPPN Painan	Melakukan monev penerimaan Negara pada akhir tahun 2021 ke bank/pos persepsi mitra kerja KPPN Painan	600,000	Seksi Bank		

Kepala Subbagian Umum


Suciro

Kepala Seksi PDMS


Mekar Pramudi Arthawurie

Kepala Seksi Bank


Jasniwita

Kepala Seksi Vera KI


Sri Gustini Ekawaty

Kepala Kantor


Lita Qadarina Hardian



LAMPIRAN 3

FORMULIR

PENGUKURAN KINERJA

TAHUN 2021

NILAI KINERJA ORGANISASI (NKO)
KPPN Painan
Periode s.d. Bulan Desember Tahun 2021

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/IKU	Target	Realisasi	Pol	V/C*	Bobot	Bobot Tertimbang	Indeks Capaian IKU/NSS/Np
Stakeholder (25.00)								105.79
Pengelolaan Perbendaharaan yang akuntabel dan produktif								105.79
1a-N	Nilai kualitas LK Kuasa BUN KPPN	94.00	99.44	Maximize	Proxy Moderate	14.00%	100.00%	105.79
Customer (15.00)								106.47
Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien								106.47
2a-N	Indeks kepuasan satker terhadap layanan KPPN	4.64	4.94	Maximize	Exact Moderate	21.00%	100.00%	106.47
Internal Process (30.00)								108.00
Perumusan regulasi dan otorisasi yang kredibel								100.52
3a-N	Persentase penyelesaian SP2D secara tepat waktu	99.40	99.92	Maximize	Proxy Moderate	14.00%	100.00%	100.52
Komunikasi, edukasi, dan standardisasi yang berkesinambungan								107.37
4a-N	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	87.50	89.39	Maximize	Proxy Moderate	14.00%	33.33%	102.15
4b-N	Persentase tingkat implementasi standarisasi kompetensi pejabat perbendaharaan	30.00	100.00	Maximize	Proxy Moderate	14.00%	33.33%	120.00
4c-CP	Persentase tingkat implementasi Aplikasi SAKTI	100.00	100.00	Maximize	Proxy Moderate	14.00%	33.33%	100.00
Pengelolaan kas yang optimal								120.00
5a-CP	Persentase akurasi perencanaan kas	82.00	100.00	Maximize	Proxy Moderate	14.00%	50.00%	120.00
5b-N	Indeks efektivitas pengelolaan pengeluaran kas	3.15	4.00	Maximize	Proxy Moderate	14.00%	50.00%	120.00
Pelaksanaan anggaran yang efektif dan efisien								110.14
6a-CP	Nilai kinerja pelaksanaan anggaran K/L	89.00	96.60	Maximize	Proxy Low	19.00%	40.43%	108.53
6b-CP	Nilai kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa	90.00	99.45	Maximize	Proxy Moderate	14.00%	29.79%	110.50
6c-N	Tingkat Partisipasi Pelaporan Data Capaian Output Satker	89.00	99.63	Maximize	Proxy Moderate	14.00%	29.79%	111.94
Akuntansi dan pelaporan keuangan negara yang akuntabel, transparan, dan tepat waktu								101.99
7a-CP	Persentase rekonsiliasi tingkat UAKPA secara tepat waktu dan andal	98.10	100.00	Maximize	Proxy Moderate	14.00%	50.00%	101.94
7b-N	Persentase LPJ Bendahara yang andal dan tepat waktu	98.00	100.00	Maximize	Proxy Moderate	14.00%	50.00%	102.04
Learning and Growth (30.00)								113.38
Organisasi dan SDM yang optimal dan berkinerja tinggi								111.65
8a-N	Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis Strategy Focused Organization	84.00	88.38	Maximize	Proxy Moderate	14.00%	33.33%	105.21
8b-N	Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal	83.00	97.08	Maximize	Proxy Moderate	14.00%	33.33%	116.96
8c-N	Nilai rata - rata hard competency pegawai	78.00	88.00	Maximize	Proxy Moderate	14.00%	33.33%	112.82
Pengelolaan Keuangan dan BMN yang efisien, efektif, dan akuntabel								108.50
9a-CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran KPPN	95.50	95.93	Maximize	Proxy Moderate	14.00%	33.33%	100.45
9b-N	Nilai kualitas LK tingkat UAKPA dan UAKPB	82.00	96.00	Maximize	Proxy Moderate	14.00%	33.33%	117.07
9c-N	Tingkat kualitas pengelolaan BMN	100.00	108.00	Maximize	Proxy Moderate	14.00%	33.33%	108.00
Sistem informasi dan teknologi yang andal								120.00

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/IKU	Target	Realisasi	Pol	V/C*	Bobot	Bobot Tertimbang	Indeks Capaian IKU/NSS/Np
10a-N	Persentase penyelesaian implementasi Rencana Sistem Manajemen Keamanan Informasi	80.00	100.00	Maximize	Proxy Moderate	14.00%	100.00%	120.00
NILAI KINERJA ORGANISASI								108.83

NIP.

LAMPIRAN 4

LAIN-LAIN YANG DIANGGAP PERLU

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2021

KEMEN/LEMB (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
 UNIT ORG (08) Ditjen Perbendaharaan
 UNIT KERJA (634409) KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PAINAN
 ALOKASI Rp.1,279,534,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2021			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
015.08.CD	Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko			25,288,000	
4803	Monev Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko			300,000	
4803.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan[Base Line]	1.0 Laporan		300,000	
	Lokasi : KAB. PESISIR SELATAN				
4803.FAE.001	Rekomendasi atas Kinerja Investasi Pemerintah	1.0 Rekomendasi		300,000	
100	Tidak ada komponen			300,000	U
A	Monev Penyaluran Pembiayaan Ultra Mikro			300,000	
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.142-Painan)			300,000	RM
	- Transport Lokal [2 ORG x 1 HR x 1 KL]	2.0 OK	150,000	300,000	
6212	Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi			19,280,000	
6212.BMB	Komunikasi Publik[Base Line]	34.0 layanan		7,564,000	
	Lokasi : KAB. PESISIR SELATAN				
6212.BMB.001	Komunikasi dan Edukasi Implementasi Aplikasi (PU)	34.0 Satker		7,564,000	
100	Tidak ada komponen			7,564,000	U
A	Implementasi Aplikasi SAKTI			7,564,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.142-Painan)			7,564,000	RM
	- Konsumsi Narasumber dan Panitia [3 ORG x 4 KL]	12.0 OK	61,000	732,000	
	- Konsumsi Peserta Satker [28 STKR x 1 ORG x 4 KL]	112.0 OK	61,000	6,832,000	
6212.FAC	Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara[Base Line]	22.0 Orang		854,000	
	Lokasi : KAB. PESISIR SELATAN				
6212.FAC.001	Standardisasi Kompetensi Pengelola Perbendaharaan dan Edukasi Jabatan Fungsional Bidang Perbendaharaan (PU)	22.0 Orang		854,000	
100	Tidak ada komponen			854,000	U
A	TANPA SUB KOMPONEN			854,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.142-Painan)			854,000	RM
	- Konsumsi Peserta [10 ORG x 1 KL]	10.0 OK	61,000	610,000	
	- Konsumsi Panitia [2 ORG x 2 KL]	4.0 OK	61,000	244,000	
6212.FAH	Pengelolaan Keuangan Negara[Base Line]	2.0 Laporan		5,063,000	
	Lokasi : KAB. PESISIR SELATAN				
6212.FAH.001	Edukasi Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Tingkat Kuasa BUN	2.0 Kegiatan		5,063,000	
100	Tidak ada komponen			5,063,000	U
A	TANPA SUB KOMPONEN			5,063,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.142-Painan)			5,063,000	RM
	- Konsumsi Peserta Satker [34 STKR x 2 ORG x 1 KEG]	68.0 OK	61,000	4,148,000	
	- Konsumsi Narasumber dan Panitia [15 ORG x 1 KEG]	15.0 OK	61,000	915,000	
6212.FAL	Pengelolaan Pelaksanaan Anggaran dan Pembiayaan[Base Line]	8.0 Dokumen		5,799,000	
	Lokasi : KAB. PESISIR SELATAN				
6212.FAL.004	Konsultasi Pencairan Dana	8.0 Kegiatan		5,799,000	
100	Tidak ada komponen			5,799,000	U

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2021

KEMEN/LEMB (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
 UNIT ORG (08) Ditjen Perbendaharaan
 UNIT KERJA (634409) KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PAINAN
 ALOKASI Rp. 1,279,534,000

KODE (1)	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL (2)	PERHITUNGAN TAHUN 2021			SD/ CP (6)
		VOLUME (3)	HARGA SATUAN (4)	JUMLAH BIAYA (5)	
A 521211	<i>Konsultasi</i> Belanja Bahan (KPPN.142-Painan) - Konsumsi Peserta Pemda [1 PEMDA x 2 ORG x 1 KEG] - Konsumsi Peserta LKBB [1 LKBB x 1 ORG x 1 KEG] - Konsumsi Peserta Bank Pos [2 BANK x 1 ORG x 1 KEG] - Konsumsi Peserta KPPN [5 ORG x 1 KEG]	2.0 OK 1.0 OK 2.0 OK 5.0 OK	61,000 61,000 61,000 61,000	610,000 610,000 122,000 61,000 122,000 305,000	RM
B 521211	<i>Sosialisasi dan Bimbingan Teknis</i> Belanja Bahan (KPPN.142-Painan) - Konsumsi Peserta Satker [34 STKR x 1 ORG x 1 KEG] - Konsumsi Peserta Narasumber dan Panitia [15 ORG x 1 KEG] - ATK dan Bahan Habis Pakai	34.0 OK 15.0 OK 1.0 KEG	61,000 61,000 1,000,000	3,989,000 3,989,000 2,074,000 915,000 1,000,000	RM
C 524113	<i>Pembinaan Satker</i> Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (KPPN.142-Painan) - Transport Lokal [2 ORG x 2 KALI x 2 HARI]	8.0 OK	150,000	1,200,000 1,200,000	RM
6213	Monev Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko			3,308,000	
6213.FAC	Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara[Base Line] Lokasi : KAB. PESISIR SELATAN	1.0 Orang		908,000	
6213.FAC.001	Monev Pengembangan Kompetensi KPA, PPK, PPSPM, Bendahara dan Pengelola Perbendaharaan	1.0 Pegawai		908,000	
100	Tidak ada komponen			908,000	U
A 524111	<i>Pembinaan Jabatan Fungsional Perbendaharaan</i> Belanja Perjalanan Dinas Biasa (KPPN.142-Painan) - Transport [1 ORG x 2 KL] - Uang Harian [1 ORG x 2 KL x 1 HR]	2.0 OK 2.0 OH	150,000 304,000	908,000 300,000 608,000	RM
6213.FAL	Pengelolaan Pelaksanaan Anggaran dan Pembiayaan[Base Line] Lokasi : KAB. PESISIR SELATAN	2.0 Dokumen		2,400,000	
6213.FAL.001	Monev Penerimaan dan Pengeluaran Kas	1.0 Rekomendasi		1,200,000	
100	Tidak Ada Komponen			1,200,000	U
A 524113	<i>Monev Bank/Pos</i> Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (KPPN.142-Painan) - Transport Lokal [2 ORG x 2 KL x 2 HARI]	8.0 OK	150,000	1,200,000 1,200,000 1,200,000	RM
6213.FAL.003	Reviu Belanja Pemerintah	1.0 Rekomendasi		1,200,000	
100	Tidak ada komponen			1,200,000	U
A 524113	<i>Monev Pelaksanaan Anggaran</i> Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (KPPN.142-Painan) - Transport Lokal [2 ORG x 2 KL x 2 HARI]	8.0 OK	150,000	1,200,000 1,200,000 1,200,000	RM
6214	Pengelolaan Kas dan Pembiayaan Negara			1,400,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2021

KEMEN/LEMB (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
 UNIT ORG (08) Ditjen Perbendaharaan
 UNIT KERJA (634409) KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PAINAN
 ALOKASI Rp.1,279,534,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2021			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6214.FAL	Pengelolaan Pelaksanaan Anggaran dan Pembiayaan[Base Line]	34.0 Dokumen		1,400,000	
6214.FAL.002	Lokasi : KAB. PESISIR SELATAN				
100	Surat Perintah Pencairan/Penarikan/Repayment/Pengesahan Dana Tidak ada komponen	34.0 Dokumen		1,400,000	U
A	Pelaksanaan Pencairan/Penerikan/Pengesahan Dana			400,000	
521211	Belanja Bahan (KPPN.142-Painan)			400,000	RM
B	- Pelaksanaan Kearsipan dan Dokumentasi	1.0 THN	400,000	400,000	
521211	Penerbitan/Persetujuan/Rekonsiliasi Rekening/SKPP/Konfirmasi Penerimaan Negara, DLL Belanja Bahan (KPPN.142-Painan)			1,000,000	RM
6215	- Dokumentasi/Pencetakan/Penggandaan	1.0 THN	1,000,000	1,000,000	
6215.FAH	Penyelenggaraan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Negara			1,000,000	
6215.FAH	Pengelolaan Keuangan Negara[Base Line]	8.0 Laporan		1,000,000	
6215.FAH.003	Lokasi : KAB. PESISIR SELATAN				
100	Laporan Keuangan BUN Tidak ada komponen	8.0 Laporan		1,000,000	U
A	Penyusunan Laporan Keuangan Tingkat Kuasa BUN di Daerah			1,000,000	
521211	Belanja Bahan (KPPN.142-Painan)			1,000,000	RM
	- Pelaksanaan Kearsipan dan Dokumentasi	1.0 THN	1,000,000	1,000,000	
015.08.WA	Program Dukungan Manajemen			1,254,246,000	
4715	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum			1,081,087,000	
4715.EAB	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal[Base Line]	1.0 Layanan		7,000,000	
4715.EAB.002	Lokasi : KAB. PESISIR SELATAN				
100	Rencana Kerja dan Anggaran Unit Eselon I Tidak ada komponen	1.0 Dokumen		7,000,000	U
A	Pengelolaan Keuangan			7,000,000	
521211	Belanja Bahan (KPPN.142-Painan)			7,000,000	RM
	- Penyelesaian LHP/LAKIP/RKAKU/SAI	1.0 THN	7,000,000	7,000,000	
4715.EAC	Layanan Umum[Base Line]	36.0 Layanan		667,944,000	
4715.EAC.001	Lokasi : KAB. PESISIR SELATAN				
100	Dukungan Pimpinan dan Keprotokoleran Tidak ada komponen	12.0 Bulan Layanan		23,496,000	U
A	TANPA SUB KOMPONEN			23,496,000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa (KPPN.142-Painan)			17,456,000	RM
	- Transport [2 ORG x 4 KL]	8.0 OK	70,000	560,000	
	- Akomodasi [2 ORG x 4 KL x 2 HR]	16.0 OH	600,000	9,600,000	
	- Uang Harian [2 ORG x 4 KL x 3 HR]	24.0 OH	304,000	7,296,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2021

KEMEN/LEMB (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
 UNIT ORG (08) Ditjen Perbendaharaan
 UNIT KERJA (634409) KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PAINAN
 ALOKASI Rp.1,279,534,000

Halaman : 4

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2021			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.142-Painan)			6,040,000	
	- Transport Lokal [2 ORG x 5 KL x 2 HR]	20.0 OK	302,000	6,040,000	
4715.EAC.003	<u>Kerumahtanggaan</u>	12.0 Bulan Layanan		38,800,000	
100	Tidak ada komponen			38,800,000	U
A	TANPA SUB KOMPONEN			38,800,000	
521811	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u> (KPPN.142-Painan)			38,800,000	RM
	- ATK dan Supplies Komputer	1.0 THN	38,800,000	38,800,000	
4715.EAC.004	<u>Operasionalisasi Kantor</u>	12.0 Bulan Layanan		605,648,000	
002	Operasional dan Pemeliharaan			605,648,000	U
A	Keperluan Sehari-hari Perkantoran			356,841,000	
521111	<u>Belanja Keperluan Perkantoran</u> (KPPN.142-Painan)			355,117,000	RM
	- Kertas berharga/meterai	1.0 THN	1,500,000	1,500,000	
	- Keperluan sehari-hari perkantoran	1.0 THN	80,878,000	80,878,000	
	> Honorarium PPNPN			272,739,000	
	- Honor Satpam [4 ORG x 13 BLN]	52.0 OB	2,863,000	148,876,000	
	- Honor Sopir [1 ORG x 13 BLN]	13.0 OB	2,909,000	37,817,000	
	- Honor Pramubakti [2 ORG x 13 BLN]	26.0 OB	2,596,000	67,496,000	
	- Uang Lembur Satpam, Sopir, dan Pramubakti [7 ORG x 2 JAM x 50 HR]	700.0 OJ	15,000	10,500,000	
	- Uang Makan Lembur Satpam, Sopir, dan Pramubakti [7 ORG x 50 HR]	350.0 OH	23,000	8,050,000	
521119	<u>Belanja Barang Operasional Lainnya</u> (KPPN.142-Painan)			1,724,000	RM
	- Dokumentasi/Pencetakan/Penggandaan/Laminasi	1.0 THN	899,000	899,000	
	- Pelaksanaan Kearsipan dan Perpustakaan	1.0 KEG	825,000	825,000	
B	Langganan Daya dan Jasa			75,632,000	
521114	<u>Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat</u> (KPPN.142-Painan)			800,000	RM
	- Pos/Pengepakan/Pengiriman/Pengangkutan	1.0 THN	800,000	800,000	
522111	<u>Belanja Langganan Listrik</u> (KPPN.142-Painan)			69,384,000	RM
	- Langganan Listrik	12.0 BLN	5,782,000	69,384,000	
522112	<u>Belanja Langganan Telepon</u> (KPPN.142-Painan)			1,176,000	RM
	- Langganan Telepon	12.0 BLN	98,000	1,176,000	
522113	<u>Belanja Langganan Air</u> (KPPN.142-Painan)			1,608,000	RM
	- Langganan Air	12.0 BLN	134,000	1,608,000	
522119	<u>Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya</u> (KPPN.142-Painan)			2,664,000	RM
	- Langganan Zoom Meeting	12.0 BLN	222,000	2,664,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2021

KEMEN/LEMB (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
 UNIT ORG (08) Ditjen Perbendaharaan
 UNIT KERJA (634409) KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PAINAN
 ALOKASI Rp.1,279,534,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2021			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
C	<i>Pelaksanaan Operasional Kantor</i>			173,175,000	
521115	<u>Belanja Honor Operasional Satuan Kerja</u> (KPPN.142-Painan)			116,040,000	RM
	> Honor Pengelola Keuangan			73,320,000	
	- Honor Pengelola Keuangan	1.0 THN	58,920,000	58,920,000	
	- Honor Tim SAI	1.0 THN	14,400,000	14,400,000	
	> Honor Pengelola Keuangan BA BUN Dana Desa dan DAK Fisik			42,720,000	
	- KPA [1 ORG x 12 BLN]	12.0 OB	1,250,000	15,000,000	
	- PPK [1 ORG x 12 BLN]	12.0 OB	1,210,000	14,520,000	
	- PPSPM [1 ORG x 12 BLN]	12.0 OB	480,000	5,760,000	
	- Staff Pengelola Keuangan [2 ORG x 12 BLN]	24.0 OB	310,000	7,440,000	
521119	<u>Belanja Barang Operasional Lainnya</u> (KPPN.142-Painan)			41,192,000	RM
	> Pengadaan Seragam			16,100,000	
	- Seragam Pegawai [14 ORG x 1 STEL]	14.0 STEL	700,000	9,800,000	
	- Seragam Satpam [4 ORG x 1 STEL]	4.0 STEL	1,200,000	4,800,000	
	- Seragam Sopir [1 ORG x 1 STEL]	1.0 STEL	500,000	500,000	
	- Seragam Pramubakti [2 ORG x 1 STEL]	2.0 STEL	500,000	1,000,000	
	> Obat-obatan dan Dokter			16,440,000	
	- Obat-obatan	14.0 ORG	138,000	1,932,000	
	- Dokter [1 ORG x 12 BLN]	12.0 OB	1,000,000	12,000,000	
	- Peningkatan Kebugaran	12.0 BLN	209,000	2,508,000	
	> Penyelenggaraan Rapat/Jamuan Tamu			8,652,000	
	- Konsumsi rapat/jamuan tamu	12.0 BLN	406,000	4,872,000	
	- Penambah Daya Tahan Tubuh Akhir Tahun Anggaran [14 ORG x 15 HR]	210.0 OH	18,000	3,780,000	
521131	<u>Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19</u> (KPPN.142-Painan)			2,183,000	RM
	- Belanja Barang Operasional Penanganan Pandemi COVID-19	1.0 THN	2,183,000	2,183,000	
521213	<u>Belanja Honor Output Kegiatan</u> (KPPN.142-Painan)			11,760,000	RM
	- Honor Pejabat PBJ [1 ORG x 12 BLN]	12.0 OB	680,000	8,160,000	
	- Honor Penyimpan dan Pengurus BMN [1 ORG x 12 BLN]	12.0 OB	300,000	3,600,000	
521841	<u>Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19</u> (KPPN.142-Painan)			2,000,000	RM
	- Belanja Barang Persediaan-Penanganan Pandemi Covid-19	1.0 Tahun	2,000,000	2,000,000	
4715.EAD	Layanan Sarana Internal[Base Line] Lokasi : KAB. PESISIR SELATAN	110.0 unit		97,610,000	
4715.EAD.002	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	110.0 unit		97,610,000	
002	Operasional dan Pemeliharaan			97,610,000	U
A	TANPA SUB KOMPONEN			97,610,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2021

KEMEN/LEMB (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
 UNIT ORG (08) Ditjen Perbendaharaan
 UNIT KERJA (634409) KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PAINAN
 ALOKASI Rp.1,279,534,000

Halaman : 6

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2021			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
523121	<u>Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin</u> (KPPN.142-Painan)			97,610,000	RM
	- Kendaraan Roda 4	2.0 Unit	19,245,000	38,490,000	
	- Kendaraan Roda 2	1.0 Unit	749,000	749,000	
	- Inventaris Kantor	14.0 OT	22,000	308,000	
	- Komputer/Laptop	35.0 Unit	793,000	27,755,000	
	- Printer	23.0 Unit	191,000	4,393,000	
	- UPS	5.0 Unit	20,000	100,000	
	- UPS 10 KVA	3.0 Unit	3,567,000	10,701,000	
	- Tabung pemadam api	8.0 Unit	300,000	2,400,000	
	- AC Standing Floor/Split/Cassette	16.0 Unit	119,000	1,904,000	
	- Genset 50 KVA	1.0 Unit	6,110,000	6,110,000	
	- CCTV	1.0 THN	4,700,000	4,700,000	
4715.EAE	Layanan Prasarana Internal[Base Line] Lokasi : KAB. PESISIR SELATAN	2725.0 unit		305,733,000	
4715.EAE.001	<u>Gedung/Bangunan</u>	634.0 m2		233,900,000	
100	Tidak ada komponen			233,900,000	U
A	TANPA SUB KOMPONEN			233,900,000	
533121	<u>Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan</u> (KPPN.142-Painan)			233,900,000	RM
	- Biaya Perencanaan Rehab Atap Gedung Kantor KPPN Painan	1.0 PAKET	18,000,000	18,000,000	
	- Rehab Atap Gedung Kantor KPPN Painan	634.0 M2	313,723	198,900,000	
	- Biaya Pengawasan Rehab Atap Gedung Kantor KPPN Painan	1.0 PAKET	14,000,000	14,000,000	
	- Biaya Pengelola Kegiatan Rehab Alap Gedung Kantor KPPN Painan	1.0 PAKET	3,000,000	3,000,000	
4715.EAE.002	<u>Pemeliharaan Gedung dan Bangunan</u>	2091.0 m2		71,833,000	
002	Operasional dan Pemeliharaan			71,833,000	U
A	TANPA SUB KOMPONEN			71,833,000	
523111	<u>Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan</u> (KPPN.142-Painan)			64,175,000	RM
	- Pemeliharaan Gedung Kantor Tidak Bertingkat	654.0 M2	90,681	59,305,000	
	- Pemeliharaan Halaman Kantor	1137.0 M2	4,284	4,870,000	
523119	<u>Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya</u> (KPPN.142-Painan)			7,658,000	RM
	- Pemeliharaan Rumah Jabatan Kepala KPPN	70.0 M2	86,400	6,048,000	
	- Pemeliharaan Halaman Rumah Jabatan	230.0 M2	7,000	1,610,000	
4715.EAN	Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Internal[Base Line] Lokasi : KAB. PESISIR SELATAN	2.0 Dokumen		2,800,000	
4715.EAN.003	<u>Laporan Kinerja (LAKIN) Unit Eselon I</u>	2.0 Laporan		2,800,000	
100	Tidak ada komponen			2,800,000	U
A	Penyusunan LAKIN Tingkat Satker			2,800,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2021

KEMEN/LEMB (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
 UNIT ORG (08) Ditjen Perbendaharaan
 UNIT KERJA (634409) KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PAINAN
 ALOKASI Rp. 1,279,534,000

Halaman: 7

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2021			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.142-Painan)			2.800,000	RM
	- Dokumentasi/Pencetakan/Penggandaan dalam rangka Kepatuhan Internal	2.0 KEG	700,000	1.400,000	
	- Dokumentasi/Pencetakan/Penggandaan dalam rangka Pengelolaan Kinerja	2.0 KEG	700,000	1.400,000	
4718	Pengelolaan komunikasi dan informasi publik			10,000,000	
4718.BMB	Komunikasi Publik[Base Line]	4.0 layanan		10,000,000	
	Lokasi : KAB. PESISIR SELATAN				
4718.BMB.001	<u>Pembinaan/Edukasi Publik</u>	4.0 Kegiatan		10,000,000	U
100	Tidak ada komponen			10,000,000	
A	<i>Pelayanan Umum, Rumah Tangga dan Kehumasan</i>			10,000,000	
521219	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u> (KPPN.142-Painan)			10,000,000	RM
	- Biaya Kehumasan	4.0 KEG	2.500,000	10,000,000	
4719	Pengelolaan Organisasi dan SDM			163.159,000	
4719.EAF	Layanan SDM[Base Line]	33.0 orang		162.659,000	
	Lokasi : KAB. PESISIR SELATAN				
4719.EAF.001	<u>Gaji dan Tunjangan</u>	14.0 Pegawai		156.650,000	U
001	<u>Gaji dan Tunjangan</u>			156.650,000	
A	<i>TANPA SUB KOMPONEN</i>			156.650,000	
511129	<u>Belanja Uang Makan PNS</u> (KPPN.142-Painan)			106,039,000	RM
	- Uang Makan Golongan II [7 ORG x 18 HR x 12 BLN]	1512.0 OH	35,500	53,676,000	
	- Uang Makan Golongan III [6 ORG x 17 HR x 12 BLN]	1224.0 OH	37,500	45,900,000	
	- Uang Makan Golongan IV [1 ORG x 18 HR x 9 BLN]	162.0 OH	39,900	6,463,000	
512211	<u>Belanja Uang Lembur</u> (KPPN.142-Painan)			50,611,000	RM
	- Uang Lembur Golongan II [7 ORG x 2 JAM x 50 HR]	700.0 OJ	15,000	10,500,000	
	- Uang Lembur Golongan III [6 ORG x 2 JAM x 50 HR]	600.0 OJ	20,000	12,000,000	
	- Uang Lembur Golongan IV [1 ORG x 2 JAM x 50 HR]	100.0 OJ	26,500	2,650,000	
	- Uang Makan Lembur Golongan II [7 ORG x 50 HR x 1 KL]	350.0 OH	35,000	12,250,000	
	- Uang Makan Lembur Golongan III [6 ORG x 50 HR x 1 KL]	300.0 OH	37,000	11,100,000	
	- Uang Makan Lembur Golongan IV [1 ORG x 50 HR x 1 KL]	50.0 OH	42,220	2,111,000	
4719.EAF.004	<u>Pengembangan SDM</u>	19.0 Pegawai		6,009,000	U
100	Tidak ada komponen			6,009,000	
A	<i>Pengelolaan Kepegawaian</i>			6,009,000	
521219	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u> (KPPN.142-Painan)			4,059,000	RM
	> Apresiasi Pegawai			1,000,000	
	- Barang Habis Pakai [1 ORG x 2 KL]	2.0 OK	500,000	1,000,000	
	> Peningkatan Kualitas SDM			3,059,000	
	- Konsumsi [19 ORG x 1 KL]	19.0 OK	61,000	1,159,000	
	- Barang Habis Pakai [19 ORG x 2 KL]	38.0 OK	50,000	1,900,000	

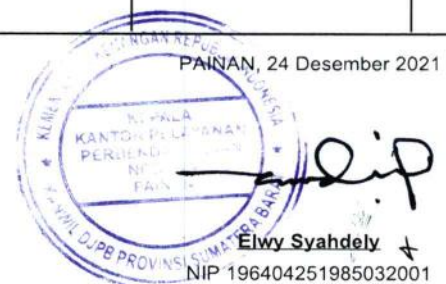
RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2021

KEMEN/LEMB (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
 UNIT ORG (08) Ditjen Perbendaharaan
 UNIT KERJA (634409) KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PAINAN
 ALOKASI Rp.1,279,534,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2021			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
522151	<u>Belanja Jasa Profesi</u> (KPPN.142-Painan) - Honor Narasumber [1 ORG x 2 JAM x 1 KL] > Peningkatan Kualitas SDM	2.0 OJ	900,000	1,800,000 1,800,000 0	RM
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.142-Painan) > Perjalanan Dinas dalam rangka Peningkatan Kualitas SDM - Transport Narasumber [1 ORG x 1 KL]	1.0 OK	150,000	150,000 150,000	RM
4719.EAH	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal[Base Line] ----- Lokasi : KAB. PESISIR SELATAN	2.0 Layanan		500,000	
4719.EAH.002	Hasil Survey/Rekomendasi Kepuasan Pengguna Layanan	2.0 Laporan		500,000	
100	Tidak ada komponen			500,000	U
A	<i>Survey Kepuasan Pengguna Layanan/Persiapan WBK WBBM</i>			500,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.142-Painan) - Belanja Bahan	2.0 KEG	250,000	500,000 500,000	RM

Catatan : 1. U = Komponen Utama
 2. P = Komponen Penunjang
 3. * = Blokir

PAINAN, 24 Desember 2021



Eiwy Syahdely
 NIP 196404251985032001